

HIMPUNAN SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN

Periode, April-Juni 2006



**Biro Hukum dan Humas
Departemen Pertanian**

63: (042)

Bir

4058

616.

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Acara
Pencanangan Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara
Barat Bebas Brucellosis Pada Sapi dan Kerbau 1

Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Acara Panen Padi
Di SP IV Tanah Miring, Kabupaten Merauke Propinsi
Papua, 8

Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Penyadapan
Perdana Karet Rakyat Dan Panen Kelapa Sawit Rakyat
Partisipatif Muara Enim, Sumatera Selatan 17

Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Acara Panen Padi
Di Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan 24

Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Lokakarya
Status Teknologi Budidaya Jarak Pagar 32

Pengarahan Menteri Pertanian RI Pada Acara
Peluncuran Buku "Hidup Sehat Melalui Gizi Seimbang
Dalam Siklus Kehidupan Manusia" 44

Ceramah Menteri Pertanian Pada Musyawarah Nasional
(MUNAS) IV Forum Zakat 50

Himpunan Sambutan Menteri Pertanian Tahun 2006

Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Pembukaan Murenbangtan Nasional 2007, Auditorium DEPTAN	63
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Acara Giling Tebu Temanten MG Tahun 2006 Di PG Prangkil - Pati, Jawa Tengah ...	79
Sambutan Menteri Pertanian Pada Penganangan Penyaluran Hibah ADB No. 0002-INO Di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam & Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (BUEP) Secara Simbolis Kepada KPK-KPK Di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam	87
Sambutan Pidato Menteri Pertanian Pada Puncak Acara Temu Lapang Dan Ekspose Inovasi Teknologi Tanaman Pangan Desa Merden Kec. Purwonegoro, Banjar Negara	99
Sambutan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Pada Rapat Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Barat	111
Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Acara Penganangan Forum Penyuluhan Pertanian	126
Sambutan Menteri Pertanian Pada Pembukaan Semiloka Revitalisasi Pertanian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sulawesi Utara.	131



Bibliografi

Sambutan Menteri Pertanian Pada Pertemuan Deklarasi Penghentian Kebakaran Hutan dan Lahan	142
Sambutan Menteri Pertanian Pada Konferensi Nasional Kelapa VI Di Gorontalo	150
Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara Jambore Dan Festival Karya Penyuluh Pertanian	159
Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara Kunjungan Kerja Ke Pengolah Kopi Kintamani Kab. Bangli Propinsi Bali	170
Sambutan Menteri Pertanian Pada Forum Komunikasi Statistik Dan Sistem Informasi Pertanian Di Hotel Sahid Raya Bali	178
Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Acara Tanam Perdana Pengembangan Jeruk	190
Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Acara Panen Padi Perdana Di Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat	196
Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Peringatan Hari Krida Pertanian Ke 34 Tahun 2006	204
Closing Remarks By Minister of Agriculture of The Republik of Indonesia on the Occasion of the International Oil Palm Conference	212



Sambutan Menteri Pertanian Pada Pembukaan Seminar Multifungsi Dan Revitalisasi Pertanian, Lido lake & Conference	219
--	-----

Sambutan Menteri Pertanian Pada Penganjangan Gerakan Peremajaan Karet Rakyat Mendukung Revitalisasi Perkebunan Musi Banyuasin, SumSel	228
---	-----



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI
PADA ACARA PENCANANGAN
PULAU SUMBAWA PROPINSI NUSA TENGGARA
BARAT BEBAS BRUCELLOSIS
PADA SAPI DAN KERBAU**

Serading, 5 April 2006

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Sdr. Gubernur Nusa Tenggara Barat
Sdr. Muspida Propinsi Nusa Tenggara Barat
Sdr. Para Bupati, "Walikota se Pulau Sumbawa"
Serta Hadirin Sekalian yang saya hormati



Saudara-Saudara sekalian,

Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri acara pencanangan Pulau Sumbawa Bebas penyakit Brucellosis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu



melimpahkan kekuatan kepada kita dalam rangka menunaikan tugas membangun sektor pertanian termasuk sub sektor peternakan khususnya tugas mencegah, mengendalikan dan memberantas berbagai jenis penyakit hewan menular.

Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Propinsi NTB beserta jajarannya yang telah berupaya memprakarsai pelaksanaan program pengendalian dan pemberantasan *Brucellosis* pada sapi dan kerbau di kawasan ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Pulau Sumbawa yang secara konsisten dan berkesinambungan melakukan pengendalian dan pemberantasan penyakit ini melalui kerjasama dengan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional VI, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sosialisasi, intensifikasi pengawasan lalu lintas ternak serta penyediaan sarana dan biaya yang diperlukan.



Saudara - saudara sekalian,

Penyakit Hewan Menular (PHM) *Brucellosis* perlu dibebaskan dari daratan Pulau Sumbawa, mengingat penyakit ini bersifat *zoonosis* dan Pulau Sumbawa merupakan sumber bibit sapi potong bagi daerah lain. Dalam hal ini sebagian populasi sapi potong sebagai penghasil daging di Propinsi NTB berada di Pulau Sumbawa.

Apabila pengendalian dan pemberantasan penyakit tidak tuntas, maka produktifitas dan reproduktifitas sapi potong menjadi rendah, selain itu dapat menimbulkan kerawanan akibat kemungkinan penularan penyakit ini ke manusia sebagai konsumen daging serta, berpotensi dapat menyebar ke wilayah lain yang masih bebas.

Pada kesempatan ini saya minta kepada Saudara - saudara khususnya yang bertugas membidangi peternakan dan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak maupun Saudara yang bertugas dan membina koperasi atau asosiasi sapi potong serta jajaran pemerintahan desa, untuk bersama-sama melaksanakan langkah-langkah pengamanan dan terus meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga dan



mempertahankan agar Pulau Sumbawa tetap bebas dari *Brucellosis* melalui kegiatan pengamatan yang teratur dan berkesinambungan serta tindakan pencegahan dan penolakan penyakit secara ketat dan tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Para Hadirin Yang Berbahagia,

Masalah pemberantasan penyakit hewan termasuk *Brucellosis*, sering tidak semata-mata masalah teknis. Banyak aspek non teknis sangat mempengaruhi dan satu sama lainnya saling berkaitan sehingga upaya pemberantasan menjadi terkendala. Dalam tatanan masyarakat yang sedang berkembang di era otonomi daerah, aspek sosio kultural, tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat belum tinggi dapat menyebabkan upaya pemberantasan sulit dilakukan.

Oleh karena itu pengendalian maupun pemberantasan *Brucellosis* ini termasuk mempertahankan status bebasnya wilayah ini dari *Brucellosis* harus dilakukan terpadu dengan melibatkan banyak pihak di dalam masyarakat. Didalam era otonomi daerah, keterlibatan masyarakat secara luas di



pedesaan, termasuk tokoh masyarakat dan LSM harus lebih dominan. Sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator dan dinamisator.

Para Hadirin Yang Berbahagia,

Suatu tantangan yang cukup besar khususnya bagi jajaran Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa untuk tetap berusaha meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak antar wilayah. Oleh karena itu dukungan dari semua pihak khususnya jajaran Pemerintah Daerah maupun instansi lainnya untuk dapat bekerjasama dan memberikan fasilitas kepada otoritas kesehatan hewan bekerja keras memberantas *Brucellosis* di lapangan. Sasaran utama yang kita tuju adalah tetap bebasnya *Brucellosis* di kawasan ini.

Sehubungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan tersebut, saya sangat mengharapkan semua pihak yang terkait dalam kegiatan ini betul-betul berupaya maksimal, melalui dukungan dana dan daya yang ada serta tetap memegang teguh komitmen yang telah disepakati. Untuk secara bersama mewujudkan harapan tersebut



diperlukan kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk jajaran Pemerintah Daerah dari tingkat propinsi hingga tingkat desa maupun masyarakat luas.

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dijadikan salah satu bekal bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Sekali lagi saya ucapkan “**Selamat**” atas prestasi yang dicapai dalam membebaskan wilayah ini dari *Brucellosis* pada sapi dan kerbau. Semoga dengan telah bebasnya wilayah ini dari *Brucellosis*, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat peternak di Pulau Sumbawa.

Dengan ucapan “ **Bismillahirrahmanirrahiim** “
PULAU SUMBAWA SAYA CANANGKAN SEBAGAI
DAERAH BEBAS BRUCELLOSIS PADA SAPI DAN
KERBAU “ Semoga Allah SWT meridloi usaha-usaha baik
kita semua.



Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 5 April 2006

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI
PADA ACARA PANEN PADI
DI SP IV TANAH MIRING, KABUPATEN MERAUKE,
PROPINSI PAPUA
TANGGAL, 5 – 6 APRIL 2006**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Saya Hormati,

Bapak Presiden RI beserta Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono;
Saudara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
Saudara Anggota DPR RI;
Saudara Gubernur Propinsi Papua;
Saudara Bupati Merauke;
Bapak/Ibu Tokoh-tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama
Para Kontak Tani/Petani dan Semua Hadirin
yang Berbahagia;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkenan-Nya kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara panen padi oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik



Indonesia, yang merupakan rangkaian kegiatan beliau di Propinsi Papua ini

Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Salah satu prioritas pembangunan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu adalah Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) agar sektor tersebut mampu berperan dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada Pencanangan RPPK tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur-Jawa Barat, Bapak Presiden RI antara lain mengamanatkan bahwa bangsa ini perlu membangun ketahanan pangan yang mantap dengan memfokuskan pada peningkatan kapasitas produksi nasional untuk lima komoditas pangan strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu dan daging sapi.

Sejalan dengan amanat dalam RPPK di atas, maka arah pengembangan dan sasaran lima komoditas pangan utama adalah: pertama, mempertahankan swasembada padi/beras berkelanjutan; kedua, menuju swasembada jagung



tahun 2007 dan daya saing ekspor tahun 2008; ketiga, akselerasi peningkatan produksi kedelai untuk mengurangi ketergantungan impor dimana pada tahun 2010, sekitar 65 % dari kebutuhan kedelai nasional diperoleh dari produksi dalam negeri dan pencapaian swasembada kedelai pada tahun 2015; keempat, menuju swasembada gula berkelanjutan mulai tahun 2009; dan kelima, akselerasi peningkatan produksi daging sapi untuk mengurangi ketergantungan impor dan pencapaian swasembada pada tahun 2010.

Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Dalam lima tahun terakhir produksi padi kita mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2001, produksi padi nasional mencapai 50.46 juta ton, dan pada tahun 2005 mencapai 54,06 juta ton GKG atau naik rata-rata 1,7%/tahun. Pada tahun 2004 dan 2005, juga kita telah mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dalam rangka mempertahankan swasembada beras dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi. Upaya tersebut antara lain: penggunaan



benih unggul produksi tinggi seperti. Ciherang, Gilirang, Way Apo Buru; pemupukan berimbang dan penggunaan bahan organik, pengendalian hama terpadu, serta perluasan areal tanam Aplikasi dan upaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui pendekatan Pengelolaan Tanaman Padi dan Sumberdaya Terpadu (PIT).

Dalam rangka efisiensi penggunaan pupuk maka Departemen Pertanian telah mengeluarkan rekomendasi pemupukan N, P dan K sampai tingkat kecamatan yang saat sedang disosialisasikan kepada para petani/kelompok tani. Selanjutnya, dalam rangka efisiensi dan efektifitas perencanaan penggunaan pupuk maka kelompok-kelompok tani diharapkan mengajukan kebutuhan pupuknya berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Pengelolaan usahatani secara berkelompok secara perspektif menjadi tujuan pengembangan mekanisme di masa depan.

Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Di Provinsi Papua, potensi lahan pertanian untuk tanaman pangan masih cukup besar. Sementara



pemanfaatannya masih relatif kecil. Potensi lahan di Provinsi Papua yang sesuai untuk pengembangan lahan pertanian padi mencapai 9.32 juta ha. Dari total potensi lahan tersebut, sekitar 2,3 juta hektar diantaranya terdapat di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan lahan pertanian secara optimal maka diharapkan akan meningkatkan produksi padi yang akan berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal wilayah lain dan bahkan bagi kebutuhan nasional. Pada tahun 2005, luas panen padi di Provinsi ini mencapai 16.339 hektar, dengan tingkat produksinya mencapai 21.632 ton.

Meskipun produksi padi telah dikembangkan secara intensif di Provinsi Papua, namun dalam hal konsumsinya masih perlu dipertahankan pola diversifikasi pangan terutama terhadap pangan lokal. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan konsumsi pangan lokal tidak serta merta beralih ke pangan beras. sehingga konsumsi beras tidak terus meningkat.

Untuk mendukung program pembangunan pertanian di Provinsi Papua, maka pada tahun 2006 Propinsi ini mengelola dana Rp. 103.432.596.000,- yang terdiri dari alokasi anggaran di Propinsi Rp 49.769.887.000 dan di



Kabupaten/Kota sebesar Rp 53.662.709.000. Alokasi anggaran terbesar di kabupaten Merauke yaitu sebesar Rp 13.391.813.000. Seluruh dana ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikelola oleh 99 Satuan Kerja di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Terdapat tiga program pembangunan pertanian yang dikelola oleh Propinsi Papua, yaitu: (1) Program Pengembangan Agribisnis dengan dana Rp. 39.912.023.000 (38,59%) dan (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan dana Rp. 57.497.127.000 (55,59%) dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan dana Rp 6.023.446.000 (5,82%)

Dengan potensi lahan pengembangan pertanian yang ada, dan dukungan alokasi dana yang cukup besar bagi program pembangunan pertanian di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, maka diharapkan Kabupaten Merauke potensial menjadi *Lumbung Pangan Harapan* bagi Bangsa Indonesia.

Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada bulan Februari - April, adalah periode panen raya MT. 2005/2006 terutama di sentra produksi padi dimana

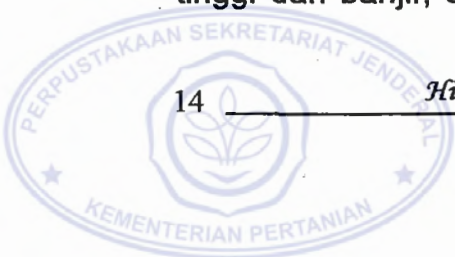


biasanya harga gabah akan turun. Dalam periode ini kita akan menghasilkan 15 juta ton beras atau hampir separuh dari kebutuhan beras nasional yang berjumlah sekitar 31 juta ton. Pada saat inilah peranan pemerintah akan sangat diharapkan agar kelebihan produksi padi terutama di sentra produksi tidak diikuti oleh turunnya harga gabah ditingkat petani.

Dalam rangka mengantisipasi anjloknya harga gabah saat panen raya tersebut diharapkan pemerintah, melalui Perum Bulog dan kegiatan pemberdayaan LUEP serta Pemerintah Daerah mulai melakukan pembelian gabah/beras dari para petani, agar harga gabah/beras tidak jatuh sampai dibawah HPP sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi para petani. Perum Bulog diharapkan dapat mengoptimalkan perannya membeli gabah pada saat panen raya untuk sekaligus mempersiapkan cadangan pangan nasional.

Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Upaya untuk membantu petani dalam mengantisipasi terhadap rendahnya kualitas gabah akibat curah hujan yang tinggi dan banjir, serta upaya menekan kehilangan hasil



panen padi (losses) yang saat ini masih sangat besar sedang terus dilaksanakan dan disempurnakan. Upaya - upaya yang dilakukan dalam penanganan pasca panen meliputi sosialisasi gerakan pelayanan pasca panen pada daerah - daerah sentra produksi padi, menumbuh kembangkan kelembagaan pasca panen antara lain Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), mengoptimalkan penggunaan alsin pasca panen (seperti perontok, pengering. Rice Milling Unit (RMU), Lumbung Desa Modern (LDM), terpal), serta memfasilitasi pengadaan alsin pasca panen seperti sabit bergerigi, terpal plastik, alat perontok dan pengering.

Selanjutnya dalam rangka menghadapi MT. 2006 mendatang akan dilakukan upaya peningkatan produktivitas padi dengan: a) mempercepat pertanaman dengan menggunakan varietas unggul berumur pendek/genjah, b) mobilisasi alat dan mesin pertanian serta pengisian embung-embung, c) penyediaan sarana produksi 6 tepat, d) pengamanan terhadap serangan OPT dan e) pengawalan/ pendampingan oleh para peneliti dan penyuluh pertanian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur memberikan bantuan berupa 6,0



ton pupuk NPK Pelangi; 4,0 ton pupuk Urea; 20 unit thresher dan 50 unit handsprayer, sedangkan PT. Petrokimia Gresik memberikan bantuan berupa 10 ton pupuk SP 36 dan 5 ton Phonska.

Demikian yang dapat saya sampaikan dan atas perhatian Bapak Presiden serta saudara-saudara sekalian kami ucapkan terima kasih. Pada para petani di SP IV Tanah Miring kami ucapkan selamat melaksanakan panen padi mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kerja keras saudara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN
PADA PENYADAPAN PERDANA KARET RAKYAT DAN
PANEN KELAPA SAWIT RAKYAT PARTISIPATIF
MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN**

TANGGAL, 8 APRIL 2006

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat,

Sdr. Gubernur Propinsi Sumatera Selatan

Sdr. Bupati Muara Enim

Sdr. Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim

Sdr. Petani Karet dan Kelapa Sawit Hadirin dan
undangan yang saya hormati,

Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita bersama dapat berkumpul di siang ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara "Penyadapan Perdana Karet Rakyat dan Panen Kelapa Sawit Rakyat Partisipatif".



Suatu kegembiraan bagi saya untuk hadir dan berkumpul dengan teman-teman petani. Dengan demikian, saya secara langsung hari ini dapat berinteraksi dengan para petani dan dapat mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan pertanian khususnya komoditas perkebunan karet dan kelapa sawit.

Hadirin yang saya hormati,

Bagi sektor pertanian, perkebunan khususnya karet dan kelapa sawit mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam pendapatan devisa Negara. Dari total ekspor komoditas primer perkebunan tahun 2004 sebesar US \$ 8 milyar, sekitar US \$ 5,6 milyar berasal dari 2 komoditas tersebut yaitu US \$ 3,4 milyar dari kelapa sawit dan US \$ 2,2 milyar dari karet. Pengembangan 2 komoditas ini juga melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak di sektor onfarm, yaitu 2,7 Alta TK di kelapa sawit dan 1,7 Alta TK di karet. Dengan peran penting 2 komoditas ini, maka komoditas karet dan kelapa sawit ke depan menjadi komoditas unggulan yang diprioritaskan pengembangannya.



Saat ini areal kelapa sawit di Indonesia mencapai 5,6 juta ha, dimana 1,9 juta ha merupakan perkebunan rakyat. Sedangkan karet mencapai 3,3 juta ha, dimana 2,8 juta ha merupakan perkebunan rakyat.

Dari areal yang dikembangkan tersebut, produksi kelapa sawit mencapai 12,5 juta ton dan karet 2,3 juta ton. Dengan tingkat produksi demikian, Indonesia saat ini merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia, dan terbesar kedua untuk karet setelah Thailand. Ke depan, Indonesia sangat berpeluang menjadi produsen utama karet alam dan kelapa sawit dunia. Hal ini sangat mungkin karena faktor ketersediaan lahan dan potensi produktivitas yang masih bisa kita tingkatkan.

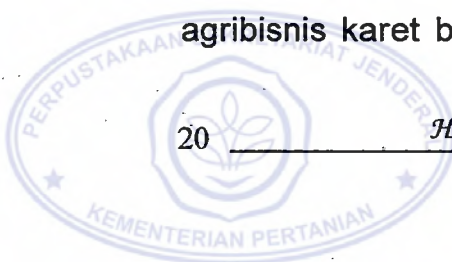
Prospek karet dan kelapa sawit ke depan sangat cerah dengan tingginya harga minyak bumi dan meningkatnya perekonomian dunia. Khususnya China telah mendorong permintaan karet alam baik untuk ban maupun produk asal karet lainnya. Sementara itu permintaan yang tinggi, untuk minyak goreng dan oleo-kimia, serta kebutuhan diesel telah mendorong meningkatnya permintaan minyak sawit.



Meskipun kinerja karet dan kelapa sawit sangat baik. saya menyadari masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh kedua komoditas ini. Permasalahan yang menurut saya perlu segera kita tangani dan merupakan pekerjaan rumah kita bersama adalah bagaimana kita dapat memperbaiki pertanaman karet dan kelapa sawit sehingga dapat memberikan tingkat produktivitas yang optimal. Dari data yang ada, saat ini sekitar 500 ribu ha tanaman karet rakyat perlu segera diremajakan, sedangkan untuk kelapa sawit sekitar 300 ribu ha secara bertahap juga memerlukan peremajaan. Di samping itu, pemakaian benih unggul untuk karet, masih sangat rendah, yaitu baru sekitar 30%. Sedangkan di Thailand, perkebunan karet rakyat sudah 90% menggunakan bahan tanam unggul.

Hadirin yang saya hormati,

Saya sangat menyambut baik upaya Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Muara Enim untuk meremajakan pertanaman karet melalui pola peremajaan partisipatif. Dan laporan yang disampaikan kepada kami, pola ini telah melibatkan seluruh pelaku agribisnis karet baik petani, petugas lapangan, peneliti



pemerintah daerah, dan Bank Pembangunan Daerah Saya berpendapat pola ini perlu terus dilanjutkan dan dikembangkan, apalagi petani mendapatkan subsidi bunga sehingga petani mendapatkan pinjaman dana dari perbankan dengan suku bunga yang jauh lebih rendah dari bunga komersial.

Saya menyadari bahwa upaya peremajaan tanaman khususnya karet dan kelapa sawit merupakan salah satu prioritas pembangunan pertanian. Namun demikian, membangun pertanian ataupun perkebunan tentunya tidak mungkin dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah saja khususnya Departemen Pertanian. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh *stakeholder* yang terkait dengan pengembangan kelapa sawit dan karet, baik petani, pengusaha, Pemda, Perguruan Tinggi, peneliti, perbankan, DPR/DPRD serta Pemerintah Pusat, untuk bersama-sama mengupayakan peremajaan karet dan kelapa sawit, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Tanpa *adanya* keterpaduan diantara kita, tentunya tidak akan menghasilkan keluaran seperti yang kita harapkan.



Hadirin yang saya hormati,

Dalam upaya pengembangan perkebunan kedepan. saat ini Departemen Pertanian sedang menyiapkan dana Penjaminan Pertanian yang saat ini masih dalam pematangan pembahasan dengan DPR. Saya harapkan sebagian dari dana Penjaminan dapat dialokasikan untuk peremajaan tanaman perkebunan, khususnya karet dan kelapa sawit. Untuk itu, saya minta kepada Direktorat Jenderal Perkebunan untuk segera dapat menginventarisir lokasi-lokasi mana yang perlu segera diremajakan.

Dalam upaya membangun perkebunan kita sudah mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tentang Perkebunan. Salah satu isi dari Undang-Undang tersebut adalah dimungkinkannya pengumpulan dana dari komoditi untuk pengembangan komoditi perkebunan. Kalau upaya ini dapat diwujudkan, tentunya akan menjadi langkah yang besar dalam penyediaan dana untuk pengembangan perkebunan. Pengalaman negara tetangga yaitu Thailand dan Malaysia dengan penerapan CESS untuk komoditi perkebunan merupakan salah satu acuan yang sangat baik. Untuk itu, saya minta kepada Saudara Dirjen Perkebunan bersama-sama



dengan Pusat Pembiayaan untuk segera mengkaji, mengkoordinasikan dan memfasilitasi untuk kemungkinan segera dapat diwujudkannya pengumpulan dana tersebut.

Hadirin yang saya hormati,

Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemerintah Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim, seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan subsektor perkebunan. Kepada para petani saya ucapkan selamat dan tetap merawat kebun dengan baik yang merupakan aset dan sumber penghidupan kita bersama.

Semoga Allah SWT senantiasa mendhoi setiap usaha kita Amien

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN RI
PADA ACARA PANEN PADI
DI KABUPATEN MUARA ENIM,
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Tanggal, 9 April 2006

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati,

- Saudara Gubernur Sumatera Selatan
- Saudara Bupati, Ketua DPRD dan Muspida Kabupaten Muara Enim.
- Para Pejabat Eselon I dan II, baik dari Pusat maupun Daerah
- Bapak/Ibu para tokoh masyarakat, alim ulama, pengurus KTNA, penyuluh pertanian, para petani, stake holder serta para hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, sehingga kita



dapat berkumpul di tempat ini, untuk bersama-sama menghadiri acara “Panen Padi”. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya agar kita mampu membangun sektor pertanian untuk terus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Seperti kita ketahui bersama sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional. Pertanian adalah penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan bangsa, instrumen pengentas kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan penghasil devisa serta sumber pendapatan masyarakat.

Ketahanan pangan pada tatanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dan juga halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik.



Menyadari pentingnya kita mencapai kemandirian pangan, seperti yang telah diamanatkan oleh Bapak Presiden RI saat pencaanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kelautan (RPPK) bulan Juni 2005 yang lalu, pemerintah bertekad untuk mewujudkan kemandirian pangan atas komoditas pangan utama yaitu padi, jagung, kedele, gula dan daging sapi.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Kita patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa produksi padi tahun 2005 mencapai lebih dari 54 juta ton GKG atau setara 30,61 juta ton beras, suatu pencapaian yang cukup menggembirakan. Dengan produksi ini sebenarnya kita sudah dapat memenuhi kebutuhan beras dalam negeri dengan surplus produksi beras sebesar 16.224 ton beras. Sedangkan produksi padi tahun 2006 berdasarkan ARAM I BPS mencapai 54,25 juta ton GKG. Walaupun produksi ini masih di bawah sasaran, saya berharap dengan kerja keras kita semua, produksi padi tahun 2006 dapat mencapai sasaran yang diharapkan yaitu 54,86 juta ton GKG, sehingga swasembada pangan khususnya beras dapat kita pertahankan.



Dalam upaya meningkatkan produksi padi, kita memang masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain, terjadinya stagnasi produktivitas akibat penerapan teknologi yang belum optimal, lahan kurang produktif dan kerusakan lingkungan. Di propinsi Sumatera Selatan yang memiliki lahan rawa/lebak yang cukup luas diharapkan dapat ditingkatkan produktivitas dan produksinya sehingga dapat memberikan sumbangan yang cukup besar dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Untuk memacu produksi khususnya pada musim tanam 2006 akan diupayakan baik melalui perluasan areal panen maupun peningkatan produktivitas. Untuk peningkatan produktivitas akan dilaksanakan pada areal 500.000 Ha dengan upaya penggantian varietas produksi tinggi, penerapan teknologi pemupukan berimbang dan pengembangan teknologi spesifik lokasi dengan cara pengelolaan tanaman terpadu, serta pengamanan pertanaman dan panen dari serangan organisme pengganggu tanaman.



Khusus kaitannya dengan penggunaan pupuk kimia di beberapa daerah terdapat kecenderungan penggunaannya berlebihan. Untuk itu dalam rangka efisiensi penggunaan pupuk, pemerintah telah mengeluarkan rekomendasi pemupukan N, P dan K setiap kecamatan di propinsi-propinsi penghasil utama padi. Disamping itu berbagai peralatan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pemupukan seperti Bagan Warna Daun (BWD) dan Soil Test Kit telah disediakan sehingga perlu dioptimalkan penggunaannya dan terus disosialisasikan kepada para petani.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Untuk membantu dan mengurangi beban biaya produksi para petani, pemerintah telah memberikan subsidi baik untuk pupuk, benih dan bunga Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan dana penjaminan yang jumlahnya cukup besar Rp. 500 milyar, serta menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) baik untuk gabah maupun beras melalui Inpres No. 13 tahun 2005. Dalam merencanakan kebutuhan riil pupuk bersubsidi, serta mencegah terjadinya perembesan ke sektor lain, maka kelompok tani di harapkan mengajukan kebutuhan pupuknya berdasarkan pada Rencana Defenitif kebutuhan Kelompok (RDKK).



Sejalan dengan itu pemerintah melalui program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian berupaya meningkatkan jumlah dan peranan penyuluhan serta sekaligus lebih memberdayakan kelompok tani.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Pada bulan April ini adalah periode panen raya karena akan dipanen lebih kurang 1,56 juta ha, dengan perkiraan produksi 7,11 juta ton GKG. Pada saat inilah peranan pemerintah akan sangat diharapkan dikarenakan terjadinya kelebihan produksi padi terutama di sentra produksi.

Dalam rangka mengantisipasi anjloknya harga gabah saat panen raya tersebut, diharapkan Perum Bulog, Pemerintah daerah dan LUEP mulai melakukan pembelian gabah/beras dari petani agar harga gabah/beras tidak jatuh sampai dibawah HPP sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi para petani. Perum Bulog agar lebih mengoptimalkan perannya membeli gabah pada saat panen raya untuk sekaligus mempersiapkan cadangan pangan nasional. Dalam kaitan itu pula, saya mengharapkan kiranya KTNA propinsi dan kabupaten agar senantiasa ikut berperan aktif



dengan melakukan pemantauan dalam mengamankan harga gabah dalam periode panen raya seperti saat ini.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Pemerintah akan tetap membantu petani dalam mengantisipasi terhadap rendahnya kualitas gabah petani akibat curah hujan yang tinggi dan banjir, serta upaya menekan kehilangan hasil panen padi (losses) yang saat ini masih sangat besar yaitu sekitar 20,5%. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan pasca panen antara lain mengoptimalkan penggunaan alsin pasca panen (seperti perontok, pengering, RMU, LDM, dan Terpalisasi), serta memfasilitasi pengadaan alsin panen seperti sabit bergerigi, terpal plastik, alat perontok dan pengering.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Saya akhiri sambutan saya dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim serta seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar



terhadap produksi padi nasional. Saya ucapkan selamat kepada para petani yang sedang melakukan panen semoga hasil panennya menjadi berkah dan rahmat bagi kita sekalian. Amin

Semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha kita semua.
Billahitaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA
LOKAKARYA STATUS TEKNOLOGI BUDIDAYA
JARAK PAGAR

JAKARTA, 11 April 2006

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati :

Para pejabat pusat dan daerah,

Para anggota DPR dan DPRD,

Para Pimpinan LSM, perusahaan swasta,

Para peneliti dan akademisi,

serta para undangan lainnya,

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti Lokakarya "Status Teknologi Budidaya Jarak Pagar", yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Pertanian.

Acara ini saya pandang sangat penting, di tengah



kondisi bangsa yang sedang menghadapi berbagai persoalan, termasuk masalah energi nasional.

Di antara masalah yang dihadapi tersebut antara lain adanya kecenderungan konsumsi energi fosil yang semakin besar, energi mix yang masih timpang, dan harga minyak dunia yang tidak menentu. Selain itu, penggunaan energi nasional kita masih sangat boros.

Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya perbandingan antara tingkat pertumbuhan konsumsi energi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional atau biasa disebut elastisitas energi. Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat yang hanya 0,10 dan 0,26, elastisitas energi nasional Indonesia masih mencapai tingkat elastisitas energi yang tinggi, yaitu sekitar 1,84. Penggunaan energi asal minyak bumi masih sekitar 54,4 %, gas bumi 26,5 %, batubara 14,1 %, tenaga air 3,4 %, panas bumi 1,4 %, sedangkan penggunaan energi lainnya termasuk biofuel hanya sekitar 0,2 %. Ketimpangan energi mix ini mengakibatkan beban nasional dalam penyediaan bahan bakar kita semakin berat, sehingga memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.



Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diharapkan dapat mendorong adanya perubahan paradigma dari pengelolaan energi berbasis energi fosil menuju pengelolaan yang berbasis energi baru atau terbarukan. Selain itu pemerintah juga mendorong diversifikasi pemanfaatan energi, menetapkan harga energi menurut keekonomiannya, serta mendorong investasi swasta di bidang pengelolaan energi.

Berkenaan dengan pengelolaan energi ini, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan energi nasional melalui terbitnya Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang antara lain menetapkan sasaran penggunaan bahan bakar nabati menjadi lebih dari 5 % terhadap konsumsi energi nasional pada tahun 2025. Sasaran Kebijakan Energi Nasional ini akan dicapai melalui kebijakan utama dan kebijakan pendukungnya.

Kebijakan utama dalam Perpres tersebut yaitu (1) Penyediaan energi melalui penjaminan ketersediaan pasokan dalam negeri, optimalisasi produksi dan pelaksanaan konservasi energi, (2) Pemanfaatan energi melalui efisiensi dan diversifikasi, (3) Penetapan kebijakan harga berdasarkan harga keekonomiannya, dan (4) Pelestarian lingkungan.



Kebijakan pendukungnya adalah melalui pengembangan infrastruktur energi, kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, pemberdayaan masyarakat, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan latihannya.

Saudara-saudara sekalian,

Untuk percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati atau biofuel, kebijakan tersebut diikuti dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 2006, yang antara lain menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk mendorong penyediaan tanaman termasuk fasilitasi penyediaan benih dan bibitnya, penyuluhan, dan mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan pasca panen bahan tanaman, untuk mendukung penyediaan bahan bakar nabati. Hal ini juga sejalan dengan Mekanisme Pembangunan yang Bersih dalam rangka Protokol Kyoto.

Untuk melaksanakan Inpres No. 1 tahun 2006, Departemen Pertanian telah memiliki program aksi dan terus akan mengembangkan bahan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar nabati, yang meliputi jarak pagar, ubikayu, sorgum, sagu, kelapa, kelapa sawit dan



bahan tanaman lainnya, tanpa mengganggu program pemantapan ketahanan pangan nasional. Program ini juga sesuai dengan visi kita ke depan dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani, serta sejalan pula dengan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang telah dicanangkan pemerintah pada tahun 2005 yang lalu.

Saudara-saudara sekalian,

Arah kebijakan pengembangan tanaman penghasil bahan bakar nabati tersebut adalah tersedianya energi alternatif asal biofuel, yang dilakukan oleh masyarakat maupun petani secara berkelanjutan, dilakukan secara terdesentralisasi dan terintegrasi antara kegiatan on farm dan off farm, melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien dan didukung oleh kemampuan iptek yang memadai.

Oleh karena itu, penyediaan bahan baku dan pengembangan tanaman dilakukan pada wilayah yang secara teknis sesuai untuk pengembangan penghasil bahan bakar nabati. Hal ini dilakukan agar tercapai produktivitas tanaman yang optimal dan pewilayahan komoditas yang



dapat memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani maupun kelompok tani. Pengembangan jarak pagar hendaknya tidak memanfaatkan lahan yang sudah ada pertanaman produktifnya, tetapi pada lahan yang diterlantarkan atau bukaan baru. Pada sisi pengembangan usahanya, bisa saja pertanaman jarak pagar dikembangkan secara monokultur maupun melalui diversifikasi usahatani.

Pokok pangkal pengembangan setiap usaha tanaman adalah tersedianya bibit unggul. Karena itu penyediaan bahan tanaman unggul yang teruji, dan didukung oleh rakitan teknologi dan taraf adaptabilitasnya yang tinggi menjadi prioritas utama dalam implementasi tugas Departemen Pertanian yang diamanatkan dalam Inpres No.1 tahun 2006. Untuk itu, sudah sangat jelas perlunya penelitian dan pengembangan yang terencana, terarah, tetapi dengan penetapan target waktu yang relatif cepat. Hal ini hendaknya terus dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian, baik sendiri maupun bekerja sama dengan institusi riset lainnya, di dalam maupun di luar negeri.

Untuk pengelolaan pasca panen dan pengolahan basil,



saya harapkan dikembangkan teknologi yang meliputi cara-cara yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi petani. Oleh karena itu, pengolahan sampai menghasilkan bahan baku diarahkan agar sesuai untuk dikembangkan di tingkat petani atau kelompok tani, sedangkan pengolahan sampai menghasilkan biodiesel dapat dilakukan oleh investor yang bekerja sama dengan kelompok tani.

Sehubungan dengan lokakarya ini, kita semua harus menyadari bahwa teknologi budidaya, khususnya untuk jarak pagar memang belum sepenuhnya dikuasai. Tanaman jarak pagar merupakan salah satu tanaman primitif, yaitu belum banyak disentuh oleh para ahli pemuliaan Indonesia. Sementara itu, sebagian masyarakat mempunyai antusiasme yang tinggi untuk mulai membudidayakan jarak pagar dengan berbagai motivasinya.

Dilaporkan juga bahwa di masyarakat berkembang pendapat mengenai budidaya tanaman jarak pagar dapat dikembangkan tanpa perlu didasarkan hasil pengkajian kesesuaiannya terhadap kondisi ekosistem setempat. Hal ini tentu dapat menyesatkan masyarakat.



Saya sangat menghargai antusiasme masyarakat tersebut. Namun demikian, pengembangan tanaman jarak pagar yang merupakan tanaman tahunan ini tentu juga merupakan investasi jangka panjang yang harus diperhitungkan secara cermat, agar di kemudian hari investasinya dapat kembali, dan bahkan mampu memberikan keuntungan yang optimal. Sesuai dengan Inpres No. 1 tahun 2006, Departemen Pertanian sangat berkepentingan untuk menjawabnya, sekaligus memberikan informasi teknologi budidaya yang tepat, agar masyarakat dapat mengembangkan jarak pagar sesuai dengan kaidah-kaidah budidaya yang benar.

Saudara-saudara sekalian,

Saya mendapat laporan, bahwa saat ini Badan Litbang Pertanian sedang menyiapkan bibit unggul harapan komposit jarak pagar Indonesia pada akhir tahun 2006 ini dan disempurnakan sampai tahun 2007, sekaligus memetakan daerah-daerah yang sesuai bagi pengembangan jarak pagar. Belum adanya bahan tanaman unggul jarak pagar di Indonesia telah mendorong Departemen Pertanian untuk



melakukan eksplorasi materi genetik jarak pagar dari seluruh Indonesia, yang hasilnya saat ini digunakan untuk menghasilkan bibit unggul baru.

Departemen Pertanian juga telah mengembangkan teknologi perbanyakan tanaman jarak pagar melalui teknik kultur jaringan, teknik ekstraksi dan pemurnian minyak jarak pagar, dan pengembangan mesin pengolahannya. Saya minta teknologinya juga terus disempurnakan sekaligus dimasyarakatkan, yang pada gilirannya nanti, masyarakat dapat memanfaatkan dan mengembangkannya melalui kaidah-kaidah budidaya dan usaha yang benar.

Untuk melayani antusiasme masyarakat, penyuluhan dan pelatihan juga harus menjadi perhatian kita bersama. Penyebarluasan informasi hasil penelitian harus segera dilakukan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Bahkan jika memungkinkan, kebun-kebun percobaan yang saat ini digunakan untuk pengembangan bibit unggul jarak pagar seperti di Pakuwon, Sukabumi, Asem Bagus, Situbondo; dan Muktihardjo, Pati, dapat dijadikan sarana penyebaran informasi kepada masyarakat, sekaligus tempat agro-wisata ilmiah.



Beberapa hari yang lalu saya telah mengunjungi kebun percobaan di Pakuwon Sukabumi, tempat dimana bibit unggul komposit harapan Indonesia sedang dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian. Bibit unggul baru yang dihasilkan tersebut saya harapkan dapat segera dimanfaatkan untuk masyarakat, termasuk untuk bahan pengembangan kebun-kebun bibit sumber, paling tidak di propinsi-propinsi yang potensial untuk pengembangan jarak pagar, tentu saja termasuk demplotnya pada tahun 2006 ini juga. Untuk itu, saya mendapat laporan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan telah merencanakan hal ini dalam program aksinya. Dengan demikian, masyarakat di daerah dapat segera mengikuti dan sekaligus memanfaatkan teknologi baru tersebut. Hal ini sekaligus menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat luas.

Dilaporkan juga bahwa banyak Pemerintah Daerah yang ingin segera mengembangkan tanaman jarak pagar ini. Kepada saudara-saudara di daerah, saya mengharapkan, unit kerja Departemen Pertanian di daerah seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP hendaknya dapat



dimanfaatkan sebagai pendamping sekaligus nara sumber dalam memanfaatkan teknologi baru budidaya dan bibit unggul harapan jarak pagar ini. BPTP dibentuk memang untuk membantu daerah dalam menerapkan teknologi pertanian spesifik lokasi, oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk memanfaatkannya.

Saya sangat mengharapkan lokakarya ini juga dapat memberikan gambaran status teknologi budidaya jarak pagar yang benar tersebut. Kajian komprehensif termasuk sosial ekonomi dan kelembagaannya hendaknya juga dapat terus dilakukan, agar pada saatnya nanti masyarakat dapat mengembangkan jarak pagar sebagai bahan bakar nabati ini yang secara finansial dan ekonomi menguntungkan.

Dengan kesungguhan seperti itu, saya yakin program kita dapat berhasil. Semoga Allah S.W.T. dapat memudahkan upaya-upaya kita ini.

Demikian sambutan dan harapan saya, dan dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaannirrohiim, Lokakarya Status Teknologi Budidaya Jarak Pagar secara resmi dibuka.



Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh.

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc

**PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA
PELUNCURAN BUKU “ HIDUP SEHAT MELALUI GIZI
SEIMBANG DALAM SIKLUS KEHIDUPAN MANUSIA”**

JAKARTA, TANGGAL 13 APRIL 2006

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati,

Para Senior Ahli Gizi, penulis buku “Hidup Sehat dengan Gizi Seimbang dalam Siklus Kehidupan Manusia”;

Pimpinan Yayasan Kuliner Indonesia;

Para Istri Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Direktur Representatif UNICEF Indonesia;

Para Pejabat Eselon I dan II dari Instansi terkait;

Pimpinan Ranch Market Jakarta;

Para hadirin dan undangan yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga



kita semua dapat bersama-sama berkumpul dalam acara Peluncuran/Launching Buku "Hidup Sehat Melalui Gizi Seimbang dalam Siklus Kehidupan Manusia" pada pagi hari ini.

Hadirin yang saya hormati,

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan sekaligus kehormatan bagi saya dapat hadir sekaligus meresmikan peluncuran buku Hidup Sehat melalui Gizi Seimbang, yang telah berhasil ditulis oleh para ahli gizi senior, yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan yang sehat, aktif dan produktif setiap hari.

Saya juga menghargai prakarsa Yayasan Kuliner Jakarta bersama Ranch Market sebagai swasta yang peduli terhadap kesehatan dan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia yang telah mensponsori dan menerbitkan buku yang dapat memberikan informasi tentang hidup sehat dengan gizi seimbang, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk memiliki gaya hidup sehat melalui pola makan yang beragam, bergizi seimbang serta aman.



Kita ketahui bersama, bahwa untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif, setiap orang tiap hari dianjurkan mengkonsumsi anekaragam bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya, baik pangan sumber karbohidrat, protein serta vitamin dan mineral secara seimbang.

Melalui buku ini diharapkan nantinya masyarakat akan mampu merubah perilaku kebiasaan konsumsi pangannya kearah yang lebih sehat, beragam dan bergizi seimbang serta aman dengan memanfaatkan sumber pangan lokal yang ada di sekitar kita. Disamping itu khususnya ibu rumah tangga dapat memanfaatkan buku ini sebagai acuan guna mendorong kreativitasnya untuk memilih dan menyajikan aneka menu makanan yang sehat dan seimbang sehari-hari sesuai dengan selera anggota keluarga dan daya belinya.

Hadirin yang saya hormati,

Makanan disamping sebagai kebutuhan yang mendasar bagi kelangsungan hidup manusia, juga berfungsi sebagai faktor penentu dalam peningkatan kualitas kesehatan manusia. Jika makanan dan pola makan tidak



mendapatkan perhatian secara serius, niscaya akan terbawa oleh perubahan budaya akibat arus globalisasi yang belum tentu baik untuk kesehatan. Kita telah menyaksikan kecenderungan perubahan kebiasaan dan pola makan serta jenis makanan yang dikonsumsi masyarakat di era globalisasi, yang mengarah pada aneka jenis makanan “*fast food*” yang banyak mengandung lemak, garam, gula serta bahan-bahan lainnya yang dapat merugikan kesehatan.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang perlu dimulai sejak dini dan pada setiap siklus kehidupan manusia. Hal tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama dalam mempersiapkan manusia Indonesia yang sehat sebagai generasi penerus bangsa.

Bila hal tersebut tidak kita antisipasi, maka pola makan yang kurang tepat akan menghasilkan generasi muda yang tidak sehat dan rentan terhadap penyakit-penyakit degeneratif. Apabila berlanjut dan meluas akan berakibat kepada penurunan kualitas sumberdaya manusia.



Hadirin Sekalian,

Saya juga menghargai pelaksanaan pameran dan festival pangan lokal, yang dilaksanakan bersamaan dengan acara Launching ini oleh Eselon I Departemen Pertanian, melalui pameran dan festival tersebut diharapkan kedepan dapat memberikan tambahan informasi tentang produksi lokal'yang sehat dan beraneka ragam guna mendukung upaya penganekaragaman pangan.

Dengan terlaksananya peluncuran buku Hidup Sehat melalui Gizi Seimbang dalam Siklus Kehidupan Manusia serta festival pangan lokal ini, besar harapan saya dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat luas untuk melakukan kehidupan yang sehat, aktif dan produktif dengan mengkonsumsi makanan yang beragam dengan gizi seimbang.

Saya juga mengucapkan penghargaan kepada fihak Ranch Market yang telah mensponsori pencetakan buku ini, disamping itu Ranch Market akan menyerahkan dana sebesar Rp. 10.000,- untuk setiap buku yang terjual kepada UNICEF, dan akan digunakan untuk membantu program perbaikan gizi anak di Indonesia.



Akhirnya, kepada para penulis yang terdiri dari para ahli gizi senior, pemrakarsa Yayasan Kuliner Jakarta dan penyelenggara saya sampaikan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan sehingga peluncuran buku ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

Sekian Terimakasih

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



CERAMAH
MENTERI PERTANIAN
Pada
MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV
FORUM ZAKAT

Jakarta, 13 April 2006

Assalaamu'alaikum Warakhmatulaahi Wabarakaatuh,

Yang saya hormati:

- **Saudara Panitia Munas IV Forum Zakat,**
- **Para Peserta Musyawarah,**
- **Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada acara Munas IV Forum Zakat.

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Munas



atas undangan untuk memberikan ceramah tentang ***"Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani"***.

Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati,

Pembangunan pertanian dihadapkan pada permasalahan meningkatnya permintaan produk pertanian sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkembangnya pusat kota-industri-wisata. Kapasitas sumberdaya pertanian terutama lahan dan air terbatas dan mengalami degradasi. Luas baku lahan pertanian semakin menurun karena pembukaan lahan pertanian baru sangat lambat sementara konversi lahan pertanian semakin tidak terkendali. Ketersediaan air untuk pertanian semakin fluktuatif dengan kualitas yang menurun akibat kerusakan alam dan persaingan antar sektor ekonomi.

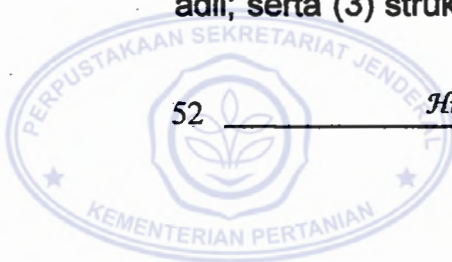
Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih lemah karena lambatnya desiminasi teknologi baru (*invention*) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (*innovation*) hingga ke tingkat petani. Otonomi daerah telah membawa



perubahan yang serius terhadap sistem alih teknologi pertanian. Hal ini tercermin dari merosotnya jumlah penyuluh, di mana pada masa sebelum desentralisasi berjumlah 36.626 orang menurun menjadi 19.636 orang pada akhir tahun 2003. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kelancaran arus penyampaian teknologi karena melemahnya intensitas interaksi antara peneliti, penyuluh, dan petani.

Akses petani terhadap modal sangat penting dalam meningkatkan kinerja usahatani. Penyebaran aplikasi teknologi anjuran sangat tergantung terhadap penyediaan modal. Ketidakmampuan masyarakat pertanian di pedesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh ketersediaan lembaga keuangan formal terbatas, prosedur dan persyaratan dinilai sangat sulit, tingkat suku bunga yang tinggi, serta kurang sesuainya sistem lembaga keuangan formal dengan sifat kegiatan usaha pertanian yang musiman.

Sistem pemasaran hasil pertanian belum efisien disebabkan oleh: (1) rantai tataniaga yang panjang; (2) timbulnya margin ganda dan pembagian margin yang tidak adil; serta (3) struktur pasar yang timpang, di mana petani



menghadapi struktur pasar oligopolistik pada pasar input dan oligopsonistik pada pasar output.

Dengan berbagai permasalahan tersebut kondisi petani kita masih memprihatinkan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan tahun 2004 sekitar 20 juta dan 55 persen diantaranya bergantung pada pertanian. Pendapatan petani kita berkisar antara Rp.2,3 - 2,6 juta/kapita/tahun dan masih di bawah garis kemiskinan.

Di tingkat mikro, kemiskinan pada rumahtangga pertanian terutama dipengaruhi oleh relatif kecilnya skala usaha. Penguasaan lahan yang relatif sempit (<0.5 ha) menjadi kendala rumahtangga untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Selain itu, upaya mencari pendapatan tambahan dari kegiatan lain masih terbatas karena pada umumnya ketersediaan lapangan kerja non pertanian di pedesaan relatif jarang. Oleh sebab itu, dalam upaya penanggulangan kemiskinan nasional prioritas pembangunan ke depan selayaknya diberikan pada sektor pertanian dan dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan kawasan pedesaan.



Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati,

Agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang terkait dengan pembangunan pertanian, antara lain : (1) revitalisasi pertanian; (2) peningkatan investasi dan ekspor non-migas; (3) pemantapan stabilisasi ekonomi makro; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) pembangunan pedesaan; dan (6) perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Revitalisasi Pertanian antara lain diarahkan untuk meningkatkan: (1) kemampuan produksi lima pangan utama (padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi) dalam negeri sehingga mencapai swasembada berkelanjutan; (2) diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; (3) ketersediaan pangan asal ternak; (4) nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan (5) produksi dan ekspor komoditas pertanian.

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati,

Tujuan pembangunan pertanian jangka menengah, 2005-2009 adalah: (1) membangun SDM aparatur



profesional, petani mandiri dan kelembagaan pertanian yang kokoh; (2) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan; (3) memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; (4) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; (5) menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan; dan (6) membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani. Sementara itu, sasaran utama pembangunan pertanian yang ingin dicapai adalah: (1) meningkatnya ketahanan pangan nasional yang meliputi meningkatnya kapasitas produksi komoditas pertanian dan berkurangnya ketergantungan terhadap pangan impor; (2) meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian yang meliputi mutu produk primer pertanian, meningkatnya keragaman pengolahan produk pertanian dan meningkatnya ekspor serta surplus perdagangan komoditas pertanian; dan (3) meningkatnya kesejahteraan petani yang meliputi meningkatnya produktivitas tenaga kerja disektor pertanian dan menurunnya insiden kemiskinan.

Strategi umum untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tersebut adalah : (1) melaksanakan



manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN; (2) meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian; (3) memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan; (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM pertanian; (5) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian; (6) meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna ; dan (7) mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian.

Beberapa kebijakan strategis terkait dengan instansi lain yang perlu penanganan segera yaitu : (1) kebijakan ekonomi makro yang kondusif; (2) pembangunan infrastruktur pertanian; (3) kebijakan pembiayaan yang mudah di akses masyarakat; (4) kebijakan perdagangan yang mendorong kelancaran distribusi dan pemasaran hasil pertanian; (5) kebijakan pengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala kecil diperdesaan; (6) kebijakan investasi yang kondusif; (7) pembiayaan pembangunan yang lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian dan sektor pendukungnya; dan (8) dukungan pemerintah daerah pada pembangunan pertanian.



Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati,

Operasionalisasi Revitalisasi Pertanian dituangkan kedalam tiga program utama pembangunan pertanian jangka menengah 2005-2009 yaitu : (1) Program peningkatan ketahanan pangan; (2) Program pengembangan agribisnis; dan (3) Program peningkatan kesejahteraan petani.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan diarahkan untuk fasilitasi peningkatan ketahanan masyarakat melalui : (1) peningkatan keanekaragaman produk pertanian, ketersediaan dan konsumsi pangan serta produk olahannya, (2) pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif, (3) pengembangan budaya produksi dan konsumsi pangan lokal, dan (4) pengembangan kelembagaan pangan secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan Program Pengembangan Agribisnis diarahkan untuk fasilitasi berkembangnya usaha-usaha agribisnis pada sub sistem hulu, sub sistem on farm/budidaya, subsistem pengolahan, sub sistem pemasaran hasil, dan subsistem penunjangnya. Kedua program diatas, secara langsung atau tidak langsung diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.



Disamping kedua program tersebut, secara khusus dirancang suatu program Peningkatan Kesejahteraan Petani yang diarahkan untuk fasilitasi : (1) pemberdayaan masyarakat petani, (2) percepatan akses petani terhadap sumberdaya produktif, dan (3) perlindungan petani dan kegiatan usahanya. Operasionalisasi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dilaksanakan melalui : (1) pemberdayaan penyuluhan, (2) pendampingan dan pembimbingan, (3) penjaminan usaha, (4) perlindungan harga, (5) kebijakan proteksi dan promosi lainnya, serta (6) kebijakan tata niaga produk pertanian yang kondusif.

Secara spesifik rencana tindak dalam program peningkatan kesejahteraan petani antara lain: (1) Penguatan kelembagaan penyuluhan dan pertanian lain di pedesaan; (2) Pengembangan diversifikasi usaha rumah tangga berbasis pertanian, (3) Advokasi penataan hak pemilikan, sertifikasi dan pencegahan konversi lahan, (4) Perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan dan pajak progresif lahan, (5) Pemberian insentif usaha dan promosi investasi, (6) Fasilitasi investasi dan kemitraan usaha, (7) peningkatan infrastruktur perdesaan, dan (8) Pengembangan model kelembagaan usahatani berbasis inovasi pertanian.



Selama ini peningkatan akses petani terhadap permodalan diupayakan melalui proyek: Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil (P4K), Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dana bergulir, Kredit Usaha Tani (KUT, yang diganti dengan Kredit Ketahanan Pangan, KKP). Lembaga keuangan yang telah turut berperan dalam penyediaan modal bagi masyarakat pertanian di pedesaan antara lain adalah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), lembaga keuangan mikro pedesaan, BPR, dan BRI Unit Desa. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah permodalan antara lain adalah : (1) pengembangan kerja sama bank syariah pertanian, melalui penyediaan dana APBN sebagai penjamin; (2) pengembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan; dan (3) pemberdayaan petani melalui pola BLM.

Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati,

Sejalan dengan diberlakukannya Otonomisasi Daerah, pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah menuntut adanya koordinasi antara program Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Selama ini telah dibangun mekanisme



perencanaan pembangunan pertanian yang berjenjang, dimana prioritas propinsi disusun berdasarkan Musyawarah Pembangunan Pertanian Daerah yang mengacu pada prioritas Kabupaten/Kota di wilayahnya. Pemerintah Pusat memfasilitasi pertemuan regional guna menyelaraskan prioritas lintas propinsi dan nasional. Di tingkat Pusat juga perlu ditingkatkan koordinasi di dalam dan antar departemen.

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan pembangunan pertanian yang wajib dilaksanakan. Pemerintah Pusat memfasilitasi rencana pembangunan pertanian daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional berdasarkan pertimbangan kesesuaian rencana daerah dengan: (1) tata ruang pengembangan ekonomi dan penggunaan sumberdaya alam, aspek lingkungan dan peningkatan kapasitas; (2) pencapaian daya saing nasional atas dasar keunggulan komparatif komoditas dan unggulan daerah; (3) pemberdayaan wilayah tertinggal, pengentasan kemiskinan dan pemerataan; dan (4) kebijakan nasional, ketahanan pangan, kebijakan perdagangan internasional, kebijakan makro, dan pembangunan prasarana dan sarana lingkup nasional.



Keberhasilan pelaksanaan berbagai program yang telah ditetapkan pemerintah di atas membutuhkan partisipasi dan kerja sama semua pihak. Terlebih bila fokus kita adalah pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Upaya penggalian dan pemanfaatan potensi sumberdaya yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan mereka selayaknya mendapat dukungan kuat, termasuk potensi pendistribusian kapital melalui zakat. Al Qur'an telah menetapkan bahwa implementasi zakat menunjukkan bahwa kita melaksanakan ketaatan dan ketundukan terhadap syariat Islam, mengingat zakat merupakan salah satu pilar agama Islam.

Aturan zakat juga mencakup hasil usaha pertanian, baik dari hasil ternak maupun usahatani tanaman. Oleh karena itu, dalam perspektif peningkatan kesejahteraan umat, keberhasilan sektor pertanian seharusnya juga dipandang sebagai potensi sumber penerimaan zakat sehingga peningkatan pembangunan pertanian, harus menjadi kebutuhan dan tanggung jawab semua pihak. Selanjutnya, pengelolaan (potensi) zakat membutuhkan mekanisme kerja yang sesuai kaidah dan dibenarkan syar'i dengan sikap amanah para pengelolanya dan keihlasan para wajib



zakatnya, maka inisiasi kegiatan seperti Musyawarah Nasional dari lembaga seperti Forum Zakat ini semestinya juga dipandang sebagai upaya konsolidasi sekaligus syiar untuk menyadarkan kepada umat Islam mengenai kewajiban menunaikan zakat.

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Atas perhatian Ketua Munas dan para peserta sekalian, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Warakhmatullaahi Wabarakhaatuh,

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI
PADA PEMBUKAAN MUSRENBANGTAN NASIONAL
2007**

AUDITORIUM DEPARTEMEN PERTANIAN

18 APRIL 2006

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Saudara-saudara
Pejabat Eselon I dan II Lingkup Departemen Pertanian,
Kepala Bappeda.

Kepala Dinas lingkup pertanian Propinsi.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi,
Kepala UPT Lingkup Departemen Pertanian,
dan hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SVVT, karena berkat nikmat dan karunia -Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di Auditorium Departemen Pertanian ini dalam rangka mengikuti acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (MUSRENBANGTAN) Nasional Tahun 2007.

Himpunan Sambutan Menteri Pertanian Tahun 2006



Sebagaimana Saudara telah fahami bahwa kegiatan ini sangat penting, karena di samping merupakan amanat PP No.20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PP No. 21 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementrian/Lembaga, proses perencanaan pembangunan tahunan merupakan langkah awal *yang* sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan pertanian kita.

Bahkan saya telah meminta agar MUSRENBANGTAN Nasional Tahun 2007 dilaksanakan di Kantor Pusat Departemen Pertanian ini dengan harapan semua peserta daerah dapat berkomunikasi, berkonsultasi dan berdiskusi langsung secara intensif dengan aparat Departemen Pertanian sesuai bidang tugasnya.

Dengan demikian peluang terjadinya sinergi dan keterpaduan perencanaan pembangunan pertanian antara daerah dan pusat menjadi sangat kuat. Saya minta agar Saudara-saudara memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin sehingga perencanaan anggaran yang kita susun menjadi lebih efisien, efektif dan benar-benar mampu mendukung upaya untuk mewujudkan keinginan masyarakat



di masing-masing daerah sebagaimana tertuang dalam Masterplan daerah.

Peserta MUSRENBANGTAN yang berbahagia,

Sudah seringkali kita menyatakan, bahwa pertanian merupakan sektor yang paling relevan dijadikan sebagai basis pengembangan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Pedesaan. Pertanian selayaknya dijadikan andalan sumber pertumbuhan ekonomi daerah, penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat Dengan berbagai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki Indonesia (tanah, iklim, budaya dan tenaga kerja). maka atribut sebagai negara agraris sesungguhnya bukanlah Hal yang harus dihindari, tetapi harus dapat dioptimalkan bagi kemajuan ekonomi bangsa.

Hingga saat ini fakta historis memperlihatkan, semaju apapun tingkat perkembangan negara yang ada di dunia ini tidak satupun dari mereka yang mengesampingkan anti penting pertanian bagi negaranya masing-masing. Bahkan sebaliknya mereka berusaha mempertahankan eksistensi dan



memproteksi pertanian mereka melalui berbagai cara, antara lain: subsidi, *dumping*, tarif dan *non tariff barrier*, *multi functionality of agriculture*, dll. Kesemua cara yang cenderung tidak adil (*Un-fair*) tersebut mereka tempuh karena sesungguhnya mereka tidak memiliki *comparative advantage* untuk mengembangkan pertanian. Alangkah naifnya kalau Indonesia yang *notabene* memiliki Keunggulan tersebut, justru tidak bersungguh-sungguh memanfaatkan potensi pertanian.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengubah *comparative advantage* tersebut menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Secara ekonomis bukan luasnya hamparan lahan subur dan iklim tropis yang bisa kita jual serta bukan pula kearifan budaya bertani dan kemurahan tenaga kerja yang akan diminta pasar, tetapi yang lebih penting adalah produk apa yang bisa dihasilkan dan berapa harganya agar pertanian kita memiliki daya saing tinggi. Pertanian yang ingin kita bangun adalah pertanian yang modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan pertanian konvensional yang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (*subsisten*). Pertanian kita menjadi kurang efisien antara lain karena untuk mengumpulkan hasil produksinya diperlukan korbanan lebih besar akibat lokasinya yang



terpencar dan dukungan infrastruktur yang minim.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan angka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Pertanian merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan nasional. khususnya dalam Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah melalui Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota merupakan tulang punggung utama fasilitator dan dinamisator pembangunan pertanian.

Namun secara faktual masih banyak pelaku lain yang turut menentukan sukses atau gagalnya pembangunan pertanian di Indonesia. Sebut saja para akademisi, peneliti, investor, perbankan, pabrikan, pedagang, dll. merupakan unsur yang juga dituntut peran aktifnya dalam mensukseskan pembangunan pertanian. Adalah kewajiban kita sebagai aparat pemerintah untuk mengkondisikan, mengajak dan melibatkan para aktor pembangunan pertanian lainnya tersebut dalam pembangunan pertanian. Kita harus sadar bahwa pembangunan pertanian merupakan pekerjaan maha



besar yang tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah secara sendirian. Baik secara fisik maupun anggaran. sumberdaya yang dimiliki Pemerintah sangat kecil dibandingkan dengan sumberdaya yang dibutuhkan untuk membangun pertanian. Hal ini tidak berarti Pemerintah lalu bisa lepas tanggung jawab atas belum berkembangnya pertanian di Indonesia. Tetapi yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa Pemerintah harus bisa mengupayakan strategi untuk menggerakkan seluruh potensi sumberdaya pembangunan pertanian agar mendukung proses pembangunan pertanian. Paradigma harus menjadi *mind set* kita bersama.

Sebagai unsur pemerintah, kita tidak mungkin melakukan semua aktivitas fisik secara langsung dalam rangka memenuhi target produksi pertanian, layaknya swasta membangun usaha perkebunan misalnya, tugas kita adalah menggunakan sumberdaya yang ada untuk mengkondisikan agar berbagai kegiatan usaha pertanian tersebut tumbuh. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi dan merancang kegiatan yang berpotensi untuk menjadi pemicu bergeraknya sumberdaya pertanian yang dimiliki masyarakat, swasta/investor dan koperasi.



Peserta MUSRENBANGTAN yang berbahagia,

Tanpa bermaksud mengurangi penghargaan atas upaya dan kerja keras kita selama ini, namun secara faktual harus kita akui bahwa sebagai konsekuensi dari semakin beratnya tantangan dan semakin besarnya harapan masyarakat terhadap pertanian maka apa yang telah kita hasilkan bebcrapa dekade terakhir ini belumlah memuaskan. Kegiatan bertani memang terus berlangsung, tetapi apa yang terjadi dengan pendapatan dan kesejahteraan petani. Produksi pertanian memang terus tumbuh, tetapi bagaimana dengan ketahanan pangan kita. Ekspor pertanian memang terus membesar, tetapi bagaimana dengan daya saing produk pertanian kita.

Penyerapan tenaga kerja memang terus meningkat. tetapi bagaimana dengan produktivitas tenaga kerja pertanian kita. Dengan demikian pertanyaan selanjutnya yang perlu kita renungkan bersama adalah apa makna kerja keras yang telah kita lakukan tahun demi tahun selama ini? Hal ini bukan berarti kita telah gagal membangun pertanian, tetapi kita sudah bekerja keras dan mencurahkan segala sumberdaya yang tersedia baru sekedar untuk mempertahankan (survive)



eksistensi pertanian dan menjadi “bumper” bagi tumbuh kembangnya sektor lain, tetapi belum sampai pada menjadikan pertanian itu sendiri sebagai sektor andalan bagi masyarakat petani.

Kenapa hal tersebut terjadi, antara lain penyebabnya adalah kita membangun pertanian masih secara parsial alias “tambal sulam” serta tidak adanya integrasi antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. Pembangunan pertanian kita tidak didasarkan atas *master plan* yang jelas serta tidak didukung dengan *road map* untuk mencapai tujuan. Hal ini tercermin dari DIPA yang telah tersusun tidak mempunyai pola yang jelas.

DIPA lebih banyak disusun untuk membiayai berbagai kegiatan instansi pertanian baik pusat maupun daerah sesuai dengan tupoksi yang sudah terbiasa dilakukan masing-masing unit instansi dari tahun ke tahun. Tanpa terfokus pada prioritas apa yang akan kita capai pada tiap tahun tersebut sesuai tahapan-tahapan (*road map*) guna mencapai pertanian di masing-masing Kabupaten/Kota/Propinsi. Kita belum memiliki visi bersama (*shared vision*) untuk menjadikan wilayah dan masyarakat di wilayah itu unggul



di bidang apa. Akibatnya wilayah pertanian kita belum tertata dengan sempurna.

Ada komoditas yang tersebar lokasinya sehingga sulit mengontrol mutu dan produktivitas serta biaya mengumpulkan hasil produksi menjadi mahal. Ada komoditas yang dikembangkan dalam satu hamparan tetapi keleniagaan ekonomi petani/peternaknya lemah sehingga sering diperdaya oleh pihak lain, seperti pemilik modal. Ada yang lemah dalam pengelolaan pasca panen, ada pula yang belum menggunakan bibit bermutu serta aplikasi teknologi yang rendah. Ada yang bermasalah dalam memperoleh jaminan harga, ada yang kesulitan pengairan, dan yang paling sering terjadi harga input yang dibeli lebih mahal dari yang seharusnya, karena bukan dibeli secara berkelompok. Kalaupun ada yang membeli secara berkelompok umumnya kelompok-kelompok tersebut relatif kecil, hingga belum memenuhi skala ekonomi apabila diteruskan *list* masalah ini akan bertambah panjang.

Pertanyaannya mengapa berbagai hal tersebut bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah kita tidak memiliki road map pembangunan pertanian di wilayah kita, dan tidak



memiliki organisasi usaha yang kokoh sehingga kontrol terhadap permasalahan yang dihadapi petani/peternak menjadi terabaikan. Ironis, ketika kita telah bekerja keras tetapi masyarakat tidak merasakan kehadiran pemerintah.

Akibat lain dari perencanaan anggaran yang tanpa patron (pola) adalah anggaran yang dibelanjakan tidak dapat terukur efisiensi dan efektivitasnya, karena tidak jelasnya indikator-indikator yang akan dicapai. Untuk memperbaiki berbagai kondisi ini harus dimulai dari penataan kembali mekanisme dan materi perencanaan pembangunan pertanian. Saya sangat memahami kesulitan yang akan kita hadapi dalam memperbaiki mekanisme perencanaan anggaran ini, namun hal itu mutlak harus kita lakukan.

Saya berharap besar akan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pertanian dalam MUSRENBANGTAN Tahun 2007 ini.

Hadirin peserta MUSRENBANGTAN yang saya hormati,

Kebutuhan investasi untuk pembangunan pertanian di Indonesia berkisar antara Rp 30 — 50 trilyun pertahun,



dimana sumber pembiayaannya diharapkan sekitar 7 % dari Pemerintah, 28 % dari petani/peternak, dan 65 %, dan swasta/investor serta koperasi. Kalau dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan investasi pembangunan pertanian tiap tahun, maka anggaran yang dimiliki pemerintah sangat kecil. Sebagai gambaran, pada tahun 2006 ini anggaran yang dialokasikan DPR untuk Departemen Pertanian sebesar Rp 6.3 trilyun ditambah dengan DAK sebesar Rp 1 trilyun. Apabila alokasi itu kita bagi rata untuk 33 Propinsi dan 349 Kabupaten dan 91 Kota maka masing-masing hanya mendapatkan Rp.15.4 M Itupun sebagian besar (bahkan mencapai 60%) untuk keperluan belanja pegawai serta belanja pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian bisa dicanangkan betapa kecilnya alokasi anggaran yang langsung untuk membangun fasilitas publik. Itupun harus dibagi lagi untuk beberapa Dinas lingkup pertanian di Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu anggaran yang kecil tersebut harus diupayakan sedapat mungkin untuk membiayai kegiatan-kegiatan investasi publik seperti infrastruktur, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan aspek regulasi.



Di sisi lain dengan anggaran pemerintah yang kecil tersebut kita dituntut untuk mendukung berbagai target produksi komoditas pertanian serta beberapa target sosial ekonomi lainnya seperti kontribusi terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan devisa, dll. Hal ini sama artinya dengan kita dituntut untuk mengelola dan mengefektifkan anggaran pembangunan yang jumlahnya kecil tersebut. Dengan demikian kita tidak bisa lagi menerapkan kebijakan “pemerataan” anggaran atau membiayai kegiatan-kegiatan dengan dasar alasan karena institusinya sudah terlanjur “berdiri” baik di pusat maupun daerah. Kita harus merubah mekanisme perencanaan agar sesuai dengan permasalahan yang ada, lebih terfokus dan menggunakan indikator-indikator yang bisa dievaluasi

Saudara sekalian yang berbahagia,

Berdasarkan berbagai kondisi yang saya uraikan tersebut, maka saya meminta agar dalam MUSRENBANGTAN Nasional Tahun 2007 ini, kita perlu melakukan *focussing* dan keterpaduan kegiatan, baik secara vertikal maupun horizontal dengan melibatkan dan mensinergikan anggaran dan seluruh Dinas yang terkait dengan pembangunan pertanian, seperti



bidang Kimpraswil, Koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pendidikan, perumahan, kesehatan, kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri dan sebagainya.

Tiap daerah harus bisa memilih dan menetapkan fokus komoditas yang akan dikembangkan di daerahnya. Apabila fokus komoditas tersebut ingin dikembangkan dengan menggunakan dana APBN, maka komoditas yang dipilih disamping sesuai dengan kondisi agroekosistem dan sosial ekonomi wilayahnya juga harus sesuai dengan komoditas yang sudah menjadi prioritas nasional. Selanjutnya fokus komoditas terpilih tersebut perlu dirancang secara multiyears dengan tahapan-tahapan pengembangan yang jelas dan disertai sasaran-sasaran yang terukur. Berdasarkan rancangan multiyears dengan basis komoditas tersebut dirumuskan berbagai kebutuhan kegiatan tiap tahun, baik kebutuhan peningkatan SDM, perbaikan kelembagaan usaha, penambahan sarana dan infrastruktur, kebutuhan regulasi dan dukungan-dukungan yang dibutuhkan dari sektor terkait. Setelah itu baru dapat dihitung kebutuhan anggaran yang tentu saja harus disertai pemilahan komponen-komponen apa

yang akan didukung dengan APBN dan apa yang cukup dengan APBD, serta apa yang menjadi investasi masyarakat investor atau koperasi petani.

Saudara-saudara peserta MUSRENBANGTAN yang berbahagia,

Dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan dan efektivitas penggunaan anggaran 2007, maka perlu kami informasikan bahwa Departemen Pertanian pada tahun 2007 telah menerapkan berbagai kegiatan utama strategis yang akan menjadi payung bagi penggunaan dana APBN Departemen Pertanian. Oleh karena itu bagi daerah dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan menggunakan dana APBN Departemen Pertanian perlu juga mempertimbangkan kegiatan utama strategis tersebut mencakup: (1) Pengembangan benih bersubsidi bagi petani miskin, (2) Penguatan kelembagaan perbenihan perbibitan, (3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM petani termasuk penyuluhan pertanian, (4) Penguatan kelembagaan ekonomi petani (PMUK dan LM3), (5) Stabilisasi/Kepastian harga komoditas primer (LUEP), (6) Penjaminan kredit pertanian, (7) Penyediaan infrastruktur pertanian, (8)

Mekanisasi pertanian dan pengolahan/pemasaran hasil, (9) Pengendalian OPT dan penyakit hewan, (10) Pertanian organik dan lingkungan hidup, (11) Pengembangan bio-energi bidang pertanian, dan (12) Peningkatan kualitas manajemen pembangunan pertanian

Dapat pula saya informasikan bahwa pemerintah bertekad untuk memperkuat ketahanan pangan khususnya mengupayakan terwujudnya swasembada atas lima komoditas utama pangan, masing-masing: beras swasembada berkelanjutan, jagung swasembada tahun 2007/2008, kedelai swasembada tahun 2015, gula swasembada tahun 2009 dan daging sapi berkecukupan tahun 2010.

Saudara peserta MUSRENBANGTAN yang berbahagia,

Sebagai akhir dari sambutan ini, maka saya perlu mengingatkan bahwa meskipun perencanaan yang kita buat sudah baik hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan kita bersama, karena pada saat implementasi masih banyak faktor yang turut berpengaruh pada pencapaian hasil pembangunan pertanian. Oleh karena itu, pengawalan dan berbagai penyesuaian mungkin masih diperlukan dalam implementasinya.



Tetapi kalau perencanaannya memang tidak baik sudah pasti hasilnya tidak akan baik pula. Dengan demikian, keseriusan dan komitmen yang tinggi dan para peserta dalam merumuskan perencanaan pembangunan pertanian tahun 2007 harus kita niatkan bersama. Semoga apa *yang* kita lakukan dapat menjadi amal ibadah kita dan semoga pula kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allaw SWT.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmannir-rahiim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Tahun 2007 saya nyatakan dibuka dengan resmi

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA GILING TEBU TEMANTEN
MG TAHUN 2006
DI PG TRANGKIL – PATI JAWA TENGAH**

Tanggal : 19 April 2006

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati;

Saudara Gubernur Provinsi Jawa Tengah;

Saudara Bupati Kabupaten Pati;

Saudara-saudara para undangan;

Para pelaku agribisnis dan petani tebu yang saya cintai.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di PG Trangkil, Pati dalam rangka tiling Tebu Temanten yang merupakan awal dari dimulainya musim giling tahun 2006. Tebu yang akan digiling dari wilayah Trangkil sebagian besar tebu petani dan



merupakan hasil rehabilitasi tanaman ratoon yang menggunakan bibit unggul.

Saya merasa berbahagia sekali dapat menyaksikan giling perdana bersama Saudara-saudara sekalian dan ini memperlihatkan bahwa kita semua menaruh perhatian yang besar terhadap upaya yang telah Kita sepakati bersama untuk meningkatkan kinerja industri gula Nasional guna mewujudkan Swasembada Gula pada tahun 2009.

Oleh karena itu, merupakan suatu tantangan bagi kita untuk lebih bersungguh - sungguh memacu percepatan peningkatan daya saing industri gula Nasional melalui peningkatan produksi dan efisiensi Pabrik Gula. Petani tebu agar secara terus menerus bekerja keras untuk memperbaiki tanaman tebu dengan menerapkan kaedah budidaya yang tepat dan benar.

Demikian pula manajemen Pabrik Gula harus mencari terobosan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pabrik yang dikelolanya. Kemitraan dan kerjasama petani tebu dengan pabrik gula harus lebih ditingkatkan dan diperkokoh terutama dalam pengelolaan budidaya tanaman, panen dan



giling dengan mengembangkan transparansi terutama mengenai rendemen.

Peningkatan daya saing ini sangat penting dan strategis, karena tidak lama lagi tahun 2010, komoditas gula kita sudah harus dicabut dari *Highly Sensitive List* dalam rangka AFTA. Waktu yang tersedia relatif singkat, oleh karena itu perlu kesungguhan kita semua agar mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Hadirin yang saya hormati,

Kebijakan industri gula nasional yang kita terapkan adalah kebijakan “Proteksi dan Promosi”. Promosi diwujudkan berupa perlindungan industri gula nasional dengan berbagai bentuk instrumen, seperti kebijakan tarif impor gula serta kebijakan perdagangan dan tataniaga gula, terakhir diatur dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527 dan No. 61 tahun 2004. Kebijakan proteksi ini telah mampu mengangkat harga gula petani dari Rp. 2.500/Kg tahun 2002 menjadi Rp. 3.500/Kg tahun 2004.



Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Departemen Pertanian telah memfasilitasi berbagai bentuk promosi bagi industri gula kita. Beberapa diantaranya adalah subsidi bunga kredit KKP-TR sebesar Rp. 876,5 miliar, subsidi melalui pabrik pupuk sebesar Rp. 1,3 triliun tahun 2005 dan 3 triliun pada tahun 2006. Alokasi dana APBN Departemen Pertanian TA. 2003 sebesar Rp. 66,8 miliar, TA. 2004 sebesar Rp. 70,4 miliar, TA. 2005 sebesar Rp. 93,8 miliar dan TA. 2006 sebesar Rp. 95 miliar untuk Penguatan Modal Usaha Kelompok/Koperasi (PMUK). Sebagian dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembinaan, pelatihan petani tebu serta penguatan kelembagaan.

Dengan dana APBN tersebut, sejak tahun 2003 s/d 2005 Kita telah berhasil membangun 11.721 ha kebun bibit tebu secara berjenjang, pembongkaran tanaman ratoon yang diganti dengan tebu varietas unggul seluas 59.091 Ha pengadaan alat pengolah lahan serta perbaikan fasilitas pengairan. Disamping itu juga telah dilatih petugas PG, Petani Tebu di I , PP Yogyakarta serta pelatihan pengurus KPTR/ Kelompok Tani oleh masing-masing daerah. Dana APBN yang memang terbatas itu ternyata berhasil menarik investasi dari sumber dana permodalan masyarakat. Saya mendapat



laporan pembongkaran ratoon ternyata diikuti juga oleh pihak PG dan petani secara swadaya dan swadana, yang saya anggap ini merupakan dampak positif dari apa yang sudah kita mulai bersama.

Saudara Gubernur dan hadirin sekalian,

Dari semua yang ada terkesan bahwa kebijakan dan upaya yang telah kita lakukan memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari sisi produksi, tanaman tebu dilokasi bongkar ratoon, diperkirakan produksinya mencapai antara 110 sampai 180 ton tebu dilahan per hektar sawah dan 80 sampai 110 ton tebu per hektar dilahan tegalan yang berarti sudah berada diatas produksi rata-rata nasional saat ini sebesar 81 ton. Penataan varietas berdasarkan kemasakan dan penataan tanaman telah mulai terlaksana, yang secara bertahap akan tertata sesuai dengan komposisi yang ideal.

Selanjutnya juga telah mulai tumbuh dan berkembang mobilisasi dana masyarakat untuk mengganti tanaman ratoon dengan tanaman barn (plant cane). Hasil yang dicapai ini, membuktikan bahwa Penguatan Modal Usaha Kelompok



(PMUK) telah mampu menjadi pemicu timbulnya gerakan swadaya petani/PG, sepanjang iklim agribisnis gula yang relatif membaik pada dua tahun terakhir ini mampu dipertahankan.

Melihat kinerja PG Trangkil selama 5 (lima) tahun terakhir, terjadi peningkatan yang cukup menggembirakan. Bila pada tahun 2001 areal yang ditebang hanya sekitar 7.168 ha, tahun 2005 meningkat menjadi 10.226 ha. Produksi tebu dan hablur meningkat dari 416.160 ton tebu dan 21.501 ton hablur menjadi 626.583 ton tebu dan 39.243 ton hablur. Demikian juga rendemen meningkat dari 5,15% menjadi 6,26%. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah tebu sebagai dampak keberhasilan program bongkar ratoon sudah waktunya untuk meningkatkan kapasitas giling di PG Trangkil. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan secara bertahap dari 3.700 ICD menjadi 6.000 TCI) pada tahun 2008.

Guna memenuhi pasokan bahan baku tebu masih diperlukan perluasan areal sekitar 4.000 ha dengan asumsi produktivitas tebu lebih kurang 65 ton/11a. Perluasan areal ini hendaknya diikuti dengan penggunaan Varietas unggul baru agar produktivitas tebu dapat melampaui sasaran.



Disamping itu juga diharapkan perhatian, peranan dan kontribusi Pemerintah Daerah setempat terhadap pembangunan sistem dan usaha agribisnis tebu yang selama ini sudah sangat mendukung agar dapat dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan sehingga dapat membantu kelancaran dan keberhasilan program pengembangan agribisnis tebu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing wilayah sentra produksi tebu.

Saudara Gubernur dan hadirin yang saya hormati,

Beberapa saat lagi, kita akan menyaksikan giling tebu Temanten pada giling perdana yang menandai mulai masuknya musim giling 2006 di PG Trangkil ini.

Perkenankan saya untuk mengingatkan kembali agar pabrik gula selalu mengembangkan transparansi antara lain dalam hal rendemen, karena hal ini merupakan Salah satu kunci harmonisasinya hubungan kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengelola tebang muat angkut secara tertib dan baik, mengingat



manajemen yang kurang tertib berpotensi menurunkan rendemen secara signifikan dan menambah biaya angkut.

Akhirnya marilah bersama-sama kita saksikan giling tebu Temanten di PG Trangkil.

Selamat memulai giling, semoga semua usaha kita senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT.

Terimakasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Trangkil, 19 April 2006

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PENCANANGAN PENYALURAN HIBAH ADB
NO. 0002-INO
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN
PENYERAHAN BANTUAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF (BUEP)
SECARA SIMBOLIS KEPADA KPK-KPK DI PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA
UTARA**

Banda Aceh, 24 April 2006

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Terhormat

Saudara Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam

Saudara Gubernur Sumatera Utara

Saudara para Kepala Dinas/ Badan se Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

Saudara para Bupati/ Walikota se Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam

Himpunan Sambutan Menteri Pertanian Tahun 2006



Saudara Pieter M. Smidt, Head of Extended Mission in
Sumatera - ADB

Saudara Kepala BRR NAD-Nias

***Bapak/ Ibu masyarakat tani dan undangan yang
berbahagia***

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT yang atas perkenannya
memungkinkan kita dapat bertemu di sini dalam keadaan
sehat wal'afiat. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam rangka
melaksanakan tugas-tugas pembangunan khususnya
sektor pertanian. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya
karena pada hari ini dapat bertatap muka dengan Saudara-
saudara sekalian dalam rangka pencaangan penyaluran
hibah ADB Kegiatan Proyek

Dukungan Emergensi Gempa Bumi dan Tsunami
(ETESP). Hibah ADB untuk kegiatan Proyek Dukungan
Emergensi Gempa Bumi dan Tsunami (ETESP) tersebut
dilaksanakan selama 4 tahun dengan dana sebesar 30 juta
dollar. Untuk tahun pertama, hibah yang diberikan adalah



sebesar 8 juta dollar atau Rp 74.400.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), dengan melibatkan 638 kelompok tani yang beranggotakan 7.450 orang di 10 kabupaten, yaitu Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Simeulue, serta penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (BUEP) senilai Rp. 14.976.000.000, (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) kepada perwakilan dari 7.488 orang yang tergabung dalam 410 KPK dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Nias, melalui Program Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K).

Departemen Pertanian menyampaikan terima kasih kepada ADB yang telah memberikan perhatian penuh kepada korban Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara, khususnya pada sektor pertanian dengan menyampaikan bantuan baik berupa hibah mumi maupun berupa pemrograman ulang sejumlah proyek yang memperoleh pinjaman dari ADB. Salah satunya adalah Proyek P4K.



Saudara-saudara yang saya hormati,

Membangun sektor pertanian ke depan bertujuan untuk mensejahterakan petani, peternak, pekebun, dan petani kecil lainnya. Sehingga dengan demikian, untuk mencapainya tidak semata-mata hanya peningkatan produksi yang kita kejar, akan tetapi yang lebih penting adalah pencapaian ketahanan pangan dan kemandirian pangan serta peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian. Oleh karena itu, diperlukan perubahan-perubahan mendasar, yaitu pembangunan pertanian berpusat kepada pemberdayaan manusianya (*people centered development*).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat strategis. Departemen Pertanian sebagai unsur pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian hanya akan bergerak dalam hal-hal yang sifatnya *public goods* (dibutuhkan semua orang tanpa kecuali), *externalities* yang tinggi (kaitan dan hubungan lintas daerah dan negara), *economic of scale* (pembangunan infrastruktur yang strategic), dan hal-hal yang bersifat *moral hazard* (pengujian mutu, standarisasi, harmonisasi, dan sebagainya yang terkait dengan



konsumen).

Saudara-saudara yang saya hormati,

Saat ini pembangunan pertanian dalam kerangka pembangunan nasional diharapkan mampu menjadi penggerak dan memberikan kontribusi yang besar, terutama dalam pembangunan ekonomi nasional, seperti dalam hal penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri, dan sebagai sumber devisa. Namun demikian, disisi lain, pembangunan pertanian dihadapkan kepada berbagai permasalahan, antara lain kurang memadainya infrastruktur pertanian, lemahnya permodalan, ketetapan ketersediaan sarana, aplikasi teknologi, lemahnya petani terhadap akses pasar, dan lain-lainnya.

Di samping itu, dalam hal sumber daya alam, berbagai permasalahan dijumpai antara lain skala usaha belum ekonomis (pemilikan lahan sempit), menurunnya kapasitas lahan dan terjadinya konversi lahan pertanian yang tidak terkendali. Permasalahan tersebut menjadi semakin berat manakala dibarengi dengan musibah yang cukup besar dan sangat memprihatinkan yaitu adanya gempa bumi yang telah



memicu terjadinya gelombang raksasa tsunami dan menimbulkan kerusakan serta korban yang sangat besar terhadap sebagian besar daerah pantai. Kondisi tersebut menuntut kita harus berbuat sesuatu untuk masyarakat Aceh. Upaya pemulihan kegiatan di sektor pertanian perlu segera dilakukan agar masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana sebelum terjadi bencana, dan bila tidak segera dilakukan akan merugikan masyarakat sendiri dan berdampak luas terhadap wilayah sekitarnya bahkan nasional karena sektor pertanian khususnya masalah pangan merupakan sektor yang strategis dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Upaya pemulihan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias tidak lepas dari uluran tangan Pemerintah Indonesia bahkan simpati dari Dunia Internasional. Bantuan dari Dunia Internasional tersebut ikut mempercepat pemulihan wilayah ini. Salah satu uluran tangan dari negara lain yang merupakan negara donor di Asia adalah melalui ADB (Asian Development Bank). ADB memberikan bantuan secara hibah/Grant dan pemrograman ulang sejumlah proyek yang memperoleh pinjaman ADB untuk melaksanakan program rekonstruksi dan rehabilitasi NAD dan Nias. Dukungan Hibah/Grant ADB



diwujudkan dalam proyek dukungan emergensi gempa bumi dan tsunami yang dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Sedangkan pemrograman ulang proyek berlaku untuk Proyek P4K Fase III/*Rural Income Generation Project* yang dimulai tahun 2005 dan akan berakhir pada Desember 2006.

Dengan dukungan ADB tersebut diharapkan pemulihan sektor pertanian dapat segera terlaksana. Pada hari ini saya telah menyaksikan berbagai kenyataan yang amat membanggakan dan membahagiakan. Masyarakat yang terkena dampak langsung musibah gempa bumi dan tsunami memiliki ketegaran yang luar biasa. Mereka tidak terpuruk dalam kesedihan dan keputusan yang berkepanjangan.

Bahkan sebaliknya, mereka memperlihatkan motivasi, kemauan dan kesungguhan untuk merubah keadaan yang menimpa diri mereka. Kesemua itu mereka wujudkan dalam kesediaan mereka bekerja sama membentuk kelompok, merancang berbagai kegiatan yang memberi manfaat, dan memulai usaha untuk memulihkan mata pencaharian mereka yang selama ini telah terenggut bencana. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya menghimbau, kepada seluruh



peserta pencairan penyaluran hibah ADB, dan para penerima BUEP melalui Program P4K :

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NAD dan Batai Diktat Pertanian selaku penerima SKPA (Surat Kuasa Pengguna Anggaran) dari Departemen Pertanian agar sungguh-sungguh menyalurkan bantuan kepada petani dan hendaknya dilakukan secara transparan, diberikan secara utuh dan tepat sasaran.
2. Masyarakat tani penerima bantuan hibah agar sungguh-sungguh memanfaatkan bantuan yang telah diterima untuk mengembangkan usaha pertanian miliknya di kawasan terkena musibah sehingga kegiatan pertanian dapat bangkit kembali sebagai sumber penghidupan keluarga.
3. Saya berharap pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif melalui program P4K ini betul-betul bisa merealisasikan harapan kita bersama, yakni pulihnya mata pencaharian dari anggota-anggota KPK yang merupakan korban langsung maupun tidak langsung dari bencana gempa bumi dan tsunami, baik di Provinsi NAD maupun Sumatera Utara. Dengan pulihnya mata pencaharian mereka, anggota-anggota KPK diharapkan dapat memiliki



sumber pendapatan guna membiayai kehidupan keluarga mereka sehari-hari.

4. Alat dan mesin pertanian yang telah diterima agar dimanfaatkan secara bersama dalam wadah yang tergabung dalam kelompok UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan).
5. Petani penerima bantuan agar aktif bekerjasama dalam kelompok tani yang telah disepakati/diberikan mulai dari kegiatan hulu-on farm-hilir.
6. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), para Konsultan ADB, serta LSM Bina Swadaya selaku pendamping petani agar aktif membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani/kelompok tani dalam menjalankan agribisnis komoditas yang ditangani. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan Revitalisasi Pertanian.
7. Semua bantuan yang diterima hendaknya dapat digulirkan dalam kelompoknya dalam rangka memperkuat program PUMK (Penguatan Modal Usaha Kelompok)
8. Keberhasilan pembangunan pertanian di NAD tergantung dari 3 (tiga) pilar kekuatan, yaitu masyarakat, khususnya petani yang tergabung dalam kelompok tani, Pemerintah Daerah, dan dukungan Pihak Swasta.



Saudara-saudara yang saya hormati,

Jumlah bantuan hibah maupun bantuan usaha ekonomi produktif yang diberikan memang masih amat terbatas, baik jumlah penerimanya maupun nilai nominalnya. Namun demikian, janganlah keadaan seperti itu menjadikan kita lalai mensyukuri nikmat Allah SWT. Saya teringat kata-kata mantan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad, bahwa sukses yang besar tidak akan dapat dicapai dengan satu lompatan besar, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Sedikit dan kecil senantiasa menjadi ciri kita sebagai hamba yang serba terbatas di hadapan Allah Yang Maha Kaya.

Memulai perubahan sedikit demi sedikit, dari yang kecil-kecil, bermula dari diri kita sendiri, dan saat ini juga, merupakan teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pemanfaatan bantuan yang kecil akan dapat menjadi besar manakala kita mampu mengelolanya dengan cerdas dan bijaksana. Oleh karena itu, dalam program P4K dengan penyaluran BUEP, misalnya, dianjurkan agar bantuan yang diterima tidak digunakan seluruhnya untuk modal usaha perorangan. Sebagian hendaknya disisihkan untuk dijadikan



modal usaha bersama dalam kelompok dan sebagian lagi untuk modal usaha simpan pinjam kelompok. Simpan-pinjam dalam kelompok inilah yang dapat diperbesar terus-menerus untuk dijadikan sumber keuangan bagi seluruh anggota. Pengalaman melalui program P4K di 127 kabupaten menunjukkan bahwa pemupukan modal melalui simpan-pinjam kelompok ini dapat benar-benar menjadi sumber modal usaha bagi seluruh anggota, jika dikelola dengan benar.

Untuk itulah maka dalam program BUEP dengan pola P4K dirancang kesiapan SDMnya agar dapat mengelola dengan baik. Sebelum menerima BUEP semua anggota kelompok dilatih berbagai hal, mulai dari cara berkelompok yang baik sampai dengan pengembangan usaha mikro. Keberhasilan program ini nantinya bukan terletak pada dimanfaatkannya BUEP saja, melainkan yang lebih penting adalah berlanjutnya sistem pemberdayaan melalui kelompok. Artinya, kelompok-kelompok yang telah dibentuk oleh masyarakat sendiri jangan hanya merupakan syarat formal untuk dapat menerima bantuan, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota kelompok untuk terus meningkatkan kesejahteraan keluarga.



Semoga dengan segala ketekunan dan kesungguhan kita dalam upaya dan ikhtiar ini semua makin mendekatkan kita kepada ketakwaan, senantiasa ikhlas dan mensyukuri semua kehendak Allah, dan semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita.

Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, atas perhatian Saudara-saudara sekalian saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 24 April 2006

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN PIDATO MENTERI
PADA PUNCAK ACARA
TEMU LAPANG DAN EKSPOSE INOVASI TEKNOLOGI
TANAMAN PANGAN
Desa Merden, Kecarnatan Purwonegoro,
Banjarnegara**

26 April 2006

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Yang saya hormati:

- Gubernur Jawa Tengah dan Jajarannya
- Bupati Banjarnegara dan Jajarannya
- Para Pejabat Eselon I dan II tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten
- Para Petani yang saya banggakan serta Hadirin dan para undangan sekalian yang berbahagia

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara Temu Lapang dan Ekspose Teknologi Tanaman Pangan yang



mengambil tema “Inovasi Teknologi untuk Ketahanan Pangan” pada hari ini di Desa Merden, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Saya merasa berbahagia karena mendapat kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka dengan Bapak/Ibu petani, bersama-sama dengan para peneliti, penyuluh, pengambil kebijakan, pelaku agribisnis, dan produsen agro input, yang masing-masing berperan penting dalam sistem produksi padi dan palawija nasional.

Sebagaimana kita ketahui bahwa padi dan palawija selain sebagai sumber makanan pokok dan sumber ketahanan pangan, juga merupakan sumber kehidupan dan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat kita. Oleh sebab itu, Departemen Pertanian beserta jajarannya senantiasa menaruh perhatian sangat besar terhadap upaya peningkatan produksi padi dan palawija serta pendapatan petani.

Dalam sistem produksi padi dan palawija nasional, para petani adalah pelaku utama yang berkiprah di garda paling depan. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana kondisi ketahanan pangan kita tanpa peran dan kiprah para petani ini. Saya juga melihat bahwa para peneliti dan



penyuluh pertanian telah bekerja serius dengan niat yang tulus untuk membantu petani kita dalam mengatasi rintangan yang dihadapi di lapangan. Oleh karena itu, baik petani maupun peneliti dan penyuluh pertanian serta petugas lapangan lainnya telah berbuat amal jariah bagi bangsa dan negara ini, karena mereka bekerja keras untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Saudara-saudara Sekalian,

Saya menyambut baik acara Temu Lapang yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Pertanian, Pemda Jawa Tengah dan Pemda Banjarnegara serta para swasta dan tentunya para petani sekalian. Saya berpendapat, kegiatan temu lapang ini merupakan media yang sangat efektif untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan inovasi teknologi hasil-hasil penelitian kepada masyarakat, khususnya para petani dan pelaku agribisnis, apalagi kegiatan ini dilakukan di tengah-tengah hamparan padi milik petani.

Selama ini kita sering mendengar atau melihat berbagai



kegiatan tentang diseminasi dan sosialisasi inovasi teknologi pertanian, akan tetapi teknologi tersebut belum atau tidak pernah dimanfaatkan oleh petani, karena mereka belum melihat keunggulannya dengan mata kepala sendiri. Oleh sebab itu, sering kita katakan bahwa teknologi telah banyak dihasilkan, tetapi belum diketahui oleh para petani. Kalaupun sudah sampai kepada para petani, tetapi belum banyak yang benar-benar dimanfaatkan karena petani belum mendapatkan informasi yang cukup tentang teknologi tersebut di lapangan.

Melalui kegiatan temu lapang semacam ini, para petani dan pengguna teknologi lainnya, termasuk penentu kebijakan dapat melihat langsung keragaan inovasi teknologi padi dan palawija utama dari dekat. Disamping itu, para petani juga dapat bertatap muka dan berdialog dengan para peneliti yang menghasilkan teknologi tersebut, baik dari Badan Litbang Pertanian maupun lembaga penelitian lainnya. Para penyuluh saya harapkan juga dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuannya.

Pada kesempatan ini saya berharap agar Bapak/Ibu petani dan para penyuluh dapat memberi saran dan masukan



bahkan mengkritisi para peneliti tentang masalah yang dihadapi di lapangan. Masukan tersebut tentu penting artinya bagi para peneliti dalam memperbaiki penelitiannya untuk menghasilkan teknologi yang benar-benar mampu memecahkan masalah riil yang ada di lapangan.

Para Hadirin yang saya hormati,

Sosialisasi teknologi dan penyuluhan pertanian merupakan salah satu pilar penentu keberhasilan dalam peningkatan produksi pangan. Mengecilnya laju peningkatan produksi padi dan palawija beberapa tahun terakhir ini salah satunya terkait dengan lemahnya sistem penyuluhan, baik ditinjau dari sarana dan prasarana maupun kelembagaannya. Sebagian besar penyuluh pertanian yang ada saat ini sudah berusia lebih 50 tahun dan bahkan banyak yang telah memasuki masa pensiun. Sementara itu kita sudah terlalu lama tidak merekrut tenaga penyuluh baru dalam jumlah yang memadai. Oleh sebab itu mulai tahun ini kita berupaya untuk merevitalisasi dan mereformasi sistem penyuluhan pertanian. Selain mengangkat tenaga penyuluh baru, kita juga akan membenahi sistem kelembagaan dan sistem penyuluhan



baik di pusat maupun di daerah.

Namun perlu disadari, bahwa penyuluhan tanpa masukan dari penelitian secara berkelanjutan dapat diibaratkan sebagai tentara yang kehabisan peluru dalam peperangan. Penelitian adalah sumber inovasi baik berupa varietas unggul, benih penjenis, maupun teknik budidaya dan pascapanen, sebagaimana yang dapat kita saksikan pada hari ini. Produsen agro input atau sarana produksi tentu tidak kalah besar peranannya dalam mendukung pertanian kita, terutama dalam hal pengadaan benih, pupuk, dan pestisida.

Pada prinsipnya, kerja sama yang baik antara pilar-pilar dalam sistem produksi padi dan palawija terutama peneliti, penyuluh, petani, produsen agro input dan penentu kebijakan, baik di pusat maupun daerah merupakan kunci keberhasilan pembangunan pertanian nasional kedepan.

Saudara-saudara Sekalian,

Beberapa waktu lalu kita cukup direpotkan oleh serangan hama wereng coklat terutama di Jawa Tengah dan



Jawa Barat. Saat ini, kita lihat tanaman padi kita banyak terserang penyakit hawar daun (BLB). Masalah ini dipicu oleh kondisi lingkungan iklim, pola dan keserempakan tanam, penggunaan varietas kurang tahan, atau penanaman varietas tahan tetapi dari benih yang tidak bermutu dan tidak murni sehingga ketahanannya menurun, penggunaan pestisida yang kurang tepat dan penggunaan pupuk N yang berlebihan.

Dalam hubungan ini, saya telah meminta agar para peneliti padi di jajaran Badan Litbang Pertanian terus berupaya menghasilkan varietas unggul yang lebih tahan terhadap hama wereng dan hama penyakit penting lainnya. Selain itu para petani agar lebih memperhatikan kaidah PHT termasuk mengaktifkan kembali kelompok tani dan sekolah lapang PHT. Kita juga sudah melihat tanaman di lapangan dan membuktikan mana varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit tersebut. Silahkan memilih dan mengembangkan varietas yang bapak ibu tani senangi.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan benih yang bermutu. Benih Sumber utamanya BS (breeder seed) maupun FS (foundation seed), adalah bahan dasar untuk menghasilkan benih bermutu. Oleh sebab itu Badan



Litbang Pertanian dituntut untuk selalu mampu menghasilkan dan menyediakan benih penjenis dalam jumlah yang cukup dan mutu sesuai ketentuan yang berlaku. Hari ini kita lihat sendiri pertanaman yang ada di lapangan dan saya harapkan Badan Litbang Pertanian dan Balai-balai Benih kita (BBI, BBU dan Penangkar) dapat mengembangkan benih-benih yang disenangi masyarakat.

Akhir-akhir ini kita juga direpotkan dengan permasalahan ketersediaan pupuk. Kekurangan pasokan pupuk disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pasokan bahan baku (gas) yang kurang, adanya kerusakan di pabrik pupuk Petrokimia, masalah distribusi, dan kecendrungan petani menggunakan pupuk berlebihan. Pemerintah terus melakukan koordinasi dan upaya untuk mengatasi masalah pupuk tersebut. Sistem distribusi pupuk bersubsidi secara tertutup melalui RDKK perlu diterapkan dan bersamaan dengan itu terus dievaluasi efektivitasnya. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, saya ingin mengingatkan bahwa Menteri Pertanian telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 01/2006 tentang rekomendasi pemupukan spesifik lokasi untuk padi sawah.



Saya ingatkan kembali bahwa pilar utama dalam peningkatan pendapatan petani adalah peningkatan produktivitas yang diimbangi oleh peningkatan efisiensi dan nilai tambah produk.

Selain menggalakkan penggunaan bahan organik, dalam Kepmentan tersebut dimuat rekomendasi pemupukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan termasuk penggunaan bagan warna daun (BWD) untuk pemupukan urea, 'soil test kit' untuk penggunaan pupuk P dan K, dan petak omisi seperti yang kita lihat di lapangan ini. Efisiensi pemupukan tidak hanya penting artinya bagi peningkatan pendapatan petani tetapi juga peningkatan efisiensi energi nasional. Selain itu pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT), sistem integrasi padi ternak (SIPT), dan minapadi, seperti yang telah diterapkan oleh para petani di sini juga merupakan pendekatan yang tepat untuk mewujudkan sistem pertanian yang lebih memperhatikan lingkungan dan efisiensi produksi.

Saudara-saudara Sekalian,

Pada kesempatan ini saya ingin menekankan lagi



bahwa dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, maka pembangunan pertanian harus fokus. Kita telah tetapkan lima komoditas prioritas yang menjadi perhatian secara nasional yaitu padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Padi harus mencapai swasembada berkelanjutan, sehingga produksi harus naik paling tidak 1,5% per tahun. Bahkan Bapak Presiden menantang, daerah yang mampu meningkatkan produksi padi minimal 5% akan diberikan penghargaan khusus.

Dengan varietas unggul baru dan teknik produksi yang tersedia seperti yang kita lihat saat ini, saya yakin produksi padi dapat ditingkatkan lebih dari 5% bahkan 10%. Jagung ditargetkan swasembada tahun 2007, kedelai swasembada tahun 2015 dan bahkan Bapak Presiden minta agar dipercepat.

Gula ditargetkan swasembada tahun 2009, dan daging sapi berkecukupan tahun 2010. Saya mengharapkan masing-masing daerah kabupaten/kota dapat menetapkan prioritas dan fokus pembangunan pertaniannya, baik komoditas maupun bidang masalah yang harus ditangani.



Saya perlu informasikan bahwa pada tahun 2007, Departemen Pertanian telah menetapkan berbagai kegiatan utama strategis, yaitu: (1). Pengembangan benih bersubsidi bagi petani miskin, (2). Penguatan kelembagaan perbenihan/pembibitan, (3). Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM petani termasuk penyuluhan pertanian, (4). Penguatan kelembagaan ekonomi petani, (5). Stabilitas/pengutaaan harga komoditas primer (seperti program LUEP), (6). Penjaminan kredit pertanian, (7). Penyediaan infrastruktur pertanian, (8). Mekanisasi pertanian dan pengolahan/pemasaran hasil, (9). Pengendalian OPT dan penyakit hewan, (10). Pertanian organik dan lingkungan hidup, (11). Pengembangan bioenergi bidang pertanian, dan (12) Peningkatan kualitas manajemen pembangunan pertanian. Kegiatan utama strategis tersebut saya harapkan dapat memayungi kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan di daerah.

Saya berharap agar apa yang saya sampaikan tadi dapat menjadi perhatian kita semua. Dengan landasan keihlasan, kejujuran, kepedulian dan niat yang baik dan tulus untuk memperbaiki nasib para petani, bangsa dan negara



ini, Insya Allah kinerja kita mendapat berkah dari Allah SWT.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN /KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN
PADA :
RAPAT DEWAN KETAHANAN PANGAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

3 Mei 2006

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang Terhormat :

- Saudara Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan propinsi;
- Saudara Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se propinsi Kalimantan Barat;
- Peserta rapat koordinasi yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhaanahuwata'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti Rapat Dewan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh propinsi Kalimantan Barat.



Sebagaimana diketahui, Dewan Ketahanan Pangan selaku lembaga koordinasi fungsional yang diketuai oleh Presiden RI, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang bermartabat. Untuk itu, diperlukan strategi dan mekanisme koordinasi yang efektif agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap *stakeholders* bersinergi menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Saudara-Saudara Peserta Pertemuan yang Berbahagia,

Saya ingin kembali mengingatkan, pada saat konferensi tahun 2004, para Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan propinsi telah membuat kesepakatan bersama, yang salah satunya adalah ***“Mengurangi jumlah penduduk yang kelaparan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya 1 persen per tahun di mulai pada tahun 2005”***. Komitmen tersebut juga telah diperkuat dengan kesepakatan bersama para Bupati/Walikota selaku ketua DKP kabupaten/kota pada tahun 2005.



Kita sadari bersama bahwa untuk melaksanakan tanggungjawab ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat. Diperlukan kerjasama yang solid, kesamaan visi dan misi, dan dukungan dari semua pihak. Kebijakan dan program yang membawa ego sektoral dan mengedepankan kepentingan dinas/instansi tertentu harus diganti dengan program-program yang terfokus dan terkoordinasi pada pencapaian satu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Saudara-Saudara sekalian,

Pada saat ini, kerawanan pangan dan kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia. Data Dewan Ketahanan Pangan Nasional menunjukkan, sebagian besar masyarakat mengalami defisit energi protein karena mengkonsumsi di bawah jumlah yang dianjurkan 2000 kkal per kapita per hari dan 52 gram protein per kapita per hari. Pada tahun 2004 penduduk yang sangat rawan pangan, yaitu kelompok penduduk dengan konsumsi energi kurang dari 70% dari AKG atau 1400 kkal/kapita/hari, berjumlah 1,56 juta jiwa (0,71 %) dan pada tahun 2005 meningkat menjadi sekitar 5,11 juta jiwa



(2,32 %), kelompok tersebut juga mengalami defisit protein di bawah AKP sebesar 52 gram/kapita/hari. Adapun balita gizi buruk dan gizi kurang tahun 2004 berjumlah 3,81 juta (19,4 %).

Khusus untuk propinsi Kalimantan Barat, saya menghimbau kepada seluruh jajaran dinas/instansi selaku anggota Dewan Ketahanan Pangan propinsi dan kabupaten/kota untuk lebih mengaktifkan peran lembaga Dewan Ketahanan Pangan agar pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan dapat lebih fokus dan terpadu. Sedikitnya terdapat 8 kabupaten di propinsi ini yang rentan terhadap terjadinya rawan pangan. Kabupaten Landak, Sambas, Kapuas Hulu dan Sintang termasuk dalam kabupaten priorotas I/resiko tinggi rawan pangan yang akan mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kabupaten Sanggau dan Ketapang masuk dalam prioritas II/resiko sedang, sedangkan Pontianak dan Bengkayang termasuk dalam prioritas III/resiko rendah. Dalam kesempatan ini saya mengharapkan dukungan Saudara-saudara Gubernur dan Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan untuk dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus tersebut sebagai amanat rakyat yang



benar-benar hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi kita telah berkomitmen untuk melaksanakan segala upaya untuk mengurangi jumlah penduduk yang kelaparan yang masih ada di sekitar sekarang.

Saudara-Saudara sekalian,

Di samping masalah kerawanan pangan, akhir-akhir ini kita juga dihadapkan kepada isu-isu ketahanan pangan yang mengemuka, seperti masalah ketersediaan pangan pokok nasional dan masalah penyalahgunaan bahan pengawet non makanan seperti formalin dan boraks. Kita juga masih menghadapi masalah ketahanan pangan yang mempunyai perspektif penyelesaian jangka menengah dan panjang seperti : (1) masalah panganekaragaman pangan menuju gizi seimbang, (2) alih fungsi lahan pertanian dan konservasi lahan dan air, (3) kurangnya infrastruktur perdesaan, (4) kerawanan pangan dan gizi buruk, dan (5) belum mantapnya kelembagaan ketahanan pangan. Masalah-masalah tersebut perlu mendapatkan prioritas dalam penanganannya dan dilaksanakan secara terintegrasi lintas departemen/instansi terkait.



Berdasarkan kondisi tersebut dan setelah lebih dari setahun berlalu, kita perlu mengevaluasi diri, apakah kebijakan dan program yang telah dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan benar-benar telah diarahkan untuk mewujudkan janji yang disepakati bersama pada konferensi tahun 2004. Pada saat ini Tim independen dari IPB bekerjasama dengan Sekretariat DKP sedang mengevaluasi implementasi hasil kesepakatan Bupati/Walikota selaku Ketua DKP kabupaten/kota, yang hasilnya akan disampaikan dalam Sidang Regional DKP yang akan dilaksanakan bulan Juni — Juli 2006. Setelah itu, Tim akan mengevaluasi implementasi kesepakatan Gubernur selaku Ketua DKP propinsi dan hasilnya akan disampaikan pada saat Konferensi DKP dihadapan Presiden RI selaku Ketua DKP pada bulan November 2006.

Saya sampaikan kepada Saudara-Saudara sekalian bahwa Bapak Presiden memberikan perhatian tinggi kepada Dewan Ketahanan Pangan dan perannya dalam pembangunan ketahanan pangan. Pada tanggal 18 April 2006 Presiden RI selaku Ketua DKP telah memimpin langsung Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan yang diikuti oleh seluruh Menteri dan ketua LNPD yang menjadi anggota



DKP. Rapat Pleno tersebut khusus membahas Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 — 2009 yang melibatkan dukungan dari seluruh anggota Dewan. Pada kesempatan tersebut, Presiden RI juga memberikan sembilan instruksi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dewan Ketahanan Pangan baik nasional maupun daerah, yaitu

1. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) agar dilaksanakan secara sungguh-sungguh di seluruh Indonesia. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan keterpaduan lintas sektor, serta pelibatan dan peran serta daerah dalam pelaksanaannya.
2. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) agar berkoordinasi dengan Para Gubernur untuk menetapkan sasaran peningkatan produksi pangan terutama non beras agar mendekati tingkat swasembada pangan.
3. Perlu dilakukan revitalisasi DKP Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat berfungsi secara baik, terpadu, efisien dan efektif, serta agar perkembangan kinerjanya dapat diukur. Bagi propinsi yang belum membentuk agar segera membentuk.
4. Perlu dikembangkan sentra-sentra lumbung pangan, termasuk sentra-sentra lumbung pangan baru, seperti di Pulau Buru, Kabupaten Merauke dan Dompu, yang



potensial dan memiliki prospek yang baik. Pengembangan sentra-sentra tersebut melalui program-program terpadu dan terintegrasi dalam pewilayahan komoditas pangan.

5. Upaya peningkatan Ketahanan Pangan agar lebih terpadu antar sektor, serta antar pusat dan daerah agar mampu mengatasi masalah yang relevan seperti penyediaan pupuk, bantuan teknis/penyuluhan, aplikasi teknologi, terbatasnya infrastruktur perdesaan, dan alokasi dana.

Agar memprioritaskan penanganan masyarakat di daerah rawan pangan dan gizi, serta daerah sangat rawan pangan dan gizi, termasuk penanganan rawan gizi balita.

Laksanakan pengelolaan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan, termasuk pembuatan perkiraan ketersediaan dan kebutuhan pangan. termasuk pengelolaan risiko yg mungkin timbul, Teruskan upaya peningkatan Ketahanan Pangan, termasuk diversifikasi pangan melalui kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan, dengan melibatkan masyarakat lokal. Dayagunakan lahan terlantar. termasuk bekas HPH menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang mengarah pada peningkatan produksi pangan.



Saudara-Saudara sekalian,

Memperhatikan arahan Presiden RI tersebut, dan menghadapi kondisi yang semakin kompleks seperti yang terjadi sekarang, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki di dalam merumuskan program dan mengembangkan mekanisme koordinasi program di lapangan, yaitu (1) program ketahanan pangan tidak lagi terlalu fokus pada peningkatan produksi komoditas pangan tertentu (beras), melainkan menjadi pembangunan masyarakat (manusia) seutuhnya; (2) peran pemerintah yang semula sangat dominan digantikan dengan pemberdayaan seluruh *stakeholders* dalam membangun ketahanan pangan; (3) program ketahanan pangan tidak lagi hanya dibiayai dari dana pemerintah saja, tetapi juga didukung dari dana masyarakat yang digunakan dengan prinsip tepat, efisien dan transparan, (4) program ketahanan pangan dilaksanakan untuk menahan laju alih fungsi lahan pertanian sekaligus untuk menjaga kualitas lahan dan air dan (5) perwujudan ketahanan pangan harus memperhatikan berbagai aspek, baik lintas pelaku, lintas sektor, lintas wilayah dan keberlanjutannya.



Perlu saya tekankan juga bahwa ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan sebagai indikator ketahanan pangan yaitu : **(a) Ketersediaan**, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman; **(b) Distribusi**, di mana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah hingga ke pedalaman secara berkelanjutan, sehingga harganya stabil dan terjangkau oleh rumah tangga dan **(c) Konsumsi**, yaitu setiap rumah tangga mampu mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan, serta sesuai dengan preferensinya.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan produksi domestik, serta mengurangi pemasukan atau impor pangan. Impor pangan hanya dilakukan pada keadaan yang memaksa, misalnya pada saat neraca pangan berada dalam keadaan negatif atau pada masa paceklik karena kekeringan dan/atau bencana alam lainnya.



Pada sisi ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air; (b) menjamin kelangsungan produksi pangan utamanya dari produksi dalam negeri; (c) meningkatkan kapasitas produksi nasional dengan menetapkan lahan abadi untuk produksi pangan dan (d) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Pada aspek konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang; (b) mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; (c) mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; dan (d) meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dsb).

Bersamaan dengan itu, perlu dilakukan pembenahan



pada sistem distribusi pangan. Kebijakan untuk aspek distribusi diarahkan untuk: (a) mengembangkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efisien; (b) mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antar daerah; dan (c) mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.

Saya juga ingin memperkuat arahan Bapak Presiden RI

Bahwa pengembangan cadangan pangan di daerah harus segera direalisasikan. Pengalaman menunjukkan bahwa bencana, baik yang disebabkan oleh alam ataupun konflik sosial, selalu mengakibatkan terjadinya kerawanan pangan. Oleh karena itu, setiap daerah (dari propinsi hingga ke tingkat desa) harus memiliki cadangan pangan yang cukup untuk mengantisipasi semakin buruknya kualitas kesehatan masyarakat yang mengalami bencana.

Tidak hanya itu, daerah juga perlu meningkatkan



kemampuannya dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok melalui DPM LUEP. Pada tahun 2006 ini DPM LUEP telah dikembangkan di 25 propinsi. Persentase rata-rata jumlah pengembalian dana meningkat dari tahun 2003 sebesar 93,77 % menjadi 94,99 % pada tahun 2005. Namun untuk propinsi Kalimantan Barat persentase dana pengembalian hingga April 2006 tercatat baru sebesar 68,63 %. Melalui pertemuan ini saya mengharapkan kerjasama yang baik dari para mitra LUEP di propinsi ini untuk mentaati pengembalian pinjaman sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga DPM LUEP dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat khususnya petani.

Saudara-Saudara yang berbahagia,

Kita sadari bersama bahwa mewujudkan ketahanan pangan, sekali lagi bukanlah pekerjaan ringan, karena mencakup berbagai aspek, baik lintas pelaku (produsen-konsumen), lintas sektor (sumberdaya alam dan air - pertanian/ perikanan/ kehutanan/ - industri/perdagangan - sektor jasa dan keuangan), dan lintas wilayah (setiap wilayah memiliki keunggulan masing-masing daerah). Oleh karena



itu pemantapan ketahanan pangan menuntut bekerjanya seluruh *stakeholders* secara integratif dan sinerjik dalam wadah koordinasi DKP.

Pada saat ini, telah terbentuk 30 DKP Propinsi dan 339 DKP Kabupaten/Kota. Dewan Ketahanan Pangan di daerah diberikan keleluasan sepenuhnya untuk mengintrepretasikan kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional, ke dalam program yang lebih operasional di daerah. Tentu saja harus dilandasi dengan kearifan dalam mengelola seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki, menghormati norma dan budaya yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai dengan kemampuan untuk memprediksi pasar.

Saudara-Saudara sekalian,

Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada pertemuan Dewan Ketahanan Pangan hari ini. Semoga melalui pertemuan ini, Dewan Ketahanan Pangan propinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat serta seluruh *stakeholders* menjadi lebih peduli dan siap menjalankan



tugasnya masing-masing. Saya berharap bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini akan menjadi dasar pola pikir dan pola tindak bersama (*common platform*) bagi para *stakeholders*, tentang peran dan upaya yang dapat dilaksanakan, dengan siapa bersinergi, serta kapan dan dimana harus berperan, untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan perlindungannya pada kita semua. Selamat berkerja.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian,

Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI
PADA ACARA
PENCANANGAN FORUM PENYULUHAN PERTANIAN
PONTIANAK, 3 MEI 2006**

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Saudara Gubernur Kalimantan Barat yang saya hormati
Saudara Bupati Kabupaten Pontianak dan Bupati
Kabupaten Sanggau yang saya hormati**

Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
Ketadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan
farurtianva sehingga kita diberikan nikmat sehat wal afiat dan
dapat hadir pada acara pertemuan Pada kesempatan ini saya
ucapkan terimakasih kepada Gubernur Kalimantan Barat
beserta jajarannya yang telah mengundang kami untuk
berperanserta dalam acara Forum Penyuluhan Pertanian
Pedesaan.



Saudara-saudara yang kami hormati,

Sebagaimana dimaklumi bahwa sebagai tindaklanjut dicanangkannya Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 11 Juni 2005, kami telah mencanangkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian pada tanggal 3 Desember 2005 dan ditindaklanjuti dengan pencanangan Forum Penyuluhan Pertanian Pedesaan pada tanggal 11 maret 2006.

Inti dari kegiatan Forum Penyuluhan Pertanian Pedesaan yaitu bagaimana para penyuluh pertanian bersama-sama dengan Peneliti dan Instansi Dinas terkait berinteraksi dengan petani untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi petani minimal 2 (dua) minggu sekali. Harapan kami melalui forum semacam ini dapat ditemukan pemecahan permasalahan yang dihadapi petani.

Saudara-saudara yang kami hormati,

Dari pengalaman dan perjalanan yang saya ikuti dalam kegiatan Forum Penyuluhan Pertanian Pedesaan di beberapa daerah paling tidak ada 3 (tiga) hal penting yang



perlu menetapkan perhatian kita bersama, yaitu:

1. Kelembagaan Petani

Kita mendapatkan kesulitan membangun pertanian tanpa menata “Struktur Masyarakat” dalam wadah Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani. Dengan ditumbuhkembangkan Kelompoktani yang beranggotakan 20 - 25 orang petani dan Gabungan Kelompoktani yang terdiri dari 20 - 25 Kelompoktani akan memudahkan dalam proses pembinaan oleh para penyuluh atau kelompok dapat dijadikan sebagai kelas belajar dan mengajar dalam mengadopsi inovasi. Melalui kelompoktani akan memperkuat posisitar petani, para petani akan dapat membeli bersama sarana produksi pertanian lebih murah dan akan menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih baik. Usahatani secara berkelompok akan lebih efisien dibandingkan dengan usaha secara sendiri-sendiri yang luasannya relatif kecil.

2. Informasi dan Komunikasi

Terjadinya kemandegan arus informasi kepada petani dan menurunnya komunikasi antara penyuluh dengan petani berakibat pada terjadinya ketidakberdayaan petani ketika



dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan petani seperti halnya informasi pasar, harga pupuk, dan lain-lain.

Kondisi tersebut sebagai akibat kurang berfungsinya peran penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian. Kita sekarang sedang membangkitkan kembali peran penyuluhan melalui berbagai upaya yaitu, antara lain sedang diprosesnya RUU Penyuluhan Pertanian dan memberikan insentif bagi para penyuluh berupa Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dan kegiatan-kegiatan penataan dan pembinaan Kelompoktani.

3. Permodalan

Para Petani masih sering dihadapkan pada lemahnya permodalan sehingga tidak mampu menerapkan teknologi sesuai anjuran. Disamping itu, mereka tidak mampu menunda menjual hasil panennya karena tidak memiliki dana yang cukup.

Kami sedang berupaya bersama DPR-RI menyediakan dana talangan bagi para petani. Program LUEP terus kita kembangkan sehingga dapat menolong para petani dan tekanan para tengkulak.



Saudara-saudara yang saya hormati,

Demikian sambutan singkat dari saya, mudah-mudahan melalui forum ini kita ikut berperan serta memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani. Semoga Allah SWT meridhoi niat baik kita ini.

Dengan mengucapkan bismillahirrahmannirrahim secara resmi Forum Penyuluhan Pertanian Pedesaan saya nyatakan dibuka.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pontianak, 3 Mei 2006

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN
PADA
PEMBUKAAN SEMILOKA REVITALISASI PERTANIAN
HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA SULAWESI
UTARA
MANADO, 6 MEI 2006**

Assalaamu'alaikum Warakhmatullaahi Wabarakaatuh,

Yang saya hormati:

- Gubernur Sulawesi Utara dan Jajarannya,
- Para Bupati, Pejabat Pusat maupun Daerah,
- Hadirin dan Undangan yang berbahagia,

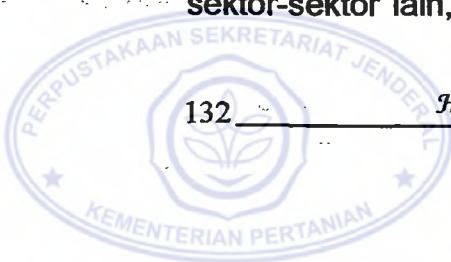
Pertama-tama, saya mengajak para hadirin semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat Wal-Afiat di ruangan ini untuk menghadiri "Semiloka Revitalisasi Pertanian", yang diselenggarakan oleh HKTI Sulawesi Utara. Saya sangat menghargai dan menyambut baik upaya HKTI Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan Semiloka ini. Seperti kita ketahui



bersama bahwa Revitalisasi Pertanian Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) telah dicanangkan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat. Hal itu merupakan komitmen Pemerintah yang tinggi terhadap pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi kemakmuran rakyat Indonesia yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dan usaha pertanian, perikanan dan kelautan.

Saudara-Saudara sekalian,

Dalam Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Menengah (RPPJM), Revitalisasi Pertanian merupakan salah satu agenda pembangunan ekonomi yang sangat penting. Hal ini karena sektor pertanian terus dituntut berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Keberhasilan sektor pertanian pada masa krisis yang lalu telah membuktikan bahwa sektor pertanian lebih tangguh bertahan dan mampu pulih lebih cepat dibanding sektor-sektor lain, sehingga berperan sebagai penyangga



pembangunan nasional. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa pertanian merupakan sektor paling relevan untuk dijadikan sebagai basis pengembangan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, utamanya di pedesaan.

Dengan berbagai keunggulan komparatif yang kita miliki, maka atribut sebagai negara agraris sesungguhnya bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi harus dapat dioptimalkan bagi kemajuan ekonomi bangsa. Fakta menunjukkan bahwa semaju apapun tingkat perkembangan negara yang ada dunia ini, tidak satupun dari mereka yang mengesampingkan arti penting pertanian bagi negaranya masing-masing.

Bahkan mereka berusaha mempertahankan eksistensi dan memproteksi pertanian mereka melalui berbagai cara, seperti: subsidi, "dumping", tarif dan non-tarif barrier, dan lain-lain yang cenderung tidak adil. Hal ini ditempuh karena sesungguhnya mereka tidak memiliki keunggulan komparatif untuk mengembangkan pertanian seperti yang kita miliki.



Saudara-Saudara sekalian,

Memang, pembangunan pertanian ke depan menghadapi permasalahan dan tantangan yang tidak ringan. Permasalahan pembangunan yang masih perlu mendapat prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pertanian mendatang adalah: (1) pemantapan ketahanan pangan, (2) peningkatan nilai tambah dan daya saing, dan (3) penanggulangan pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Sementara tantangan yang kita hadapi antara lain: (1) Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumberdaya pertanian (lahan, air, luas pemilikan lahan, konversi lahan), (2) Keterbatasan akses terhadap layanan usaha terutama permodalan, (3) Rantai tataniaga yang panjang dan sistem pemasaran yang belum adil, (4) Sistem alih teknologi masih lemah dan kurang tepat sasaran, (5) Kelembagaan petani dan posisi tawar petani rendah, (6) Lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, dan (7) kebijakan makro ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Terkait dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka terdapat tiga kelompok sasaran utama yang perlu dicapai



dalam pembangunan pertanian lima tahun ke depan, yaitu: (1) Meningkatnya ketahanan pangan nasional yang meliputi meningkatnya kapasitas produksi komoditas pertanian dan berkurangnya ketergantungan terhadap pangan impor sekitar 5-10 persen dari produksi domestik, (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, yang meliputi meningkatnya mutu produk primer pertanian, meningkatnya keragaman pengolahan produk pertanian dan meningkatnya ekspor serta meningkatnya surplus perdagangan komoditas pertanian, dan (3) Meningkatnya kesejahteraan petani yang meliputi meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dan menurunnya insiden kemiskinan. Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi umum yang diterapkan adalah melaksanakan manajemen pembangunan pertanian yang bersih, transparan dan bebas KKN; meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian.; memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM pertanian; meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian; meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna; serta mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian.



Saudara-Saudara sekalian,

Pada kesempatan ini, saya ingin menekankan pentingnya kita meningkatkan ketahanan pangan nasional. Bapak Presiden sangat menaruh perhatian yang tinggi terhadap ketahanan pangan ini, dan baru-baru ini telah diluncurkan buku tentang Kebijakan Ketahanan Pangan, yang ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden. Ketahanan pangan mempunyai peran yang sangat strategis, paling tidak dalam tiga hal: Pertama, akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hal yang paling asasi bagi manusia, Kedua, pangan memiliki peranan penting dalam pembentukan SDM yang berkualitas, Ketiga, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional berkelanjutan.

Produksi pangan, utamanya beras, harus terus kita tingkatkan melebihi laju peningkatan penduduk. Dengan varietas unggul baru dan teknologi pengelolaan tanaman secara terpadu yang tersedia saat ini, saya mempunyai keyakinan produksi padi dapat ditingkatkan lebih dari 5 persen per tahun. Untuk itu saya mengajak berbagai pihak,



termasuk HKTI, untuk berperan aktif dalam peningkatan ketahanan pangan tersebut.

Akhir-akhir ini kita agak direpotkan dengan masalah ketersediaan pupuk, yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain berkurangnya produksi pupuk akibat kurangnya pasokan bahan baku (gas) dan kerusakan pabrik, masalah distribusi pupuk dan kecenderungan petani menggunakan pupuk berlebihan. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, saya ingin mengingatkan bahwa telah dikeluarkan PERMENTAN No 01/2006 tentang rekomendasi pemupukan spesifik lokasi untuk padi sawah.

Selain menggalakkan penggunaan pupuk organik, dalam PERMENTAN tersebut disusun acuan rekomendasi pupuk yang lebih efisien dan ramah lingkungan, termasuk penggunaan alat bantu Bagan Warna Daun (BWD) untuk pemupukan N (Urea) dan "Soil Test Kit" untuk menentukan dosis P dan K yang tepat. Saya mengharapkan HKTI secara aktif mensosialisasikan dan mengajak para petani untuk menerapkan rekomendasi pupuk tersebut. Penghematan penggunaan pupuk di samping melestarikan lingkungan juga berdampak besar dalam penghematan energi secara nasional.



Saudara-Saudara sekalian,

Untuk dapat melakukan pembangunan pertanian secara optimal, tentunya diperlukan investasi yang tidak sedikit, yaitu berkisar antara Rp 30-50 trilyun per tahun. Dari kebutuhan investasi tersebut, pemerintah paling banyak hanya mampu mengalokasikan sekitar 7%, selebihnya sekitar 65% diharapkan bersumber dari swasta/investor/koperasi dan sekitar 28% diharapkan bersumber dari petani/peternak. Sebagai gambaran anggaran Departemen Pertanian Tahun 2006 ini hanya sekitar Rp. 7 trilyun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar (sekitar 60 persen) untuk keperluan belanja pegawai, pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian betapa kecilnya anggaran yang langsung digunakan untuk membangun fasilitas publik. Oleh karena itu, anggaran yang kecil tersebut harus dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif, utamanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, latihan, pendampingan, dan aspek regulasi. Di samping itu, kita juga dituntut untuk mendukung berbagai target produksi komoditas pertanian dan target sosial-ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan pertanian harus fokus, baik komoditas dan aspek yang ditangani, dan tidak dapat



menerapkan kebijakan “pemerataan”. Kita harus dapat dan berani menetapkan prioritas pembangunan pertanian.

Secara nasional, kita telah tetapkan lima komoditas utama prioritas yang menjadi fokus pembangunan pertanian, yaitu: padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Padi harus mencapai swasembada berkelanjutan, sehingga produksi harus naik paling tidak 1,5 persen per tahun. Jagung ditargetkan swasembada tahun 2007, kedelai swasembada tahun 2015, gula swasembada tahun 2009, dan daging sapi berkecukupan tahun 2010. Saya mengharapkan masing-masing daerah dapat menetapkan prioritas dan fokus pembangunan pertaniannya. HKTI saya harapkan berperan aktif dalam penentuan prioritas dan fokus pembangunan pertanian tersebut. Komoditas lainnya agar dapat didanai dari sumberdana lain, seperti APBD, bantuan, kerja sama, dan sebagainya.

Saya perlu informasikan bahwa pada tahun 2007, Departemen Pertanian telah menetapkan berbagai kegiatan utama strategis, yaitu: (1) Pengembangan benih bersubsidi bagi petani miskin, (2) Penguatan kelembagaan perbenihan/ pembibitan, (3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM



petani termasuk penyuluhan pertanian, (4) Penguatan kelembagaan ekonomi petani, (5) Stabilitas/penguatan harga komoditas primer (seperti program LUEP), (6) Penjaminan kredit pertanian, (7) Penyediaan infrastruktur pertanian, (8) Mekanisasi pertanian dan pengolahan/pemasaran hasil, (9) Pengendalian OPT dan penyakit hewan, (10) Pertanian organik dan lingkungan hidup, (11) Pengembangan bioenergi bidang pertanian, dan (12) Peningkatan kualitas manajemen pembangunan pertanian. Kegiatan utama strategis tersebut saya harapkan dapat memayungi kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan di daerah.

Secara khusus saya ingin sampaikan bahwa kelembagaan petani dan penyuluh merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan pertanian. Saya telah meminta kepada jajaran Badan Pengembangan SDM Pertanian untuk membangun dan memperkuat kelompok tani, asosiasi-asosiasi petani, dan sekaligus merevitalisasi sistem penyuluhan pertanian. Selain mengangkat tenaga penyuluh baru, kita juga akan membenahi sistem kelembagaan penyuluhan baik di pusat maupun daerah. Saya juga telah meminta agar mulai tahun ini dilakukan pelatihan tidak hanya kepada petugas lapang, tetapi juga kepada para petani.



Saudara-Saudara sekalian,

Mengakhiri sambutan ini, saya berharap agar apa yang saya sampaikan tadi dapat menjadi perhatian Saudara-Saudara para peserta Lokakarya dan perhatian kita semua. Melalui semiloka ini saya berharap dapat dirumuskan langkah-langkah operasional dan peran konkrit yang harus dimainkan HKTl dalam menjabarkan dan melaksanakan Revitalisasi Pertanian. Dengan landasan keikhlasan, kejujuran, kepedulian dan niat yang baik dan tulus, semoga apa yang kita lakukan dapat menjadi amal ibadah kita dan mendapat berkah dari Allah SWT. Amin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PERTEMUAN DEKLARASI PENGHENTIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

PEKANBARU, tanggal 10 MEI 2006

Sdr. Menteri Kehutanan ;

Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Sdr. Gubernur Propinsi Riau;

Para Pengusaha Perkebunan dan Kehutanan; serta

Para Undangan yang terhormat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah dan karunianya sehingga kita dapat bertemu pada acara Deklarasi Penghentian Kebakaran Hutan dan Lahan ini. Pertemuan ini saya nilai merupakan suatu hal yang sangat strategis dan merupakan tindak lanjut Instruksi Bapak Presiden RI pada hari Kamis 22 April 2006 yang lalu. Pada instruksi tersebut beliau menghimbau agar setiap pihak untuk stop ekspor asap.



Seperti kita ketahui bersama bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan antara lain disebabkan beberapa hal antara lain yaitu adanya tradisi perladangan berpindah, persiapan pengusahaan lahan perkebunan/kehutanan dengan cara pembakaran ataupun karena kelalaian individu. Kondisi ini semakin parah bila terjadi pada lahan gambut.

Saudara-saudara sekalian,

Sebagai akibat kelalaian dan kesengajaan sehingga menimbulkan kebakaran hutan dan lahan maka akan berdampak negatif pada beberapa aspek baik ekonomi, sosial, ekologis maupun politis. Sebagai ilustrasi kebakaran hutan dan lahan dari sisi ekonomis mengakibatkan hilangnya hasil hutan dan pangan dan *high cost* untuk kesehatan masyarakat sedangkan dari sisi ekologi terjadinya kerusakan habitat kepunahan hewan dan tanaman serta polusi udara, hal tersebut merupakan resultante yang berpengaruh terhadap pasar sawit Indonesia. dari . “Ekspor asap” ini menjadi perhatian dunia internasional yang secara politis menjadikan negara penyebab asap tidak populer dimata negara-negara “penerima asap” dan negara tujuan ekspor Indonesia.



Sebagai pimpinan Departemen Pertanian, saya menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan dalam pembangunan pertanian, khususnya pembangunan perkebunan terkait dengan pembukaan lahan. Sub sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor lingkup pertanian yang diandalkan dalam meningkatkan perekonomian nasional terutama dari devisa hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao dsb. Peran hasil-hasil pembangunan agribisnis berbasis perkebunan dalam perekonomian nasional telah mampu menunjukkan keunggulan.

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang berbasis di pedesaan, menjadikan usaha agribisnis perkebunan sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi jutaan petani. Tidak kurang dari 17,3 juta hektar areal perkebunan, diantaranya 13,2 juta hektar diusahakan oleh pekebun. Disamping aspek ekonomi lainnya seperti perolehan devisa dan pengembangan wilayah baru, pembangunan perkebunan juga berperan ditinjau dari aspek ekologi seperti rehabilitasi lahan marginal, mendukung fungsi hidro-orologis suatu wilayah, dan penyedia O₂ dan penyerap karbon serta menjadi media integrasi sosial melalui kemitraan usaha



antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu pembangunan pertanian khususnya perkebunan perlu dilanjutkan bahkan ditingkatkan kuantitasnya maupun kualitasnya. Pulau Sumatera merupakan daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit, karet dan kakao, disatu sisi potensi asap yang dihasilkan sebagai akibat pembangunan ini kadang-kadang masih cukup besar untuk itu upaya penaggulangannya perlu mendapat perhatian yang serius.

Saudara-saudara sekalian yang terhormat,

Lahan perkebunan di beberapa propinsi di Indonesia yang sering atau rawan terjadi kebakaran dan berdampak negatif terhadap lingkungan adalah propinsi yang berada di pulau Sumatera dan Kalimantan .

Pada tahun 2005 yang berhasil dimonitor dari data *hot spot* yang ada dan laporan dari Dinas Perkebunan serta data dari Departemen Kehutanan mengenai kebakaran lahan dan kebun yang terpantau enam propinsi yaitu Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan



Terengah dan Kalimantan Timur. Jumlah *hot spot* terbesar di propinsi Riau sebanyak 2.836 spot, dengan luasan lahan dan kebun terbakar 20.083 ha atau sekitar 93 % dari total luas lahan yang terbakar di enam propinsi tersebut.

Sebaran kasus kebakaran terjadi pada propinsi-propinsi utama rawan kebakaran kebun, yaitu seluruh propinsi Sumatera dan Kalimantan. Munculnya kebakaran kebun secara luas antara lain karena aktifitas pembukaan lahan oleh masyarakat yang didorong oleh keinginan untuk membuka lahan secara mudah, murah dan cepat untuk mengejar musim tanam. Keadaan tersebut diperparah oleh munculnya fenomena El-Nino. Penyebab lainnya adalah perilaku masyarakat yang belum memahami bahaya penggunaan api.

Dampak negatif kebakaran dirasakan pula oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Mengingat luasnya wilayah yang harus dibina dan diawasi, banyaknya pelaksanaan kegiatan, terbatasnya prasarana dan sarana yang ada serta SDM, membuat upaya yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang optimal.



Saudara-saudara sekalian yang terhormat:

Disinyalir kebakaran hutan dan lahan disebabkan antara lain adanya 1) kesadaran masyarakat pelaku usaha perkebunan untuk melaksanakan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar masih rendah, sehingga seringkali terjadi musibah kebakaran lahan dan/atau kebun; 2) Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran masih sangat terbatas, dan walaupun ada masih belum mampu menjangkau seluruh areal yang ada. 3) Belum semua Perusahaan Perkebunan memiliki Brigade Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.

Terkait dengan permasalahan tersebut maka pemerintah dalam hal ini pemerintah Pusat telah berupaya untuk mengendalikan kebakaran lahan dan kebun melalui regulasi di bidang perkebunan. Regulasi tersebut berupa Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan khususnya pasal 20,21,25 dan 24 yang antara lain menyatakan bahwa pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan yang dikoordinasikan oleh masyarakat dan melibatkan bantuan masyarakat disekitarnya (pasal 20). Selain itu telah pula diterbitkan



Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tanggal 30 Mei 1995 tentang petunjuk teknis pembukaan lahan tanpa pembakaran untuk pengembangan perkebunan, serta pedoman penanggulangan kebakaran di bidang perkebunan.

Dalam implementasinya regulasi tersebut dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha perkebunan yang selektif, sosialisasi Undang-undang perkebunan terkait dengan kebakaran, *law enforcement* dan pelatihan Nasional maupun regional untuk Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pada tingkat pemerintah daerah seperti propinsi Riau misalnya telah membentuk Pusat Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan dengan penanggung jawab Gubernur Riau sedangkan anggota dari instansi terkait.

Pusat ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam rangka pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan justisi kebakaran hutan dan lahan.



Hadirin sekalian,

Demikian Saudara-saudara beberapa isu yang kita hadapi disamping isu-isu lain yang perlu digali untuk dicarikan upaya penanganannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan meridhoi segala upaya kita bersama. Amin.

Pekanbaru, 10 Mei 2006

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN
PADA
KONFERENSI NASIONAL KELAPA VI DI GORONTALO,
16 -18 MEI 2006**

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh,

Yang saya hormati :

Sdr. Gubernur Provinsi Gorontalo

§Para pejabat pusat dan daerah,

§Para pimpinan dan anggota DPRD,

Para Pimpinan organisasi Asosiasi dan Perusahaan swasta,

Para Petani, peneliti, dan akademisi, serta para undangan lainnya,

Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka Konferensi Nasional Kelapa VI yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya merasa sangat berbahagia dapat



hadir untuk kesekian kalinya di Gorontalo, khususnya saat ini pada acara pembukaan Konferensi Nasional Kelapa. Acara konferensi yang diselenggarakan setiap empat tahun adalah untuk pertama kalinya diselenggarakan di wilayah timur Indonesia. Hal ini mencerminkan keinginan kuat pemerintah untuk mendorong berkembangnya agribisnis berbasis kelapa sampai ke pelosok tanah air dalam kerangka revitalisasi pertanian yang digulirkan sejak tahun lalu.

Hadirin yang saya hormati,

Acara ini saya pandang sangat penting, mengingat besarnya potensi ekonomi dan jumlah petani kita yang ekonominya tergantung pada komoditas kelapa, termasuk di Gorontalo. Tema yang dipilih menurut hemat saya adalah sangat relevan dan strategis, yaitu “Revitalisasi Industri Perkelapaan Melalui Pengembangan Produk Kesehatan dan Energi”.

Saya patut memberikan penghargaan secara khusus atas dipilihnya aspek kesehatan sebagai salah satu perhatian utama dalam konferensi ini. Isu kesehatan dengan motto kembali ke alam yang sudah menjadi kecenderungan global,



mahalnya obat-obat kimia, dan masih rendahnya daya beli sebagian besar masyarakat kita, adalah fakta yang mengukuhkan pentingnya pembahasan aspek kesehatan tersebut. Hal ini juga menunjukkan pentingnya pertanian dalam mensejahterakan masyarakat melalui produk kelapa. Kita menyadari bahwa persepsi efek negatif tentang minyak kelapa masih banyak menghinggapi masyarakat kita sebagai akibat kampanye negara-negara lain, khususnya asosiasi produsen minyak kedelai.

Masih terdapat perdebatan dikalangan para ahli tentang hubungan berbagai penyakit darah dan jantung dengan minyak kelapa. Berbagai penelitian di berbagai negara maju mengungkapkan bahwa ternyata minyak kelapa justru memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, walaupun pendapat ini belum konklusif karena pengujian-pengujian secara klinis masih terbatas. Hal ini hendaknya menjadi tantangan bagi dunia penelitian kita. Saya senang mendapat laporan bahwa salah satu pembicara dalam konferensi ini adalah seorang yang berprofesi kedokteran.

Hal lain yang ingin saya sentuh terkait dengan maraknya produksi minyak kelapa murni (VCO). Saya



mendengar bahwa pada saat ini ada lebih dari 300 produsen VCO dengan klaim masing-masing yang terbaik, sehingga justru menyulitkan dalam pengembangan pasarnya. Saya berharap melalui konferensi ini dapat diperoleh persepsi yang sama mengenai standar proses dan mutu VCO yang dihasilkan. Jika dipandang perlu dapat dibentuk suatu tim khusus terpadu untuk menindaklanjuti isu tersebut.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Salah satu persoalan bangsa saat ini dan ke depan adalah penyediaan energi. Kita semua sudah memahami bahwa cadangan energi fosil nasional semakin terbatas sedangkan konsumsi makin meningkat. Sejalan dengan pelaksanaan program pemerintah, maka dapat dipastikan bahwa ekonomi kita juga akan semakin meningkat, yang berarti kebutuhan energi makin meningkat. Oleh karena itu, salah satu program penting pemerintah dalam rangka revitalisasi pertanian adalah pengembangan biofuel termasuk biodiesel dari minyak tumbuh-tumbuhan. Minyak kelapa adalah salah satu sumber biodiesel yang sudah digunakan di berbagai negara seperti Philippina dan negara-negara pasifik.



Secara agregat, potensi kelapa dalam rangka penyediaan biodiesel relatif kecil. Dengan total areal sekitar 3.8 juta hektar dan produktivitas hanya 1.1 ton/ha/th, serta konsumsi kelapa segar sekitar 45 %, maka minyak kelapa yang dapat diubah menjadi biodiesel hanya maksimal sekitar 800.000 ton/tahun. Sudah barang tentu tidak semua kelapa dapat diolah menjadi biodiesel karena industri lain juga membutuhkannya. Akan tetapi perlu dikaji secara mendalam apakah lebih menguntungkan mengekspor minyak kelapa kasar atau memanfaatkannya dalam bentuk biodiesel. Jika minyak kelapa kita dapat diekspor sebagai biodiesel dengan harga relatif tinggi, maka harga kopra di petani bisa ditingkatkan secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian, produktivitas kelapa unggul kita rata-rata 3.0 ton/ha, sedangkan rata-rata petani hanya 1.1 ton/ha/th. Rendahnya produktivitas di tingkat petani tersebut salah satunya berkaitan erat dengan relatif rendahnya harga kopra, sehingga petani tidak mampu melakukan peremajaan dan pemeliharaan tanaman. Meskipun secara agregat peranan minyak kelapa saat ini bagi kebutuhan nasional masih terbatas, perlu dipertimbangkan agar pemanfaatan biodiesel kelapa



diarahkan ke daerah-daerah terisolir atau yang infrastrukturnya terbatas. Di daerah seperti kepulauan, di satu sisi biasanya harga solar sangat mahal, dan di sisi lain harga kopra di lokasi itu biasanya sangat rendah. Saya mendapat informasi bahwa di beberapa lokasi di Kepulauan Sangir Talaud, harga solar bagi nelayan sering mencapai harga Rp 10.000 dan harga kopra biasanya hanya 60 % dari harga di Manado atau Bitung, yaitu sekitar Rp 1200 — Rp 1400/kg. Jika kopra tersebut diolah menjadi biodiesel, maka harga kopra dapat ditingkatkan menjadi Rp 2000 dan harga solar dapat ditekan menjadi Rp 6000. Di samping itu, biodiesel tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan mesin listrik untuk kebutuhan lokal. Di era otonomi daerah saat ini, hal tersebut dapat dijadikan bagian dari implementasi program revitalisasi pertanian di daerah.

Selain kedua aspek tersebut, kelapa masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan menjadi berbagai produk dengan nilai tambah tinggi, hanya saja perlu diperhatikan agar dalam upaya tersebut, petani dapat ikut menikmati nilai tambah, tidak hanya dinikmati oleh pedagang dan industri pengolahan sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini sangat erat kaitannya dengan aspek kelembagaan dan berbagai kebijakan pendukungnya. Kita berharap

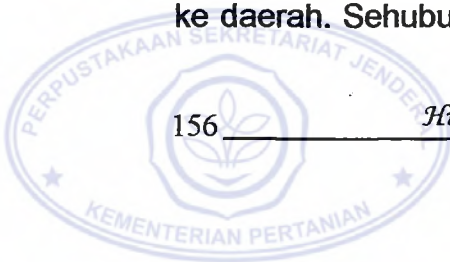


berbagai organisasi yang telah ada seperti Asosiasi Petani Kelapa di pusat dan berbagai daerah.

Forum Komunikasi Perkelapaan Indonesia, Masyarakat Perkelapaan Indonesia, Induk Koperasi Kopra Indonesia, dan kelembagaan petani/keompok tani dapat menyatukan langkah perjuangannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat perkelapaan itu sendiri, khususnya para petani. Seperti halnya pelaksanaan KNK VI ini, Pemerintah siap bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mengemban misi mulia tersebut dalam rangka implementasi Revitalisasi Pertanian, khususnya di sub sektor perkebunan. Tanpa kerja sama dari semua pemangku kepentingan, kita tidak akan sukses dalam mewujudkan kelapa sebagai "Tree of Life".

Hadirin sekalian,

Saya gembira mendengar bahwa salah satu acara dalam konferensi ini adalah Temu Bisnis. Saya harapkan forum tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, khususnya dalam menarik investasi di bidang perkelapaan ke daerah. Sehubungan dengan itu saya berharap:



- (1) Konferensi ini dapat merumuskan berbagai konsep dan saran untuk kita pedomani bersama dalam rangka implementasi revitalisasi di bidang perkelapaan nasional, baik dalam aspek kesehatan dan energi, maupun pengembangan potensi lainnya dari kelapa.
- (2) Konferensi ini dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk menyatukan langkah dan gerak dalam mengarahkan berbagai program yang diperlukan dalam menggerakkan pengembangan lebih jauh produk-produk kesehatan dan energi dari kelapa sehingga diperoleh manfaat semaksimal mungkin, khususnya bagi petani.
- (3) Diharapkan konferensi ini dapat membuka wawasan baru bagi para investor untuk berinvestasi di agribisnis berbasis kelapa yang tersedia di berbagai daerah. Diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan kondisi yang baik bagi investasi tersebut.
- (4) Diharapkan konferensi ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para peneliti nasional untuk memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan dalam pengembangan potensi perkelapaan kita, khususnya produk kesehatan dan energi.



Saudara Gubernur serta hadirin yang berbahagia,

Secara khusus, saya menitipkan kepada Saudara Gubernur kiranya kelapa di Gorontalo ini dapat lebih melambai setelah konferensi ini, seperti halnya saudara mengembangkan jagung. Manfaatkanlah Balai Penelitian Kelapa yang ada di Sulawesi Utara dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang baru saja kita bangun di Gorontalo. Pembangunan BPTP di Gorontalo adalah wujud komitmen Pemerintah untuk mendorong penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi ke seluruh pelosok Tanah Air. Juga kepada para peneliti dan masyarakat agribisnis kelapa, saya menaruh harapan besar kiranya Saudara-saudara dapat bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Ingatlah bahwa banyak petani berharap dari hasil kerja saudara.

Demikian sambutan dan harapan saya, dan dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaannirrohiim, KONFERENSI NASIONAL KELAPA KE VI, secara resmi dibuka.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA
JAMBORE DAN FESTIVAL KARYA PENYULUH
PERTANIAN**

Tegal, 20 Mei 2006

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Saudara Gubernur Jawa Tengah yang kami hormati
Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri
Kelautan dan Perikanan serta Menteri Koperasi dan UKM
yang kami hormati**

**Saudara-saudara Anggota DPR-RI yang kami hormati
Saudara Bupati Tegal yang kami hormati**

Para Penyuluh, petani dan para undangan yang kami hormati,

**Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke
hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan
karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan
yang bersejarah ini dalam keadaan sehat wal'afiat.**



Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara-saudara yang telah memenuhi undangan kami pada acara **JAMBORE DAN FESTIVAL KARMA PENYULUH PERTANIAN** di daerah yang sejuk ini.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sudah hampir satu tahun, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni 2005 yang lalu. Peristiwa tersebut bukan retorika dan ceremonial belaka, namun mempunyai nilai penting dan sangat strategis dalam menggalang komitmen semua unsur pemangku kepentingan (stake holder) disektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

Untuk mendukung RPPK, Departemen Pertanian telah mencanangkan gerakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian pada tanggal 3 Desember 2005 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dan Forum Penyuluhan Pertanian Pedesaan pada tanggal 11 Mar-et 2006 di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat.



Saudara-saudara yang saya hormati,

Departemen Pertanian telah melangkah dalam revitalisasi penyuluhan pertanian antara lain membenahi ketenagaan penyuluh pertanian, kelembagaan penyuluhan pertanian dan membenahi penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta menyediakan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian, dan pada tahun 2006 naik 300% dibanding tahun 2005, ini suatu kepercayaan dan amanah yang harus kita jalankan sebaik--baiknya.

Dari aspek ketenagaan penyuluh pertanian tahun diupayakan untuk mengangkat tenaga honorer sebanyak 3000 orang merupakan formasi daerah pada bulan Februari yang lalu dan Oktober yang akan datang. Kami menyadari masih ada kekecewaan dalam mekanisme pengangkatan tenaga honorer ini. Insya Allah, sedikit demi sedikit mulai kita perbaiki. Data terakhir jumlah Penyuluh Pertanian diseluruh Indonesia adalah 28.212 orang, sedangkan jumlah desa saat ini tercatat 62.806 Desa. Jika setiap desa, kita tugaskan satu orang Penyuluh Pertanian, kita masih membutuhkan 34.594 orang Penyuluh Pertanian.



Dari segi kualitas Penyuluh Pertanian akan kita tingkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang lebih profesional. Kita menyadari tanpa profesional akan sulit membangun petani yang kreatif, inovatif, dan kredibel. Petani yang memiliki karakter seperti itulah yang akan mampu bersaing di era globalisasi. Petani-petani yang memenuhi karakter tersebut dicirikan dengan memiliki keunggulan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, IPTEK, organisasi, manajer, kepemimpinan, dan keunggulan di bidang permodalan. Keunggulan-keunggulan tersebut dapat dibangun apabila terjadi interaksi antara petani dengan Penyuluh Pertanian. Tentunya interaksi yang sistematis, berkelanjutan dan berprogram.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dan aspek kelembagaan penyuluhan pertanian saat ini kita sangat prihatin. Banyak kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sudah tidak berfungsi lagi. Hal tersebut terjadi karena banyak pihak-pihak yang tidak memahami arti penting dari kelembagaan penyuluhan pertanian. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan suatu



yang sangat esensial dalam pemberdayaan masyarakat petani, terutama dalam menciptakan dan meraih peluang dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi petani.

Keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di pedesaan dapat menjadi pendorong semangat petani. Selain itu, keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian dapat menumbuhkan kepercayaan diri Penyuluh Pertanian, tempat penyuluh berkreasi, berinovasi, berorganisasi dan sebagai sumber informasi dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis di pedesaan. Melalui lembaga penyuluhan pertanian ini juga akan tumbuh dan berkembangnya kemandirian petani sebagai subyek dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Kedepan kami merencanakan dibentuknya kelembagaan penyuluhan pertanian yang mandiri. Pada Tingkat Provinsi akan dibentuk Badan Penyuluhan Pertanian Provinsi, pada tingkat Kabupaten/Kota Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota dan pada tingkat Kecamatan akan dihidupkan kembali Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Rencana tersebut telah dituangkan dalam RUU Penyuluhan Pertanian.



Saudara-saudara yang saya hormati,

Dari aspek penyelenggaraan penyuluhan telah terjadi adanya penurunan gairah kerja para Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Menurunnya motivasi para Penyuluh Pertanian sebagai akibat dari rendahnya insentif yang diterima para Penyuluh Pertanian dan ketidakpastian masa depan para Penyuluh Pertanian. Mulai tahun 2006 akan dibangkitkan dan digerakkan semangat para Penyuluh Pertanian dimulai dari penyusunan program penyuluhan pertanian bersama-sama petani, pemberian biaya operasional para Penyuluh Pertanian yang besarnya lumayan yaitu Rp. 250.000.- per orang per bulan.

Disamping itu, kita sediakan biaya-biaya untuk pembinaan bagi kelompok tani, biaya untuk berlangganan tabloid sinar tani, biaya-biaya untuk aktivitas di BPP, dan lain-lain. Dana tersebut merupakan pancingan dan diharapkan adanya penyediaan yang lebih besar lagi dari Saudara-saudara Gubernur dan Bupati/Walikota demi terselenggaranya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah Saudara saudara. Departemen Pertanian menyadari bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada saat ini dirasakan masih belum dapat memberikan dukungan yang



optimal untuk peningkatan kesejahteraan petani. Belum adanya kesatuan persepsi dan kesatuan gerak diantara para penyelenggarannya, baik di pusat maupun di daerah, termasuk di pedesaan maupun ditingkat lapangan. Secara psikologis hal ini sangat mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Mengantisipasi terjadinya penurunan kinerja penyuluh pertanian diperlukan informasi, bimbingan, pembinaan dan pengorganisasian yang aktual dan terus menerus, salah satunya melalui Jambore dan Festival Karya Penyuluh Pertanian.

Pada kesempatan ini penyuluh pertanian dari seluruh Indonesia, berkumpul saling tukar pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan penyuluhan pertanian.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Kita sekarang membangkitkan kembali peran penyuluh melalui berbagai upaya salah satunya yaitu Jambore dan Festival Penyuluh Pertanian dengan tema



“Penyuluh Pertanian Bangkit” merupakan tema yang diharapkan dapat membangkitkan motivasi kerja para penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.

Kita sering mendengar bahwa petani merindukan kehadiran para penyuluh pertanian berada ditengah-tengah kehidupan petani. Dari pengalaman dan perjalanan yang saya ikuti dalam kegiatan Forum Penyuluhan Pertanian Pedesaan di beberapa daerah paling tidak ada 3 (tiga) hal penting yang perlu menetapkan perhatian kita bersama, yaitu ;

1. Kelembagaan Petani

Kita mendapatkan kesulitan membangun pertanian tanpa menata “Struktur Masyarakat” dalam wadah kelompok tani dan Gabungan kelompok tani. Dengan ditumbuhkembangkan kelompok tani yang beranggotakan 20-25 orang petani dan gabungan kelompok tani yang terdiri dari 20-25 kelompok tani akan memudahkan dalam proses pembinaan oleh para penyuluh atau kelompok dapat dijadikan sebagai kelas belajar dan mengajar dalam mengadopsi inovasi. Melalui kelompok tani akan memperkuat posisi tawar petani, para petani akan dapat membeli bersama sarana produksi pertanian lebih murah



dan akan menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih baik. Usaha tani secara berkelompok akan lebih efisien dibandingkan dengan usaha secara sendiri-sendiri yang luasnya relatif kecil. Berbagai pengalaman telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa peran penyuluh pertanian dalam mengembangkan kelompok tani ternyata berhasil membangun interaksi antara petani maju dengan petani lainnya.

2. Informasi dan Komunikasi

Terjadinya kemandegan arus informasi kepada petani dan menurunnya komunikasi antara penyuluh dengan petani berakibat pada terjadinya ketidakberdayaan petani ketika dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan petani seperti halnya informasi pasar, harga pupuk, dan lain lain. Kondisi tersebut sebagai akibat kurang berfungsinya peran penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian.

3. Permodalan

Para Petani masih sering dihadapkan pada lemahnya permodalan sehingga tidak mampu menerapkan teknologi sesuai anjuran. Disamping itu, mereka tidak mampu menjual panennya karena tidak memiliki dana yang cukup.



Saudara-saudara yang kami hormati,

Ditengah-tengah kita hadir Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan. Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Koperasi dan UKM, Departemen yang sangat besar perannya bagi sektor pertanian. Hadir pula para pakar penyuluhan pertanian dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat dari Komisi IV-DPR RI. Begitu besar perhatian para anggota dewan ini terhadap Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, saat ini sedang digulirkan inisiatif DPR untuk melahirkan Undang undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah punya Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dengan lahirnya payung hukum UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Insya Allah Penyuluhan akan semakin berkembang baik.

Disamping itu, kami juga sedang berupaya bersama DPR-RI menyediakan dana talangan bagi para petani. Program LUEP terus kita kembangkan sehingga dapat menolong para petani dan tekanan para tengkulak.



Saudara-saudara yang kami hormati,

Akhirnya pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara-saudara pada acara Jambore dan Festival Karya Penyuluhan Pertanian yang pertama ini. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan semangat bagi penyuluh pertanian yang bertugas sebagai mitra petani. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan dan diridhoi Allah SWT.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmaanirrahiim” saya resmikan “Jambore dan Festival Karya Penyuluh Pertanian”

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tegal, 20 Mei 2006

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN**

Pada acara

**KUNJUNGAN KERJA KE PENGOLAH KOPI KINTAMANI,
KABUPATEN BANGLI PROPINSI BALI**

Tanggal. 1 JUNI 2006

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

- **Yang terhormat Saudara Gubernur Propinsi Bali**
- **Yang terhormat Direktur Jenderal Lingkup Departemen Pertanian**
- **Yang terhormat Bupati Kabupaten Bangli**
- **Yang terhormat Direktur Lingkup Departemen Pertanian**
- **Yang terhormat Saudara Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bali,**
- **Yang terhormat Saudara Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli**
- **Para undangan serta hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini



di Kintamani, Kabupaten Bangli Bali suatu tempat yang begitu indah, dingin, damai dan sangat ramah serta bersahabat baik penghuninya maupun alamnya dalam suasana sehat wal'afiat

Hadirin yang kami hormati,

Revitalisasi Pertanian. yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat dimaksudkan untuk memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja Pertanian dalam pembangunan nasional. Revitalisasi ini dimaksudkan untuk menggalang komitmen dan kerjasama seluruh stakeholders. Oleh karena itu usaha Pertanian harus terintegrasi dengan pengembangan industrinya baik industri hulu maupun hilir. Sebagian besar dan rencana dan program revitalisasi Pertanian terkait erat dengan pengembangan subsistem pengolahan pemasaran hasil Pertanian.

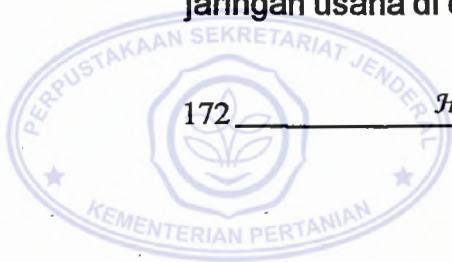
Hal ini antara lain disebabkan setelah sekian lama pembangunan Pertanian berjalan. Pengembangan subsistem ini teramat tertinggal dibandingkan subsistem lainnya. Aplikasi secara nyata adalah rendahnya mutu produk yang dihasilkan. Hilangnya perolehan nilai tambah yang seharusnya dapat



diraih dan melemahnya daya saing produk di pasar internasional. Pada akhirnya, lemahnya dukungan hilir ini akan berdampak pada sulitnya peningkatan pendapatan petani.

Peningkatan nilai tambah bagi petani pekebun diupayakan melalui penerapan teknologi pengolahan hasil untuk menghasilkan produk turunan atau produk samping yang disertai dengan membangun kerjasama kemitraan dengan para pemasar hasil. Hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya preferensi konsumen yang menuntut permintaan atribut produk olahan perkebunan yang semakin rinci, beragam dan bermutu serta tersedia setiap waktu. Selama ini nilai tambah sebagian besar dinikmati oleh pedagang dan pengolah.

Unit pengolahan hasil akan dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing disamping membangun mental-mental petani pekebun agar berbudaya industri melalui pelatihan. Pembangunan kerjasama kemitraan antara unit pengolahan dengan para pemasar untuk menyalurkan hasil olahan perlu didorong terus agar terjadi jaringan usaha di dalam subsistem agribisnis di pedesaan.



Dengan berkembangnya UPH di desa, maka desa tersebut diharapkan akan tumbuh menjadi desa agroindustri yang akan merupakan pusat usaha ekonomi pedesaan.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Propinsi Bali adalah salah satu wilayah di Indonesia yang begitu cepat pertumbuhan pembangunannya terutama di bidang pariwisata. Pertumbuhan sektor pariwisata yang begitu pesat di wilayah ini, sebenarnya merupakan peluang yang cukup besar bagi pengembangan usaha agribisnis perkebunan terutama pada industri pengolahannya. Hal ini sangat dimungkinkan karena sektor pariwisata dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemasaran bagi produk-produk potensial hasil olahan dari usaha agribisnis perkebunan seperti kopi.

Sektor pariwisata pada umumnya memerlukan dukungan produk-produk olahan untuk konsumsi yang mempunyai kualitas baik dan aman dikonsumsi serta produk olahan yang bervariasi/beragam. Untuk memperoleh produk-produk olahan yang diinginkan tersebut diperlukan pemanfaatan sarana pengolahan/unit pengolahan sebagai



salah satu faktor yang penting. Kalau upaya-upaya seperti ini tidak segera ditangani, maka sektor pariwisata yang begitu berkembang di wilayah ini akan tetap mendatangkan produk di maksud baik dari luar wilayah Bali maupun impor dari negara lain. Kondisi demikian jelas tidak akan kondusif bagi para petani pekebun untuk lebih meningkatkan produktivitas maupun perluasan usahanya.

Hadirin Yang Saya Hormati,

Tanaman kopi Propinsi Bali termasuk komoditi unggulan perkebunan, pada tahun 2003 luas tanaman kopi mencapai 37.003 ha dan produksi mencapai 19.449 ton. Walaupun Bali bukan propinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia tetapi upaya penumbuhan akan industri ini merupakan langkah strategis yang ditempuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Melihat potensi sumber daya alam dan kemampuan petani untuk mengembangkan tanaman kopi yang setiap tahunnya mengalarni peningkatan, maka upaya untuk



perbaikan proses produksi yang semula hanya menghasilkan biji kopi beras (ose) dipadukan dengan pengembangan produksi turunan adalah tepat. Hal ini dapat dicapai dengan pendekatan secara berkelompok membentuk kelembagaan tani yang kuat dan menggandeng eksportir untuk membangun dan mendorong penumbuhan desa agroindustri berbasis kopi.

Sasaran pengolahan berkelompok adalah kepastian produksi baik secara kuantitatif dan kualitatif dan kemudian diikuti dengan upaya pengolahan untuk peningkatan nilai tambah melalui pengolahan biji kopi menjadi berbagai produk terutama antara lain kopi bubuk, permen kopi dan lain-lain. Kedepan pengembangan kopi bubuk agar diarahkan untuk pasar dalam negeri atau pasar ekspor, khususnya untuk mengisi pasar ceruk (*niche market*) agar para petani dapat memperoleh harga jual yang relatif lebih baik dan stabil. Produk kopi Bali perlu diarahkan untuk menghasilkan produk khas misalnya kopi Arabika yang memiliki mutu prima dengan cita rasa dan unik untuk meraih keunggulan kompetitif seperti *specialty coffee organic coffee* dan *ethnic coffee* agar dapat menetrasi segmen pasar ceruk. Untuk itu perlu membangun *Brand Images* kopi Bali dengan menggunakan logo Bali yang



sudah terkenal “Bali Coffee”.

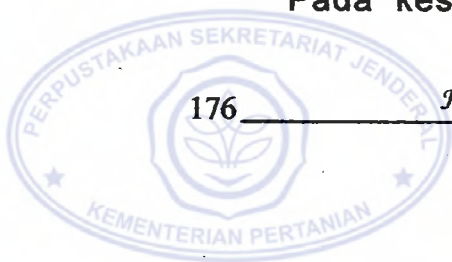
Saya tahu bahwa Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten penghasil kopi terbesar yang terdapat di Bali dengan luas wilayah 52.081.5 Ha serta jumlah penduduk 211 186 orang. Sedangkan luas wilayah yang digunakan untuk lahan pertanian adalah 34 114 Ha.

Pada umumnya varietas kopi yang banyak berkembang di Kabupaten Bangli adalah kopi Arabika karena memang Kabupaten Bangli mempunyai ketinggian antara 1 000 - 1.750 meter dan permukaan laut dan merupakan daerah yang sangat cocok dan berpotensi untuk pengembangan kopi Arabika.

Potensi ini tentu akan bertambah sempurna apabila kopi dapat diintegrasikan dengan ternak sehingga kulit kopi dapat dijadikan campuran makanan ternak dan kotoran dan air seni ternak dapat diolah menjadi biogas atau pupuk tanaman kopi, jeruk dan lain-lain.

Saudara - saudara Yang Berbahagia,

Pada kesempatan yang baik ini saya ingin



mengucapkan terimakasih kepada Saudara Gubernur Propinsi Bali, Bupati Kabupaten Bangli, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Bali beserta staf, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli beserta staf dan saya berharap agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menggali informasi dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam upaya kita mewujudkan pembangunan pertanian yang efisien, produktif dan berkelanjutan, melalui success story yang telah diraih oleh pola dampingan bermediasi, masyarakat kopi di Subak Abian Mabi, Desa Catur, Kecamatan Kintamani ini dapat berkembang lebih baik lagi dan dapat direplikasikan ke daerah lain.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA FORUM KOMUNIKASI STATISTIK DAN
SISTEM INFORMASI PERTANIAN
DI HOTEL SAHID RAYA BALI**

Denpasar, 31 Mei – 2 Juni 2006

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang terhormat:

1. Saudara Gubernur Propinsi Bali,
2. Saudara-Saudara Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian,
3. Saudara Drs. Made Urif, Anggota Komisi IV DPR RI,
4. Saudara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS),
5. Saudara-Saudara Pejabat Eselon II lingkup Departemen Pertanian dan BPS,
6. Saudara-Saudara Kepala Dinas lingkup Pertanian Propinsi seluruh Indonesia,
7. Saudara-Saudara Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten di Propinsi Bali,
8. Para undangan Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi Pertanian,



Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, bahwa kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama pada acara Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2006 di Hotel Sahid Raya Bali, dalam keadaan sehat wal'afiat, senantiasa dalam perlindungan dan rahmatNya sehingga memungkinkan terselenggaranya Forum ini.

Atas nama pimpinan Departemen Pertanian, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia, para peserta Forum dan para narasumber atas kerjasamanya dan terselenggaranya Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2006 yang dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan lusa.

Saya berharap pada forum ini peserta dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan penyelenggaraan statistik dan sistem informasi pertanian tahun 2006 dan 2007, sehingga upaya kita untuk meningkatkan kualitas data dan sistem informasi pertanian dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan pembangunan pertanian dapat terus dilakukan.



Saudara-Saudara yang saya hormati,

Menyadari pentingnya peranan data dan informasi pertanian sebagai unsur yang strategis dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Pertanian, maka dipandang perlu agar pengelolaan data dan informasi pertanian disinkronkan dan diintegrasikan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat. Mekanisme pengumpulan data secara berjenjang mulai dari pengumpulan data di kecamatan dikirim ke kabupaten selanjutnya diteruskan ke propinsi dan pusat, agar secara regular dievaluasi dan diperbaiki sehingga kualitas data pertanian dari waktu ke waktu dapat ditingkatkan.

Kenyataan yang terjadi pada masa transisi saat ini, dari pengelola data dan informasi pertanian masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Aliran data belum lancar seperti yang diharapkan. Masih terdapat berbagai kendala dalam menyampaikan laporan berkala ke propinsi yang menyebabkan penyampaian data sering terlambat. Akibatnya agregasi data pertanian tidak dapat dikompilasi di tingkat pusat secara tepat waktu. Hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan



pembangunan pertanian. Kendala dan permasalahan dimaksud antara lain adalah: (1) masih lemahnya metodologi pengumpulan data untuk masing-masing sub sektor, (2) lemahnya kelembagaan penyelenggara statistik pertanian di daerah, (3) belum memadainya sarana pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data & informasi pertanian, (4) masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian khususnya yang menangani data pertanian, (5) rendahnya alokasi dana untuk kegiatan statistik dan sistem informasi pertanian serta terbatasnya insentif bagi petugas pengumpul data masing-masing sub sektor.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam pengelolaan data dan sistem informasi pertanian tersebut, Departemen Pertanian telah melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), LAPAN serta Dinas lingkup Pertanian. Dengan berbagai instansi tersebut telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan metodologi pengumpulan data tanaman pangan dan hortikultura dengan memanfaatkan teknologi komunikasi data



secara elektronik melalui fasilitas internet dan pemanfaatan data citra satelit. Sedangkan untuk komoditi peternakan telah dilakukan pengembangan metode untuk estimasi data populasi di tingkat kabupaten dan monitoring pemotongan hewan di pasar melalui pencacahan lengkap. Perbaikan dan penyempurnaan metodologi pengumpulan data perkebunan telah dilaksanakan kerjasama dengan BPS dan Dinas Perkebunan untuk melakukan estimasi data produktivitas komoditi perkebunan rakyat.

Berbagai peralatan yang diperlukan oleh petugas pengumpul data juga telah dilengkapi seperti alat ubinan, timbangan, alat pengukur kadar air, dan kalkulator. Disamping itu, guna memberikan apresiasi dan motivasi berprestasi kepada para petugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan pengumpulan data pertanian diberikan insentif secara berkala disamping pelatihan statistik atau refreshing tentang metoda pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pertanian.

Dari sisi dukungan anggaran telah pula dialokasikan dana untuk perbaikan dan penyempurnaan metodologi pengumpulan data pertanian termasuk peningkatan kualitas



petugas pengumpul dan pengolah data di tingkat kabupaten, propinsi dan mantri tani selaku ujung tombak pengumpul data di tingkat kecamatan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah dilatih 5.800 mantri tani/KCD dan mantri statistik/KSK tentang pengumpulan dan pengolahan data/statistik pertanian di tingkat kecamatan.

Pada kegiatan lainnya, melalui proyek pengembangan sistem ***“Land Use Data Management (LUDM)”*** telah dibangun basis data penggunaan lahan pertanian, sistem entri dan pelaporan data terpadu menggunakan formulir elektronik (e-Form) berbasis web menggunakan fasilitas Internet. Kegiatan ini diharapkan akan memperkuat dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data dan informasi pertanian di tingkat kabupaten, propinsi, dan pusat. Fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh jajaran Departemen Pertanian, Dinas terkait di daerah, dan para pengguna data lainnya seperti petani, kelompok tani, serta masyarakat luas lainnya.



Saudara-Saudara sekalian yang berbahagia,

Tidak kalah pentingnya dukungan teknologi informasi dalam bidang pertanian. Sistem Informasi Pertanian, yang terus dikembangkan oleh Departemen Pertanian harus mampu mendukung kebutuhan informasi bagi pemerintah, petani/swasta dan pelaku usahatani lainnya dalam pembangunan pertanian secara menyeluruh.

Bagi petani, informasi yang disampaikan harus mampu membimbing kapan sebaiknya petani menanam, dan dalam kondisi mana sebaiknya petani mulai melaksanakan pemupukannya. Petani juga sangat memerlukan informasi dimana mereka bisa memperoleh sarana produksi dan dengan harga berapa, serta kemana mereka harus menjual produksinya dan dengan harga berapa. Para pelaku usahatani juga sangat memerlukan informasi daerah-daerah yang akan panen dan dalam jumlah berapa, daerah-daerah mana yang kekurangan stock dan daerah-daerah mana yang kelebihan stock. Dengan cara ini para petani ataupun pelaku usahatani mempunyai banyak pilihan dan pertimbangan sebelum membuat suatu keputusan menjual ataupun membeli. Dengan demikian, maka pengembangan sistem



usahatani mutlak memerlukan informasi yang sangat cepat, akurat, dan dinamis.

Melihat potensi telepon seluler yang pertumbuhannya sangat tinggi, dimana pengguna telepon seluler jauh melebihi pengguna Internet yang lambat laun pasti akan mencapai daerah pedesaan, saya berkeyakinan bahwa sarana ini punya potensi yang besar untuk dijadikan sebagai sarana komunikasi data dan informasi pertanian. Bagi petani ataupun usahatani, telepon seluler ini dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi agribisnis seperti harga komoditi dan harga-harga sarana produksi dari pasar-pasar yang ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia.

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan permasalahan atau berkonsultasi tentang seluk beluk pertanian dapat memanfaatkan fasilitas SMS dan mengirimkan hal tersebut melalui **Nomor SMS Center Departemen Pertanian adalah 0813 8 303 4444**, demikian pula halnya para petugas pelayanan informasi pasar yang ada di dinas-dinas pertanian dapat menyampaikan atau mengirim data/informasi pertanian seperti harga komoditi, luas tanam, luas panen, dan lain-lain langsung ke dalam server komputer



di pusat melalui SMS Center Deptan. Untuk melakukan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun untuk keperluan perencanaan pembangunan pertanian, diperlukan berbagai jenis data untuk keempat sub-sektor terutama data produksi, produktivitas serta harga. Khusus yang berkaitan dengan usaha peningkatan pendapatan dan taraf hidup rumah tangga pertanian, diperlukan data mengenai pendapatan/penerimaan rumah tangga yang berusaha di sektor pertanian, penguasaan dan penggunaan lahan dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga pertanian.

Dalam rangka menyusun perencanaan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan petani, diperlukan adanya kegiatan untuk membangun basis data profil rumah tangga pertanian yang rinci, khususnya yang berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi rumah tangga pertanian, tingkat pendapatan beserta strukturnya tidak saja di tingkat kabupaten dan propinsi tetapi juga di tingkat kecamatan. Untuk data pendukung saya mengharapkan agar juga dilengkapi dengan data kelembagaan dan data infrastruktur yang terkait dengan pembangunan pertanian.

Para peserta Forum yang saya hormati,

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas pada kesempatan ini saya ingin menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembagian kewenangan dan tugas serta kerjasama yang lebih cepat dalam penyelenggaraan statistik dan sistem informasi pertanian antara berbagai institusi baik di pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota.
2. Dalam rangka pemberdayaan dan penguatan kelembagaan unit data dan sistem informasi pertanian, diperlukan adanya dukungan baik dari pimpinan eksekutif, seperti para Gubernur, para Bupati/Walikota, para Kepala Dinas lingkup Pertanian maupun legislatif, terhadap keberlangsungan kelembagaan unit data dan sistem informasi tersebut di jajaran unit instansi daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Propinsi.
3. Guna mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan data di tingkat pusat dan daerah, kiranya dapat dialokasikan anggaran yang cukup memadai untuk kegiatan perstatistikan dan sistem informasi melalui dana dekonsentrasi maupun APBD I dan APBD II, termasuk



- anggaran untuk tambahan insentif bagi para petugas pengumpul data di tingkat kecamatan, kabupaten/kotamadya dan propinsi secara berkala dan berkelanjutan.
4. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas para pengelola data diharapkan adanya upaya untuk peningkatan sarana/prasarana yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pertanian, termasuk peningkatan fasilitas teknologi informasi dan pengembangan website di unit kerja masing-masing.
 5. Guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia diharapkan adanya kegiatan pelatihan statistik dan komputer secara berkelanjutan bagi petugas statistik di tingkat kecamatan (Mantri Tani/KCD, Mantri Kebun, Mantri Kehewan dan Mantri Statistik/KSK), tingkat kabupaten/kotamadya dan propinsi;

Para peserta Forum yang saya hormati,

Demikian sambutan saya secara umum, mudah-mudahan beberapa masukan tersebut di atas dapat dibahas dan diperoleh alternatif pemecahan untuk berbagai masalah yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas data dan statistik pertanian untuk mendukung program pembangunan



pertanian di masa mendatang.

Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima
kasih dan selamat berdiskusi.

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
TANAM PERDANA PENGEMBANGAN JERUK**

Dekonina, Solok Selatan, 3 Juni 2006

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Yang terhormat

- Gubernur Propinsi Sumatera Barat
- Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat
- Bupati Kabupaten Solok Selatan
- Muspida Propinsi Sumatera Barat dan kabupaten Solok Selatan
- Para Pejabat Lingkup Departemen Pertanian

Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara **Tanam Perdana Pengembangan Jeruk** di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.



Saya sangat menghargai prakarsa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok Selatan beserta jajarannya yang telah berupaya mengembangkan agribisnis jeruk di wilayah ini. Dari sisi agronomis daerah ini memang memiliki kondisi agroklimat yang sesuai dan di masa lalu merupakan salah satu daerah sentra produksi jeruk Keprok Kacang.

Hadirin yang terhormat,

Program revitalisasi pertanian pada dasarnya merupakan usaha mendayagunakan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian rakyat melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan devisa negara. "Terkait dengan hal tersebut, pengembangan jeruk merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan, karena di antara berbagai komoditas pertanian, jeruk termasuk komoditas buah yang cepat menghasilkan, dan dapat memberi keuntungan yang cukup menjanjikan. Selain itu, secara teknik pengusahaan jeruk dapat dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, banyak tenaga kerja yang dapat berpartisipasi didalamnya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan agribisnis jeruk dapat dilakukan sejak kegiatan budidaya, penanganan



panen dan pasca panen, distribusi dan transportasi, hingga pada aspek pemasaran.

Hadirin sekalian,

Ditinjau dari sisi peluang usaha, prospek agribisnis jeruk masih terbuka luas. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya konsumsi buah-buahan bagi kesehatan, peningkatan kesejahteraan, serta peningkatan jumlah penduduk.

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu dari sedikit daerah yang sesuai untuk pengembangan jeruk karena memiliki kondisi agroklimat yang sesuai untuk kebutuhan jeruk keprok. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki oleh kabupaten Solok Selatan ini hendaknya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani jeruk dan menjawab peralihan selera konsumen, terutama di kota-kota besar, yang semakin menyukai jeruk Mandarin atau yang di Indonesia dikenal dengan jeruk Keprok

Dengan potensi yang dimiliki, saya berharap hendaknya pengembangan jeruk tidak hanya untuk meningkatkan produksi, namun lebih diarahkan pada upaya



peningkatan mutu buah yang dihasilkan agar lebih memiliki daya saing baik di pasar domestik maupun di pasar global, serta dapat mendukung program substitusi impor jeruk Mandarin. Upaya peningkatan mutu dan daya saing ini dapat dilakukan dengan penerapan GAP dan SOP spesifik lokasi yang dalam penerapannya di lapangan memerlukan pendampingan dari petugas yang ahli di bidangnya.

Hadirin yang berbahagia,

Terkait dengan kondisi, maka dalam pengembangan jeruk di Kabupaten Solok Selatan ini, peran aktif dan profesionalitas petugas sangat diperlukan. Untuk itu, dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik petani maupun petugas, penguatan kelembagaan petani, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta inisiasi aksesibilitas permodalan merupakan hal yang selayaknya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini penyediaan infrastuktur pendukung, penyampaian teknologi terapan, serta promosi dan pemasaran akan sangat diperlukan. Dengan demikian terjadi suatu kesatuan

utuh antara masyarakat dan pemerintah untuk menghasilkan produk bermutu sesuai dengan keinginan masyarakat konsumen sehingga tujuan revitalisasi pertanian akan tercapai.

Era perdagangan Global yang terjadi pada saat ini berdampak pada berbagai aspek. Pada sistim perdagangan ini terjadi perdagangan antar negara seolah tanpa batas dan kecenderungan terjadi peralihan dari hambatan tarif menjadi hambatan teknis. Konsekuensi dari kondisi ini, petani Indonesia seolah-olah berhadapan langsung dengan petani dari luar negeri yang pada umumnya telah menerapkan teknologi maju dan mengelola usahatannya secara efisien. Lebih lanjut terjadinya perubahan selera konsumen pada segmen pasa tertentu yang menghendaki buah bermutu, aman konsumsi dan memiliki cita rasa yang khas, telah mendorong meningkatnya volume impor jeruk, khususnya jeruk mandarin.

Mengantisipasi peningkatan produksi yang akan dihasilkan dengan memperhatikan daerah pesaing serta daerah tujuan pemasaran, tentunya harus segera dipersiapkan sistem distribusi dan pemasaran dari jeruk yang



akan dihasilkan. Penerapan teknologi untuk mengatur masa panen akan sangat bermanfaat untuk menjaga kontinuitas pasokan dan stabilisasi harga serta menciptakan nilai tambah yang dapat dinikmati petani.

Hadirin yang berbahagia,

Saya mengharapkan agar pengembangan jeruk di kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan memperhatikan selera konsumen, melibatkan seluruh stakeholder terkait, dapat memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus dapat mendukung usaha substitusi impor jeruk Mandarin. Semoga Allah SWT meridhoi, melindungi dan memberi petunjuk atas segala usaha yang kita lakukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN RI
PADA ACARA
PANEN PADI PERDANA DI KABUPATEN SOLOK,
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Tanggal, 4 Juni 2006

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati,

- Gubernur Sumatera Barat.
- Bupati, Ketua DPRD dan Muspida Kabupaten Solok.
- Para Pejabat Eselon I dan II, baik dari Pusat maupun Daerah.
- Bapak/ibu para tokoh masyarakat, alim ulama, pengurus-KTNA, penyuluh pertanian, Para peneliti, para petani, stakeholder serta para hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya kita bertemu di dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga



kita mampu membangun sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Saudara- saudara sekalian yang saya hormati,

Kita patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa produksi padi tahun 2005 mencapai lebih dari 54 juta ton GKG atau setara dengan 30,61 juta ton beras, suatu pencapaian yang cukup menggembirakan. Dengan produksi ini sebenarnya kita sudah dapat memenuhi kebutuhan beras dalam negeri dengan surplus produksi beras 16.224 ton. Sedangkan produksi padi tahun 2006 berdasarkan ARAM I BPS mencapai 54,25 juta ton GKG. Walaupun produksi ini masih dibawah sasaran, saya berharap dengan kerja keras kita semua produksi padi tahun 2006 dapat mencapai sasaran yang diharapkan yaitu 54,86 juta ton GKG, sehingga kemandirian pangan khususnya beras dapat kita pertahankan.

Saudara-Saudara yang saya hormati

Pada saat ini kita telah memasuki musim tanam 2006 yang merupakan pertanaman yang sangat penting karena



memberikan kontribusi sekitar 30 35 % terhadap produksi padi tahun 2006. Oleh karena itu, pemerintah bersama Pemda akan terus mendorong agar para petani segera melaksanakan pengolahan tanah melakukan penanaman bila kondisi sawah sudah memungkinkan. Namun demikian, disamping kesiapan para petani maka yang tidak kalah penting adalah (1) kesiapan benih; diharapkan petani menggunakan benih unggul produksi tinggi dan berlabel ini terus ditingkatkan melalui sosialisasi, demonstrasi lapang dan cara-cara diseminasi teknologi lainnya, sehingga dalam beberapa tahun kedepan semua petani sudah menggunakan benih unggul berlabel. (2) Pupuk; dimana saat ini pemerintah memberikan subsidi untuk beberapa jenis pupuk yaitu: urea, SP-36, ZA dan NPK Phonska akan tetap dipertahankan, sehingga dapat meringankan petani dalam memenuhi sarana produksinya.

Saya berharap pupuk ini tersedia di kios tingkat desa maupun kecamatan sesuai prinsip 6 tepat yaitu jumlah, waktu, tempat harga, jenis dan mutu. Khusus kaitannya dengan penggunaan pupuk kimia di beberapa daerah terdapat kecenderungan penggunaannya berlebihan. Untuk itu dalam rangka efisiensi penggunaan pupuk, pemerintah telah



mengeluarkan rekomendasi pemupukan N, P dan K setiap kecamatan di propinsi-propinsi penghasil utama padi. Disamping itu berbagai peralatan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pemupukan seperti Bagan Warna Daun (BWD) dan Soil Test Kit telah disediakan sehingga perlu dioptimalkan penggunaannya dan terus disosialisasikan kepada para petani. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan akan pupuk kimia sudah saatnya petani mulai menggunakan pupuk organik karena bahan pupuk organik mudah didapat disamping itu pupuk ini dapat memperbaharui sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian kita adalah masalah penyediaan air dan perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan OPT (organisme pengganggu tanaman) serta dampak anomali iklim seperti banjir dan kekeringan.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Pemerintah menyadari betul bahwa pelaku utama pembangunan pertanian adalah petani. Oleh karena itu sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah kepada para



petani, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani seperti pemberian subsidi pupuk dan benih, penyediaan modal kerja perbaikan pengairan dan jalan-jalan desa, bantuan peralatan pertanian, penetapan harga pemerintah untuk gabah maupun beras dan lain-lain. Ini semua dimaksudkan agar petani memperoleh kemudahan dalam mendapatkan sarana produksi sekaligus mengurangi biaya produksi sehingga diperoleh produktivitas yang maksimal.

Disamping itu ditetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras, diharapkan para petani memperoleh keuntungan yang wajar dalam berusaha tani.

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada petani maka pada tahun 2006 pemerintah masih menyediakan subsidi untuk pupuk, benih dan bunga kredit ketahanan pangan (KKP) serta menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) baik untuk gabah maupun beras melalui Inpres No.13 tahun 2005. Dalam merencanakan kebutuhan riil untuk subsidi, serta mencegah terjadinya perembesan ke sektor lain, maka kelompok tani diharapkan mengajukan



kebutuhan pupuknya berdasarkan pada Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sejalan dengan itu pemerintah melalui program revitalisasi penyuluhan berupaya meningkatkan peranan penyuluhan dan sekaligus lebih memberdayakan kelompok tani.

Beberapa daerah terdapat kecenderungan penggunaannya berlebihan. Untuk itu dalam rangka efisiensi penggunaan pupuk, pemerintah telah mengeluarkan rekomendasi pemupukan N, P dan K setiap kecamatan di propinsi-propinsi penghasil utama padi. Disamping itu berbagai peralatan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pemupukan seperti Bagan Warna Daun (BWD) dan Soil Test Kit telah disediakan sehingga perlu dioptimalkan penggunaannya dan terus disosialisasikan kepada para petani.

Saudara- saudara sekalian yang saya hormati,

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada petani maka pada tahun 2006 pemerintah masih menyediakan subsidi untuk pupuk, benih dan bunga Kredit Ketahanan Pangan (KKP) serta menaikkan harga pembelian



pemerintah (HPP) baik untuk gabah maupun beras melalui Inpres No 13 tahun 2005. Dalam merencanakan kebutuhan riil pupuk bersubsidi, serta mencegah terjadinya perembesan ke sektor lain, maka kelompok tani di harapkan mengajukan kebutuhan pupuk berdasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Sejalan dengan itu pemerintah melalui program revitalisasi penyuluhan berupaya meningkatkan peranan penyuluhan dan sekaligus lebih memberdayakan kelompok tani.

Saudara - saudara sekalian yang saya hormati,

Kunjungan kerja saya ke Sumatera Barat saat ini selain untuk melakukan panen padi di Kelompok Tani Sawah Pinang dan Kelompok Tani Harapan Jaya Kenagarian Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, alhamdulillah kemarin saya juga telah melakukan tanam perdana jeruk dan sekaligus melakukan temu wicara dengan petani dan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan.



Saudara- saudara sekalian yang saya hormati,

Saya akhiri sambutan saya dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan Kabupaten Solok serta seluruh masyarakat Sumatera Barat yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap produksi padi nasional. Saya ucapkan selamat kepada para petani yang sedang melakukan panen semoga hasil panennya menjadi berkah dan rahmat bagi kita sekalian. Amin

Semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha kita semua.

Billahitaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN RI
PADA PERINGATAN**

HARI KRIDA PERTANIAN KE 34 TAHUN 2006

Jakarta, 21 Juni 2006

***Saudara-saudaraku para petani yang
saya banggakan, Segenap anggota masyarakat
dan insan pertanian yang saya hormati,
Karyawan dan karyawan Departemen Pertanian,
serta undangan yang berbahagia,***

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, atas limpahan rahmat serta karunia Nya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul dalam upacara peringatan Hari Krida Pertanian ke 34 dalam keadaan sehat wal'afiat.



Sebagaimana kita telah fahami bahwa Hari Krida Pertanian adalah hari bersyukur dan sekaligus mawas diri, serta hari berbakti masyarakat dan insan pertanian di Indonesia. Selama sebulan penuh, dimulai tanggal 21 Juni sampai dengan 21 Juli segenap masyarakat dan insan pertanian memperingatinya dengan berbagai kegiatan. Namun demikian, kita menyadari pula bahwa ditengah-tengah keberhasilan dan berbagai prestasi di bidang pertanian, ternyata masih terdapat saudara-saudara kita yang kurang beruntung dan tengah mendapat cobaan dari Allah, zat yang Maha Bijaksana.

Di beberapa daerah telah terjadi bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita. Mulai dari bencana tsunami di Nangroe Aceh Darussalam hingga yang terakhir gempa bumi tektonik yang sangat dahsyat yang melanda Kabupaten Klaten – Jawa Tengah dan hampir sebagian besar propinsi D.I. Yogyakarta, serta bencana lumpur panas di Sidoardjo. Oleh sebab itu dalam kesempatan peringatan Hari Krida Pertanian ke 34 ini, adalah sangat baik jika ungkapan rasa syukur itu kita wujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian kita berharap bahwa kegiatan peringatan ini menjadi lebih memiliki makna dan arti bagi



kita dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu pula telah disepakati bahwa tema peringatan Hari Krida Pertanian ke 34 tahun 2006 ini, adalah ***"Meningkatkan Kebersamaan dan Keperdulian terhadap Tantangan Bencana Alam, serta Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani dan Peternak"***.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Meskipun kondisi ketahanan pangan nasional kita secara nasional terus membaik, akan tetapi kita harus terus berupaya untuk menggali dan menumbuhkan sumber-sumber pangan alternatif lainnya yang sangat banyak di berbagai daerah di negara kita. Kebijakan pangan nasional yang hanya bertumpu pada satu jenis pangan pokok seperti padi, jelas merupakan sebuah kondisi yang sangat riskan bagi Indonesia yang penduduknya nomor empat terbesar di dunia. Oleh karenanya diperlukan upaya keras bersama daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia, dengan menonjolkan iptek dan prinsip "zero waste".



Terjadinya kasus gagal panen di beberapa daerah seperti di Yahukimo dan Sikka, akibat kondisi iklim yang kurang baik dan serangan hama penyakit, seharusnya menjadi pengalaman yang berharga dalam mengembangkan pola produksi pangan di berbagai daerah. Artinya, bahwa ketahanan pangan haruslah berbasis pada potensi pangan setempat. Dalam menangani kasus gagal panen di Yahukimo - pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian telah mengirimkan tim dan bantuan finansial untuk membantu memperbaiki bibit dan teknik budidaya umbi-umbian di daerah tersebut. Bahkan, dalam bulan Juli 2006 Presiden RI merencanakan untuk melakukan kunjungan kerja dan menginap di daerah tersebut serta melakukan panen perdana dan dialog dengan penduduk setempat.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sebagai masyarakat dan insan pertanian Indonesia, kiranya kita patut berbesar hati, karena pada saat ini komitmen pemerintah terhadap sektor pertanian dan petaninya semakin meningkat. Keberpihakan dan keperdulian pemerintahan **Kabinet Indonesia Bersatu** untuk menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar



perekonomian semakin menunjukkan sosoknya. Berbagai program, kegiatan dan kebijakan yang pro pembangunan pertanian dan pro petani terus didorong dan diluncurkan. Peningkatan jumlah alokasi anggaran pembangunan pertanian, peningkatan belanja negara untuk petani dan peternak seperti : pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai basis usaha petani-peternak di setiap desa, penjaminan kredit pertanian, bantuan benih tanaman dan bibit ternak, pembangunan infrastruktur pertanian, revitalisasi penyuluhan, dan sebagainya merupakan sebagian dari 27 kegiatan utama pembangunan pertanian yang kesemuanya pro petani, pedesaan, dan pertanian.

Dukungan keberpihakan kepada sektor pertanian nampaknya memang semakin kokoh. Dalam kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Manado baru-baru ini, kongres menyarankan kepada pemerintah agar segera menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh ISEI berdasarkan laporan "The Economist" yang bertajuk *World in Figure* yang memuat peringkat produk unggulan setiap negara. Dari laporan itu disebutkan bahwa produk berdaya saing terbaik adalah komoditas pertanian, seperti



minyak sawit dan karet yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke dua di dunia, dan bahkan akan segera meningkat menjadi peringkat pertama dunia.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dalam masa kerja saya selama dua tahun sebagai Menteri Pertanian, saya telah mengunjungi 32 propinsi dari 33 propinsi di Indonesia. Kunjungan tersebut selain dimaksudkan untuk menangkap secara langsung berbagai potensi, keinginan dan berbagai hambatan serta kendala pembangunan pertanian di berbagai daerah, juga untuk lebih dekat dan mengetahui dengan lebih obyektif tentang kondisi pertanian dan petaninya. Untuk itu dalam kunjungan kerja tersebut saya kerap kali tinggal di rumah petani dan melihat lahan-lahan usaha taninya secara langsung. Saya ingin semua jajaran Departemen Pertanian dapat meniru kebiasaan ini, agar dapat menyelami dan mendalami apa sesungguhnya harapan para petani dan peternak terhadap aparat pemerintah.

Dari berbagai kunjungan tersebut, saya berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa petani kita memiliki keinginan, semangat dan etos kerja yang kuat untuk maju dan



memperbaiki dirinya. Oleh sebab itu hal yang paling dibutuhkan adalah kepedulian, keberpihakan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para petani dan peternak kita.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sebagai salah satu wujud syukur, pada hari ini pemerintah menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada 129 Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Pertanian. Tanda kehormatan ini diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan jasa dan pengabdianya kepada nusa dan bangsa, khususnya dalam bidang pertanian. Para penerima tanda kehormatan ini dapat dijadikan sebagai teladan bagi karyawan lain dan masyarakat.

Saya berharap pemberian tanda kehormatan ini akan meningkatkan motivasi dan memacu prestasi saudara saudara di masa mendatang. Untuk itu saya mengucapkan "Selamat" kepada pegawai yang menerimanya. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bekerja keras bersama sama untuk membangun pertanian Indonesia.



Saudara-saudara yang saya hormati,

Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, bersemangat, ikhlas dengan terus berusaha menghindarkan diri dari praktek-praktek kurang terpuji. Saya juga mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT agar kiranya senantiasa memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita semua, terutama kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah dan cobaan dari Allah SWT.

Akhirnya kepada segenap masyarakat dan insan pertanian Indonesia, saya mengucapkan "Selamat Hari Krida Pertanian ke 34" Dirgahayu Pertanian Indonesia.

**Billahi Taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



CLOSING REMARKS

By

**Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia
on the Occasion of the International Oil Palm
Conference**

23 June, 2006, Nusa Dua, Bali

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Good Morning***

***His Excellency Mr, Dewa Made Beratha,
Governor of Bali Province;
Distinguished Participants,
Ladies and Gentlemen;***

On behalf of the Government of the Republic of Indonesia, I would like to thank you all for your support and active participation during the conference. For nearly four days of the conference, a lot of issues and ideas have been discussed, experiences have been shared, questions have been raised, and concerns have been voiced. We do this with the full spirit of cooperation, solidarity, and togetherness.



We do hope that what we have done and what we have planned to do in the future will be ensuring the optimum use of resources for oil palm development in the world.

Dear participants,

As had been mentioned by the Vice President of the Republic of Indonesia earlier during the opening ceremony, we have to exchange our thoughts robustly and constructively to produce the formulation of optimum resource use in the development of oil palm and palm oil based industries. I do hope that in the dawn of closing this conference, a strong networking among us has already been established to facilitate closer relationship and cooperation for the prosperity of our nations through the development of oil palm and palm oil based industries in our respective country.

Ladies and gentlemen,

I am pleased to notice that a number of current issues faced by oil palm industry have been extensively discussed during the conference. Let me emphasize just few points of interest *i.e.* environment, biodiesel, product diversification,



R&D and planting material. For more than one century, oil palm plantation has been proven sustainable in regards to people, profit and planet. The industry has contributed significantly to the economy of producing countries as well as to provide enormous job opportunities in rural communities. As we all know that there is no agricultural practices that free from negative impacts on the planet. Fortunately, oil palm is by far more environmentally friendly than many other crops. Furthermore, we have learnt that a number of environmentally sound technologies have been developed and used in oil palm industry like zero waste processing system and biocontrol of pests and diseases. I am particularly happy that IOPRI has just released FEROMONAS™, a smart way to control *Oryctes rhinoceros*, the main pest in oil palm.

However, we must continue to be aware of environmental issues and to develop system and technology to improve sustainability of oil palm. For example, zoning and establishing of buffer zones may be the way to address the issue of loss of the biodiversity.



Ladies and gentlemen,

I would like to highlight the need for promoting diversification of products derived from palm oil. This notion is particularly important to Indonesia which is the second largest palm oil producer in the world and yet still mostly rely on exporting CPO. I believe that during the conference many of us have shared experiences and views on how to boost down stream industry of palm oil. The government of Indonesia will certainly promote this by simplifying bureaucracy, implementing policy and providing incentives to the investors.

As we have learnt during the last four days that R&D has contributed a lot of technologies to make oil palm industry grow even faster. I therefore believe that R&D must have strong support both from government and the industry it self. It is good to see that a number of private companies have established their own R&D institutions. The government of Indonesia has been also supporting oil palm R&D through IOPRI and will invigorate oil palm R&D in line with revitalization program in the country. Collaboration and networking among the whole institutions must be therefore encouraged to achieve more in synergistic manner. Likewise, a global network on oil



palm research should be promoted to address universal issues and needs, like Clean Development Mechanism (CDM) in relation to the Kyoto Protocol and health concern associated with palm oil.

Let me underline the need to promote the use of legitimate high yielding planting materials. The current low productivity is certainly one of the most important effects of the use of illegitimate seeds particularly by the smallholders. This is now a serious concern in Indonesia because about 35% of the plantation belongs to the smallholders. The government will therefore make a special effort to improve the appreciation of the smallholders on benefits of legitimate seeds as well to make them easier available. Such effort could be achieved by developing advanced technology to improve availability of planting materials as well as high yielding plants. Higher productivity of oil palm is expected through tissue culture derived planting material. All of us have to support the strong R&D to accelerate the progress of such technology, in order to increase the competitive advantage of this commodity to other oil producing crops.



Dear participants,

Last but not least, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, let me reiterate in expressing thanks and appreciation to all lecturers and speakers for their valuable contributions concerning some aspects of oil palm development. I hope all points formulated from this conference will be inserted in the action plan of oil palm development in our respective country. I also thanks to IOPRI and all research institutes under Indonesian Research Institute for Estates Crops or LRPI, for once again exhibiting their excellent capacity to provide alternative technology for oil palm agribusiness and exposed tem in an International Conference. I do hope, however, that IOPRI provides also a good balance in orientation of R&D for smallholders and for private sectors.

At this opportunity, I would like to apologize for our shortcoming in serving you during your stay in Bali. For those who have desire to stay longer in Bali, I do hope that you find more pleasant and sweet memories in "the Island of Gods". And for those who will fly back home soon, have a safe and nice return journey. Finally, by saying Alhamdulillahirobilalamin, I declare the International Oil Palm



Conference, IOPC 2006, is officially closed. See you in the next IOPC Conference.

Thank you.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

The Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN
PADA
PEMBUKAAN SEMINAR
MULTIFUNGSI DAN REVITALISASI PERTANIAN
Lido Lakes Resort and Conference**

Jl. Raya Bogor-Sukabumi, 27-28 Juni 2006

Assa/aamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Yang saya hormati :

- **Saudara Kepala Badan Pertanahan Nasional,**
- **Saudara Bupati Kabupaten Indramayu**
- **Para Pejabat Eselon I dan ASEAN Secretariat**
- **Saudara narasumber, para peserta seminar serta Bapak dan Ibu para undangan sekalian**
- **Distinguished guests, ladies and gentlemen**

Pertama-tama, saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah SWT, yang atas ridhoNya pada pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul untuk membahas topik yang semakin penting dalam



kelanggengan pembangunan nasional, khususnya pertanian yaitu "Multifungsi Pertanian Dalam Mendukung Revitalisasi Pertanian".

Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua tentang bagian dari komitmen Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK), yang pada dasarnya mempertegas bahwa pengembangan lahan pertanian akan ditempuh melalui:

- (i) reformasi keagrariaan untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan dan air serta meningkatkan rasio luas lahan pertanian per kapita,
- (ii) pengendalian konversi lahan pertanian dan pencadangan/pengalokasian lahan abadi khusus untuk pertanian,
- (iii) fasilitasi terhadap pemanfaatan lahan (pembukaan lahan pertanian baru), serta
- (iv) penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri pedesaan sebagai penyedia lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani.



Saudara-Saudara Peserta Seminar,

Akhir-akhir ini dan untuk masa yang akan datang, perwujudan ketahanan pangan berkelanjutan yang merupakan salah satu tujuan utama RPPK, menghadapi empat kendala, yaitu:

(1) stagnasi dan pelandaian produktivitas akibat kendala teknologi dan input produksi, (2) instabilitas produksi akibat serangan hama penyakit dan cekaman iklim, (3) penurunan produktivitas akibat degradasi sumberdaya lahan dan air, dan (4) penciptaan lahan, khususnya lahan sawah irigasi teknis akibat konversi lahan menjadi lahan non pertanian. Sementara itu, sasaran ketahanan pangan nasional adalah selain memantapkan swasembada beras yang berkelanjutan, juga mentargetkan untuk pencapaian swasembada jagung, kedelai, gula dan daging sapi masing-masing pada tahun 2007, 2015, 2009, dan 2010.

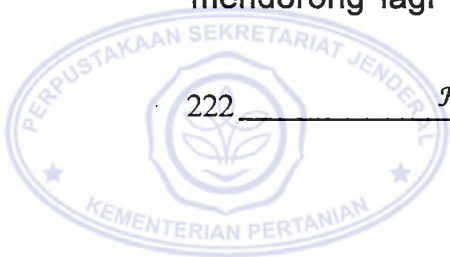
Dari keempat kendala tersebut, kendala terakhir yaitu konversi lahan merupakan ancaman paling serius dan permanen, karena bersifat "irreversible" atau tidak bisa dikembalikan. Sedangkan kendala yang lain masih bisa diatasi dengan perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya,



inovasi teknologi dan input produksi. Oleh sebab itu, selain meminimalkan luas lahan tidur dan lahan terlantar (*absentee land*), usaha-usaha yang akan ditempuh pemerintah adalah mencadangkan lahan pertanian abadi 15 juta ha, baik lahan sawah maupun lahan kering.

Keberhasilan target RPPK tersebut sangat ditentukan oleh bisa atau tidaknya konversi lahan pertanian dikendalikan dan/atau tersedianya lahan potensial bukaan baru yang tentu saja membutuhkan investasi yang cukup tinggi. Fakta menunjukkan bahwa pada beberapa tahun terakhir, konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian mengalami akselerasi, sejalan dengan meningkatnya pembangunan industri dan perkotaan.

Sebagian dari konversi lahan pertanian tersebut terjadi melalui konversi secara individual petani, yang jumlahnya relatif kecil, namun sulit dikendalikan. Konversi bentuk ini terutama didorong oleh kebutuhan individu petani untuk membangun rumah atau kebutuhan lain untuk mendapatkan uang tunai. Konversi bentuk ini menyebabkan terjadinya fragmentasi lahan pertanian yang selanjutnya lebih mendorong lagi terjadinya konversi berikutnya, karena



dengan semakin sempitnya lahan usahatani maka lahan tersebut tidak lagi berperan sebagai sumber utama pendapatan keluarganya.

Bentuk lain dari konversi lahan pertanian adalah berupa konversi massal seperti pembangunan perkotaan, perumahan, industri, jalan, serta pembangunan berbagai infrastruktur lainnya. Konversi lahan secara massal terutama didorong oleh desakan keperluan pengembangan prasarana publik atau privat sebagai konsekuensi akselerasi pembangunan ekonomi. Kadangkala proses ini kurang mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan aspek non-ekonomi seperti aspek sosial budaya dan lingkungan, baik oleh pengembang, pemerintah daerah, maupun petani pemilik lahan.

Percepatan konversi lahan pertanian dikhawatirkan akan mengurangi kapasitas dan kapabilitas Indonesia menyediakan pangan yang cukup secara berkelanjutan, sehingga akan meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor produk pertanian dan memposisikan Indonesia pada keadaan rawan pangan yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi krisis pangan. Pasokan



pangan dari negara lain tidak dapat diandalkan oleh Indonesia yang kebutuhan pangannya sangat tinggi. Sewaktu-waktu impor dapat mengalami gangguan karena berbagai sebab, seperti terganggunya hubungan bilateral dan bencana alam.

Untuk itu produksi pangan Indonesia harus meningkat secara proporsional sejalan dengan peningkatan kebutuhan. Bahkan jika memungkinkan berbagai produk unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional perlu dikembangkan sebagai penghasil devisa.

Konversi lahan pertanian yang tidak terkendali akan menjadi ancaman utama bagi revitalisasi pertanian dan kemandirian pangan. Konversi lahan pertanian secara besar-besaran adakalanya didorong oleh kebijaksanaan pemerintah yang kurang memihak kepada pertanian. Sebagai contoh, pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi tahun 2003/2004, sekitar 3,1 juta ha (42%) dari 7,3 juta ha lahan sawah beririgasi yang ada sekarang sudah dialokasikan untuk penggunaan non-pertanian seperti yang dikemukakan oleh Badan Pertanahan Nasional.



Hal tersebut mencerminkan rendahnya kepedulian beberapa pemerintah daerah terhadap eksistensi lahan sawah beririgasi. Apabila di dalam RTRW dinyatakan bahwa lahan pertanian tertentu bisa beralih fungsi, maka perizinan untuk konversi lahan pertanian tersebut akan sangat mudah.

Hadirin yang saya hormati,

Selama ini sektor pertanian dianggap hanya sebagai penghasil pangan dan serat dengan nilai ekonomi tertentu. Berbagai fungsi lainnya, yang disebut dengan “Multifungsi Pertanian” seperti fungsi lingkungan, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi agroturisme, fungsi penyedia lapangan kerja, dan fungsi ketahanan pangan belum dipahami atau masih diabaikan oleh sebagian besar masyarakat dan pemangku kepentingan.

Saya berharap agar Seminar Multifungsi Pertanian ini menghasilkan **Pertama**, pemahaman yang komprehensif di kalangan pemangku kebijakan, pengembang, akademisi, LSM, dan wakil petani tentang hakikat dari pertanian yang secara utuh, dalam hal ini kita sebut sebagai multifungsi pertanian. **Kedua**, menghasilkan rumusan berupa saran kebijakan tentang



bagaimana mempertahankan dan meningkatkan apresiasi terhadap nilai multifungsi pertanian, termasuk bentuk dan mekanisme pemberian insentif bagi petani sehingga sektor pertanian menjadi sektor yang lebih atraktif dalam kaitannya dalam upaya mengendalikan konevsi lahan.

Kepada para nara sumber yang berasal dari berbagai lembaga seperti, Ketua Komisi IV DPR RI, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bupati Kabupaten Indramayu, International Centre Research for Agroforestry (ICRAF), dan Yayasan Padi Indonesia, yang akan membagi pengetahuan, pemahamannya dan poengalamannya tentang multifungsi pertanian, saya menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya.

To the distinguished guest speakers who have spent their invaluable time to prepare the papers and traveled long distance from Japan, Korea, The Philippines, Malaysia, and Germany, I would like to express my sincerest appreciation. I understand that in many countries, such as Japan and Korea, the principles of multifunctionality of agriculture have been formulated and enacted in agricultural policies and regulation. Your presentation and interaction with us hopefully will inspire us to also improve our agricultural policies, using



the multifunctionality, rather than mere economic principles. During your stay here, I hope you will have opportunity to see the beautiful scenery around Bogor. Have a nice stay and a pleasant trip back home.

Akhirnya kepada panitia penyelenggara saya menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya. Saya berharap agar seminar ini berjalan dengan lancar, penuh dengan rasa kekeluargaan dan keberpihakan kepada petani, sehingga menghasilkan rumusan yang dapat dimanfaatkan dalam kebijakan pertanian.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim, secara resmi "Seminar Multifungsi Pertanian Dalam Mendukung Revitalisasi Pertanian" ini saya buka.

Selamat berdiskusi.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PENCANANGAN GERAKAN PEREMAJAAN
KARET RAKYAT Mendukung REVITALISASI
PERKEBUNAN
MUSI BANYUASIN, SUMATERA SELATAN**

TANGGAL 30 JUNI 2006

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang terhormat.

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

Sdr. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan

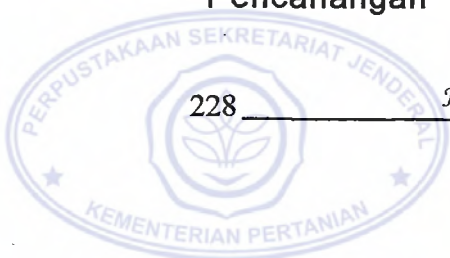
Sdr. Bupati Musi Banyuasin

Sdr. Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Sdr. Petani Karet dan Kelapa Sawit,

Hadirin para undangan yang saya hormati,

Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena kita bersama dipagi ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara "Pencanangan Gerakan Peremajaan Karet Rakyat



Mendukung Revitalisasi Perkebunan 2006 – 2010". Sungguh merupakan suatu kegembiraan bagi saya untuk hadir dan berkumpul dengan Saudaraku para petani dan pelaku agribisnis lainnya. Pada kesempatan ini sengaja, saya bersama-sama dengan beberapa Eselon I dan II Departemen Pertanian hadir secara langsung untuk dapat berinteraksi dengan para petani dan dapat mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan pertanian khususnya komoditas perkebunan karet dan kelapa sawit. Masukan ini menjadi sangat penting, karena saat ini Departemen Pertanian sedang menyiapkan Renja (Rencana Kerja) 2007 yang tentunya harus realistis dan dapat diimplementasikan di lapangan.

Hadirin yang saya hormati,

Bagi sektor pertanian khususnya perkebunan karet dan kelapa sawit mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam pendapatan devisa Negara. Dan total ekspor komoditas primer perkebunan tahun 2005 sebesar US\$ 10,9 milyar, sekitar US\$ 6,5 milyar berasal dari 2 komoditas tersebut yaitu US \$ 4,3 milyar dari kelapa sawit, US\$ 2,2 milyar dari karet dan pengembangan 2 komoditas ini juga melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak di sektor on farm,



yaitu 1.7 juta TK di karet dan 2,7 juta TK di kelapa sawit. Dengan peran penting 2 komoditas ini, maka komoditas karet dan kelapa sawit ke depan menjadi komoditas unggulan yang diprioritaskan pengembangannya baik melalui peremajaan maupun perluasan tanaman.

Saat ini areal karet mencapai 3.3 juta ha, 2.8 juta ha diantaranya merupakan perkebunan rakyat, sedangkan areal kelapa sawit di Indonesia mencapai 5,6 juta ha, 1,9 juta ha diantaranya merupakan perkebunan rakyat dan areal yang dikembangkan tersebut, produksi kelapa sawit mencapai 12,5 juta ton dan produksi karet 2,3 juta ton. Dengan tingkat produksi demikian, Indonesia saat ini merupakan negara produsen terbesar kedua untuk karet setelah Thailand dan kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia dan kedepan Indonesia sangat berpeluang menjadi produsen utama karet alam dan kelapa sawit dunia. Hal ini sangat mungkin karena faktor ketersediaan lahan, potensi produktivitas yang masih bisa kita tingkatkan serta teknologi pengembangan yang telah kita kuasai.



Hadirin yang saya hormati,

Prospek karet dan kelapa sawit ke depan sangat cerah. Dengan tingginya harga minyak bumi dan meningkatnya perekonomian dunia, khususnya China telah mendorong permintaan karet clam baik untuk ban maupun produk asal karet lainnya Sementara itu, permintaan yang tinggi untuk minyak goreng dan oleo-kimia, serta kebutuhan biodiesel telah mendorong meningkatkan permintaan minyak sawit yang sangat tinggi.

Meskipun kinerja pengembangan karet dan kelapa sawit sangat baik, saya menyadari masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh kedua komoditas itu. Permasalahan yang menurut saya perlu segera kita tangani dan merupakan pekerjaan rumah kita bersama adalah bagaimana kita dapat memperbaiki pertanaman karet dan kelapa sawit sehingga dapat memberikan tingkat produktivitas yang optimal sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan petani.

Hadirin yang saya hormati,

Saya sangat menyambut baik upaya Pemerintahan



Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencanangkan Gerakan Peremajaan Karet Rakyat Mendukung Revitalisasi Perkebunan. saya menyadari bahwa upaya peremajaan tanaman khususnya karet dan kelapa sawit merupakan salah satu prioritas pembangunan pertanian.

Namun demikian, membangun pertanian ataupun perkebunan tentunya tidak mungkin dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah saja khususnya Departemen Pertanian. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh *stakeholder* yang terkait dengan pengembangan karet dan kelapa sawit baik petani, pengusaha, Pemda, Perguruan Tinggi, Peneliti, Perbankan, DPRI DPRD serta Pemerintah Pusat, untuk bersama-sama mengupayakan peremajaan karet dan kelapa sawit sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Tanpa adanya keterpaduan diantara kita, tentunya tidak akan menghasilkan keluaran seperti yang kita harapkan.

Baru saja kita bersama-sama menyaksikan nota kesepakatan (MOU) yang merupakan bukti kebersamaan untuk membangun perkebunan. MOU tersebut tentunya



harus segera dapat dibuktikan realisasinya di lapangan. Saya meminta kepada Saudara Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk memantau dan memonitor pelaksanaannya di lapangan.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam upaya pengembangan perkebunan kedepan, saat ini Departemen Pertanian sedang menyiapkan program Revitalisasi Perkebunan untuk komoditi karet, kelapa sawit dan kakao. Program ini difokuskan untuk peremajaan dan perluasan tanaman karet, kelapa sawit dan kakao rakyat. Pemerintah menyediakan subsidi bunga, sehingga suku bunga yang diterima oleh petani hanya 10%, sedangkan sumber pendanaan adalah dari Bank Rakyat Indonesia. Program ini direncanakan untuk karet 250 ribu ha peremajaan dan 50 ribu ha perluasan sedangkan kelapa sawit 125 ribu ha peremajaan dan 1.375 ribu ha perluasan.

Saya berharap, agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan Dishreman-teman petani sebaik-baiknya untuk mengembangkan tanaman perkebunan melalui



pencanangan Gerakan Peremajaan Karet Rakyat. Dengan demikian pencanangan ini akan segera diikuti pengembangan secara meluas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemerintah Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin, seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan subsektor perkebunan.

Kepada para petani saya ucapkan selamat bekerja dan mari kita remajakan tanaman karet kita dengan bahan tanaman unggul dan kita rawat kebun dengan baik yang merupakan aset dan sumber penghidupan kita bersama

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohim. Pencanangan Gerakan Nasional Peremajaan Karet Mendukung Revitalisasi Perkebunan secara resmi dimulai. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap usaha kita,



Amien.

Wabilah taufik walhidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Musi Banyuasin. 30 Juni 2006

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.Sc





Himpunan Sambutan Menteri Pertanian Tahun 2006
